



BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

TRADE FACILITATION AND THE PERFORMANCE OF INDONESIAN MANUFACTURING EXPORT

Aulia Luthfianto, D.S. Priyarsono, Raul Barreto

DINAMIKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA DENGAN ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI): POTENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Agus Syarip Hidayat

HUBUNGAN ANTARA CONSUMPTION ABROAD (MODA 2) DENGAN COMMERCIAL PRESENCE (MODA 3) DI SEKTOR JASA PARIWISATA INDONESIA

Muhammad Fawaiq

PENENTUAN NEGARA PRIORITAS PENGEMBANGAN ATDAG DAN ITPC MELALUI METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Hasni, Fitria Faradila

PROYEKSI EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA: SUATU PENDEKATAN VECTOR AUTOREGRESSIVE

Aditya Paramita Alhayat, Azis Muslim

TRANSMISI HARGA ASIMETRI DALAM RANTAI PASOK BAWANG MERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMPOR DI INDONESIA: STUDI KASUS DI BREBES DAN JAKARTA

Januar Arifin Ruslan, Muhammad Firdaus, Suharno

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP USAHA TANI BERAS ORGANIK DI PROVINSI JAWA BARAT

Ulpah Jakiyah, Lukman M Baga, Netti Tinaprilla

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan diterbitkan sejak tahun 2007 secara periodik dua kali dalam satu tahun (Juli dan Desember), memuat hasil penelitian terkait dengan isu perdagangan.

EDITOR

KETUA

Dr. Ir. Kasan, MM (*International Trade*, ABFI Perbanas Jakarta)

ANGGOTA:

Ir. Ernawati Munadi, Msi, Ph.D (*Domestic Trade*, AIPEG)
Dr. Masyhuri, APU (*Economic History*, LIPI)
Zamroni Salim, Ph.D (*International Trade and Development*, LIPI)
Dr. Maddaremmeng A. Panennungi, S.E (*International Trade*, UI)
Drs. M. Bashori Imron, Msi (*Media and Communication*, LIPI)

MITRA BESTARI:

Prof. Dr. Abuzar Asra, M.Sc (*Trade and Poverty*, BPS)
Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA (*Trade and Development*, LIPI)
Prof. Dr. Rina Oktaviani (*International Trade – CGE Modelling*, IPB)
Dr. Wayan R. Susila, APU (*Trade and Agricultural Economics*, TCF)
Achmad Shauki, Ph.D (*International Trade*, AIPEG)
Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc (*Consumers Protection and Trade*, IPB)
Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS (*Agriculture Economics*, Kementan)
Dr. Slamet Sutomo (*Domestic Trade*, STIS)

REDAKSI PELAKSANA:

Puspita Dewi, SH, MBA (Koordinator penyelenggara penyusunan Buletin)
Maulida Lestari, SE, ME (Penilai kesesuaian template dan standar naskah, pemeriksa dummy)
Reni K. Arianti, SP, MM (Penyelenggara administrasi dan pemeriksa dummy)
Suler Malau, SH (Pemeriksa Dummy)
Dewi Suparwati, S.Si (Penyelenggara administrasi, pencatatan dan korespondensi)
Hilda Cahyani, Ph.D (Translator)

ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
Kementerian Perdagangan, RI
Gedung Utama Lantai 3 dan 4
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 23528681
Fax. (021) 23528691
publikasi.bppkp@kemendag.go.id

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dapat diakses melalui:
<http://www.kemendag.go.id/economic-profile/research-bulletin>

Terakreditasi
Berdasarkan SK. Kepala LIPI No.818/E/2015 tanggal 15 Juli 2015
(Sertifikat No.689/AU3/P2MI-LIPI/07/2015)

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (BILP) Volume 10 No.1 Tahun 2016. BILP merupakan sarana untuk menyebarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP), Kementerian Perdagangan kepada seluruh *stakeholders*. Dalam menerima naskah, BILP bersifat terbuka dengan menerima berbagai naskah dari penulis baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Perdagangan sepanjang naskah bertemakan sektor perdagangan maupun sektor terkait perdagangan.

Tulisan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan cukup beragam, namun tetap memperhatikan aspek perdagangan dalam berbagai dimensi dan pendekatan keilmuan. Dalam Volume 10 No. 1, Juli 2016, BILP mempublikasikan tujuh tulisan ilmiah yang mengkaji berbagai isu di bidang perdagangan. Dari tujuh naskah yang dipublikasikan, tiga diantaranya merupakan naskah ilmiah yang tulis oleh penulis dari luar Kementerian Perdagangan.

Tulisan pertama dengan judul “Fasilitasi Perdagangan dan Kinerja Ekspor Manufaktur Indonesia” menganalisis tentang dampak dari fasilitasi perdagangan pada kinerja ekspor manufaktur Indonesia pada periode 2010 – 2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitasi perdagangan dalam lingkungan kepabeanan dari Indonesia dan mitra dagang utamanya berpengaruh besar dan positif terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia, sementara lingkungan regulasi di Indonesia mengurangi arus perdagangan. Kerjasama perdagangan dengan negara-negara ASEAN berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia.

Tulisan kedua mengkaji dinamika kerja sama ekonomi antara Indonesia dan anggota OKI serta prospek liberalisasi ekonomi OKI dan potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan judul “Dinamika Kerjasama Ekonomi Indonesia dengan Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI): Potensi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia”, hasil analisis menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi OKI berpotensi memberikan dampak sektoral yang beragam bagi Indonesia, khususnya terlihat pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, output industri dan perdagangan. Indonesia perlu mengambil peran

untuk mendorong percepatan dan pendalaman liberalisasi perdagangan yang lebih komprehensif antar anggota OKI.

Tulisan ketiga berjudul “Hubungan Antara *Consumption Abroad* (Moda 2) dengan *Commercial Presence* (Moda 3) di Sektor Jasa Pariwisata Indonesia” bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Moda 2 dan Moda 3 dalam perdagangan internasional di sektor jasa pariwisata dengan menggunakan Panel *Vector Error Correction Model* (VECM) Granger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas jangka pendek antara kedua variabel tetapi terdapat hubungan jangka panjang satu arah yaitu variabel Moda 3 dipengaruhi oleh variabel Moda 2. Hasil pengujian pada gabungan antara jangka panjang dan jangka pendek menunjukkan bahwa variabel Moda 3 secara kuat dipengaruhi oleh variabel Moda 2.

Tulisan keempat bertujuan mengembangkan kriteria-kriteria penentuan negara prioritas untuk pengembangan Atase Perdagangan (*Atdag*)/*Indonesia Trade Promotion Centre* (ITPC), dan mengidentifikasi negara-negara prioritas untuk mengembangkan *Atdag*/ITPC. Keberadaan *Atdag* dan ITPC sebagai perwakilan perdagangan berperan penting dalam peningkatan ekspor, sehingga perlu penguatan dan pengembangan.

Tulisan kelima bertujuan untuk menyusun proyeksi ekspor dan impor nasional periode 2015-2019 yang dilihat berdasarkan sektor migas dan non migas. Dengan menggunakan pendekatan *vector autoregressive*, hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor nasional pada 2015 turun sebesar 10,65% dan meningkat sebesar 1,06% di tahun 2019, sedangkan impor nasional tahun 2015 turun sebesar 10,02% dan meningkat sebesar 12,11% di tahun 2019. Di masa datang pertumbuhan ekspor Indonesia masih dipengaruhi oleh PDB negara-negara mitra utama sedangkan impor lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi domestik.

Dengan judul “Transmisi Harga Asimetri Dalam Rantai Pasok Bawang Merah dan Hubungannya dengan Impor di Indonesia: Studi Kasus di Brebes dan Jakarta”, tulisan keenam bermaksud untuk menganalisis transmisi harga dalam rantai pasok bawang merah dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi harga serta menganalisis hubungan antara harga bawang merah impor terhadap harga produsen dan harga konsumen bawang merah. Hubungan petani-grosir terjadi asimetris harga dalam jangka pendek karena terkait dengan biaya penyesuaian, sedangkan grosir-pengecer terjadi asimetris dalam jangka panjang karena terkait dengan penyalahgunaan kekuatan pasar. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran dari harga impor bawang merah dalam penentuan harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen.

Tulisan ketujuh menganalisis daya saing beras organik, dan mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tani beras organik dengan

menggunakan *Policy Analysis Matrix*. Varietas beras organik memiliki daya saing yang cukup untuk ekspor, terlihat pada keunggulan kompetitif dan komparatif. Penerimaan secara finansial maupun sosial dapat memenuhi biaya input domestik. Keunggulan kompetitif dan komparatif melemah akibat dari adanya pengaruh biaya sertifikasi lahan pada biaya domestik dan biaya kemasan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output menguntungkan petani.

Tulisan ilmiah yang diterbitkan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan baik dalam lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdagangan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan buletin ini.

Jakarta, Juli 2016
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
TRADE FACILITATION AND THE PERFORMANCE OF INDONESIAN MANUFACTURING EXPORT <i>Aulia Luthfianto, D.S. Priyarsono, Raul Barreto</i>	1-20
DINAMIKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA DENGAN ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI): POTENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA <i>Agus Syarip Hidayat</i>	21-43
HUBUNGAN ANTARA CONSUMPTION ABROAD (MODA 2) DENGAN COMMERCIAL PRESENCE (MODA 3) DI SEKTOR JASA PARIWISATA INDONESIA <i>Muhammad Fawaiq</i>	45-61
PENENTUAN NEGARA PRIORITAS PENGEMBANGAN ATDAG DAN ITPC MELALUI METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS <i>Hasni, Fitria Faradila</i>	63-85
PROYEKSI EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA: SUATU PENDEKATAN VECTOR AUTOREGRESSIVE <i>Aditya Paramita Alhayat, Azis Muslim</i>	87-102
TRANSMISI HARGA ASIMETRI DALAM RANTAI PASOK BAWANG MERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMPOR DI INDONESIA: STUDI KASUS DI BREBES DAN JAKARTA <i>Januar Arifin Ruslan, Muhammad Firdaus, Suharno</i>	103-128
DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP USAHA TANI BERAS ORGANIK DI PROVINSI JAWA BARAT <i>Ulpah Jakiyah, Lukman M Baga, Netti Tinaprilla</i>	129-146

TRADE FACILITATION AND THE PERFORMANCE OF INDONESIAN MANUFACTURING EXPORT

FASILITASI PERDAGANGAN DAN KINERJA EKSPOR MANUFAKTUR INDONESIA

Aulia Luthfianto¹, D.S. Priyarsono², Raul Barreto³

¹ Inspectorate IV, Inspectorate General, Ministry of Trade-RI,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Central Jakarta, Indonesia

² Department of Economics and Management, Bogor Agricultural University, Bogor 16143, Indonesia

³ School of Economics, The University of Adelaide, Adelaide SA 5005, Australia
email: aulia.luthfianto@kemendag.go.id

Naskah diterima: 25/01/2016 Naskah direvisi: 22/03/2016 Disetujui diterbitkan: 23/06/2016

Abstrak

Penelitian ini menganalisa dampak dari fasilitasi perdagangan pada kinerja ekspor manufaktur Indonesia. Data spesifik dari masing-masing negara baik Indonesia dan tiga puluh mitra dagang utama dari komoditi manufaktur selama periode 2010 hingga 2014 digunakan dalam membangun indikator fasilitasi perdagangan, termasuk langkah-langkah dalam lingkungan kepabeanan dan regulasi, efisiensi pelabuhan, dan infrastruktur di sektor jasa. Hubungan antara kinerja ekspor Indonesia dan indikator tersebut kemudian di estimasi menggunakan *gravity model* dengan data panel. Hasil analisa menunjukkan bahwa fasilitasi perdagangan dalam lingkungan kepabeanan dari Indonesia dan mitra dagang utamanya berpengaruh besar dan positif terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia, sementara lingkungan regulasi di Indonesia mengurangi arus perdagangan. Kerjasama perdagangan dengan negara-negara ASEAN berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia. Implikasi kebijakan yang dapat disarankan adalah dengan memprioritaskan upaya dalam lingkungan kepabeanan Indonesia dan mitra dagang, melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya yang diperlukan dalam melakukan perdagangan. Selain itu, meningkatkan kerjasama perdagangan dalam kawasan ASEAN akan dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Kata kunci: Fasilitasi Perdagangan, Ekspor Manufaktur, *Gravity Model*.

Abstract

This paper analyzes the impact of trade facilitation on Indonesian manufacturing export performance. Some specific data of Indonesia and thirty countries as Indonesian main trading partners of manufacture commodities over the period 2010 to 2014 were used to construct trade facilitation indicators, including measures in the customs and regulatory environment, port efficiency, and service sector infrastructure. The relationship between Indonesian export performance and these indicators were estimated using a gravity model with panel data. The findings provide some evidence that trade facilitation on customs environment of Indonesia and its trading partners largely and positively affects Indonesian manufacturing export performance, while the Indonesian regulatory environment deters the trade flows. Trade partnerships with ASEAN countries positively and significantly affect Indonesian manufacturing export performance. It is suggested for policy implication to prioritise efforts and development on Indonesian customs environment and its trading partners, through time and cost efficiency to trade. Moreover, Indonesia should generate more trade within ASEAN region which could stimulate a higher export performance.

Keywords: Trade Facilitation, Manufacturing Export, Gravity Model.

JEL Classification: C23, F13, F14, F41

INTRODUCTION

The global trade has now become increasingly liberalised as countries in the world become more integrated through international trade agreements, and also due to unilateral reforms. While agreement and policy reforms may eliminate barriers to trade, not all costs in trade are diminished through the liberalised market (Hoekman & Nicita, 2010). In fact, traders still face inefficiency in time and high trade-related costs due to excessive bureaucratic regulation and poor infrastructure. The results of a World Bank survey 'Ease of Doing Business' in 2008 revealed that administrative barriers, known as 'red tape' bureaucratic procedures related to the shipment of trading goods in developing countries, are estimated to cost more than 10 percent of the export value. The study of Marquez-Ramos *et al.* (2011) found that institutional trade barriers significantly affect trade flows than tariff barriers. In addition, congestion problems and the bottleneck in movement of goods in ports due to poor infrastructure have significantly contributed to high transportation costs, especially in the Southeast Asian countries (Abe & Wilson, 2009).

Efficiency is a key determinant for every country in order to compete in the global economy, as it can drive export competitiveness. To improve a country's efficiency, governments should facilitate trade by easing the flows of goods and lowering the costs. In other words, it is important to take into account the trade facilitation on the development agendas.

While there is no standard definition for trade facilitation, in a general sense, trade facilitation can be interpreted as a policy to eliminate international trade costs (besides tariff and non-tariff barriers) such as administrative delays, transaction and institutional costs, transportation costs and any other costs, which are not explicitly stated in a country's official framework, known as 'non-official barriers' (Zaki, 2008).

Trade facilitation has become a global concern in the last decade, so the importance of reform and development in this area is considered to be significant with regard to increase the efficiency and competitiveness of a country. Many empirical studies have investigated the impact of trade facilitation on trade flows; however, studies in the case of a specific country are still limited. The objective of this study is to examine the impact of trade facilitation on the performance of Indonesian manufacture's export to its main trading partners. This examination provides some insights for policy makers in terms of prioritising development and reforms in trade facilitation in Indonesia to achieve higher export performance.

Indonesia has taken various trade facilitation measures to simplify and harmonise trade-related procedures as well as to develop supporting infrastructure in line with ongoing agreements at the multilateral and regional levels, such as the Trade Facilitation Agreement organised by the World Trade Organisation (WTO) and the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) held by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

By being actively involved in several economic cooperations, Indonesia's objective is not only aimed at opening market access and reducing trade barriers for Indonesian exports, but also at engaging with the global trade system (Damuri, 2006).

To measure the efforts of trade facilitation reforms in line with various agreements, it requires indicators that reflect the broad conditions of

Indonesian trade facilitation. In this respect, constructing and combining indicators from different sources is expected to provide specific measures that also meet the needs of policymakers. Figure 1 depicts the six indicators used to measure trade facilitation in Indonesia over the last five years, following the indicators used in Wilson *et al.* (2003, 2005).

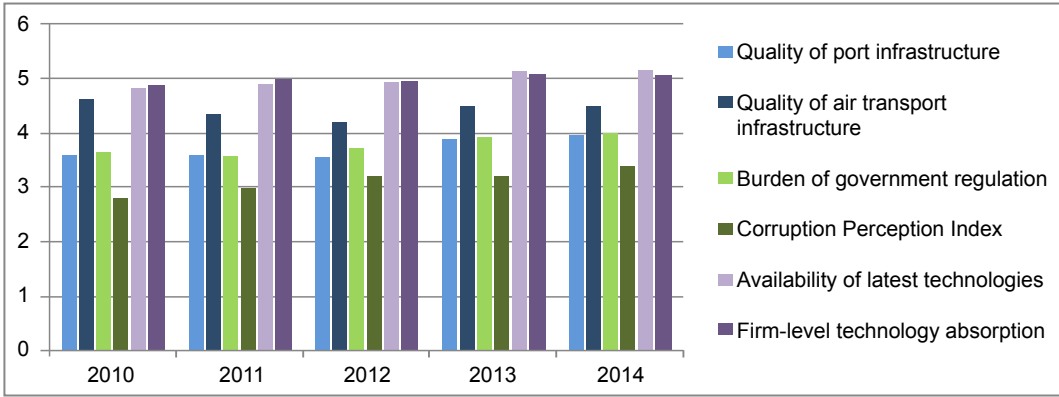


Figure 1. Indonesia's Trade Facilitation Measures, 2010 – 2014

Source: The World Bank, and Transparency International (2015).

Quality of port and air transport infrastructure, burden of government regulation, availability of latest technologies and firm-level technology absorption were taken from the Global Competitiveness Report (GCR). The scores range from 1 (poor) to 7 (best) for GCR variables, and from 1 (highly corrupt) to 10 (very clean) for Corruption Perception Index (CPI). Overall, it shows varied performance for each variable with the score of Indonesia's CPI showing the lowest performance. The six indicators were then classified in order to construct three trade facilitation indicators for

measuring a country's efforts in port efficiency, regulatory environment and service sector infrastructure. Customs environments were taken from the World Bank 'Doing Business Reports' to indicate the time and cost to conduct export-import activities for a country, following the study of Portugal-Perez & Wilson (2012). Table 1 indicates that Indonesia's documentation and time needed to export and import have remained unchanged for over the last five years, while the cost of export and import shows an improvement in efficiency.

Table 1. Indonesian Trading Across Borders, 2010 - 2014

Year	Documents to export (number)	Time to export (days)	Cost to export (defiated USD per container)	Documents to import (number)	Time to import (days)	Cost to import (defiated USD per container)
2010	4	17	820.7	8	27	841.1
2011	4	17	758.1	8	27	776.9
2012	4	17	701.2	8	23	718.6
2013	4	17	640.6	8	23	687.5
2014	4	17	585	8	26	660

Source: Doing Business Report (2015)

Figure 2 shows the ten main destination countries of Indonesian manufacturing exports in 2014, the scores varied considerably among the countries. Figure 2 also demonstrates the level of CPI, the availability of the latest technologies, and firm-level technology absorption was high in most

observed countries, except China and Thailand. Overall, Singapore had the highest performance which is considered as the best practice among the observed countries. This level of trade facilitation indicators offers considerable potential correlation of export performance from Indonesia to the major markets.

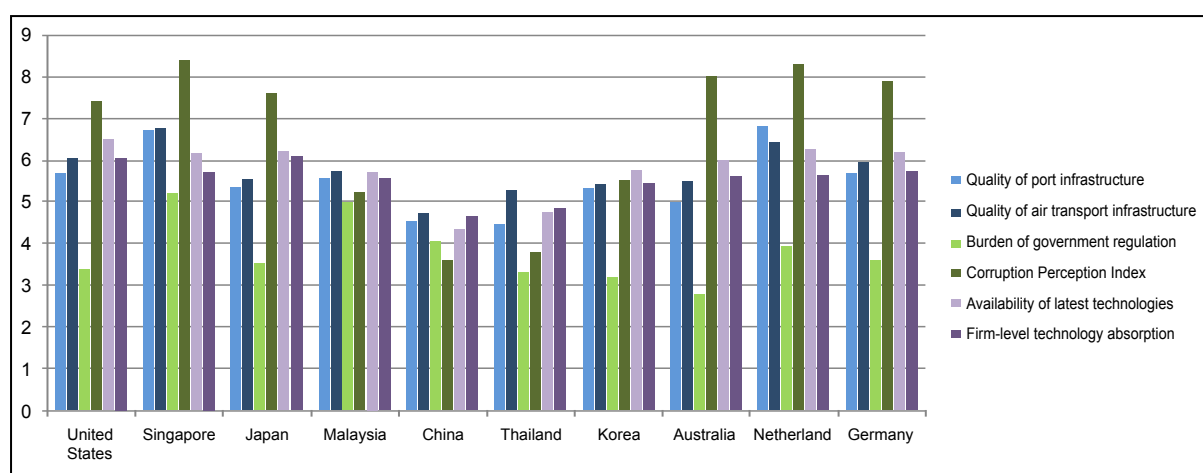


Figure 2. Trade Facilitation Indicators of Indonesia's Major Trading Partners in 2014

Source: The World Bank, and Transparency International (2015)

The documents, time and costs involved in conducting export and import with Indonesia's 10 main trading partners are shown in Table 2. Singapore showed the top performance with less documents, time and cost required to

conduct the international trade compared to other countries. In contrast, Japan was the lowest performing among the 10 countries based on the Doing Business (DB) rank in 2015.

Table 2. Trading Across Borders of Indonesia's Major Trading Partners in 2014

Economy	DB Rank	Documents to export (number)	Time to export (days)	Cost to export (deflated USD per container)	Documents to import (number)	Time to imprt (days)	Cost to import (deflated USD per container)
Singapore	1	3	6	460	3	4	440
Korea, Rep.	5	3	8	670	3	7	695
United States	7	3	6	1190	5	5	1315
Australia	10	5	9	1200	7	8	1220
Germany	14	4	9	1015	4	7	1050
Malaysia	18	4	11	525	4	8	560
China	19	8	21	620	5	24	615
Thailand	26	5	14	595	5	13	760
Netherlands	27	4	7	915	4	6	975
Japan	29	3	11	915	5	11	1107

Source: Doing Business Report (2015)

Indonesian Export Performance

Reforms and development of trade facilitation is expected to enhance Indonesian competitiveness and generate more trade flows into and from the country. In fact, since the end of the oil boom in the mid 1980s Indonesia has modified its trade policy from *import substitution industrialisation* to become more *export-oriented*. This export-led growth strategy has been the driver of Indonesian economic movement, and as a result of trade reform and liberalisation taken in the 1980s, the

value of exports has grown until both export and import values decreased in 2009, they reached a new peak in 2011 (as evidenced in Figure 3). However, since 2012 Indonesia merchandise trade has experienced a trade deficit. This is mainly due to a trade deficit in the oil and gas sector as a consequence of the high demand for fuel subsidies. The price fall in Indonesia's major commodities in the international markets had lowered export values and imposed regulations banning export of unprocessed minerals in early 2014 (World Bank, 2015a).

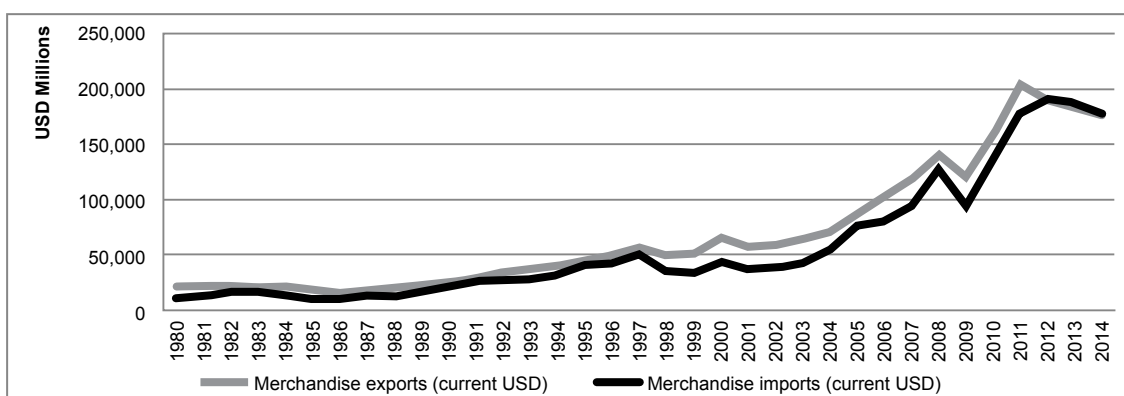


Figure 3. Indonesian Merchandise Export and Import Values (current USD), 1980 – 2014.

Source: World Bank (2015b)

In terms of export commodities, Indonesia's export merchandise is still dominated by fuels and mining products, followed by manufactured goods, and agricultural products with the proportion of total exports at 38.3%, 37%, and 23.3% respectively (World Trade Organization, 2014). Government regulations banning export of raw materials is aimed at increasing the value adding in Indonesian mine and mineral

commodities. By exporting the processed commodity, it is expected to stimulate higher performance of manufacturing export while the contribution of raw material export is limited. Therefore, it is essential to observe the impact of trade facilitation on manufacturing export performances, in order to prioritise reforms and development of Indonesian trade facilitation measures.

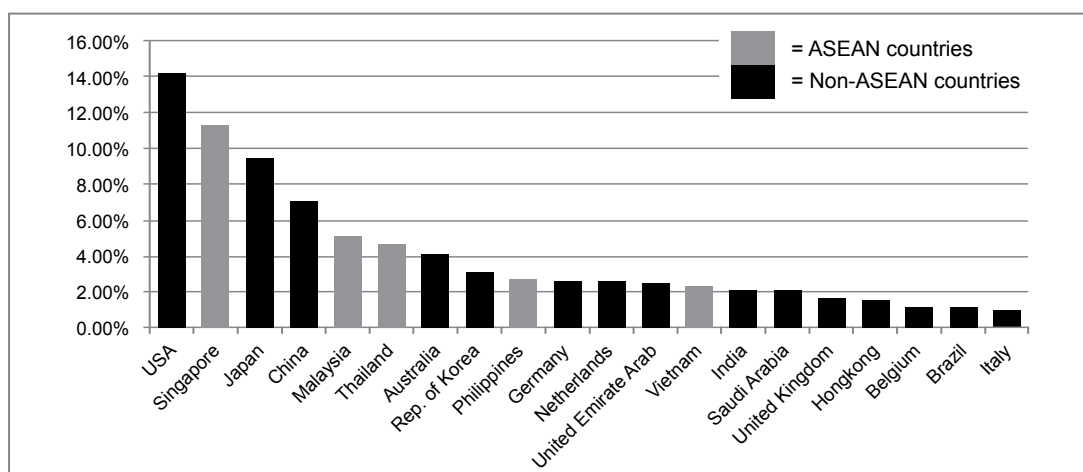


Figure 4. Share of Indonesia's Manufacturing Exports in 2014

Source: World Bank (2015b)

The percentage share of Indonesia's manufacturing export market is dominated by developed countries such as the USA, Singapore and Japan at 13.89%, 12%, and 11.33%, respectively. While markets in ASEAN countries are also considerably high, Figure 4 shows that in 2014 Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam were among the top 20 destination countries for Indonesian manufacturing exports. According to Leamer & Stern (1970), a country's export performance is influenced by factors such as geographical destination, world export demand, product composition

and a country's competitiveness. Unfortunately, the competitiveness of Indonesia's merchandise export is considered low, as the share of natural resource intensive goods and unskilled labour intensive goods are still dominated in the Indonesia export commodities (Rahmaddi R & Ichihashi M, 2012). The exported natural resource as raw material goods indicates that value added in the domestic remain low, according to Giovanni & Levchenko (2012) dependency on primary commodities of country's export could trigger volatility in the short run of GDP. Therefore, integrated efforts in enhancing

the competitiveness of the processed and manufacturing commodity should be taken as an action by the government to develop Indonesian export-oriented industries in the future.

The Coase Theory of Transaction Costs

There are no specific theories which explain trade facilitation. However, trade facilitation in practice is connected with economics through cost channels in trade and also correlated with institutional development. In fact, the high transaction cost in trade and inefficiency in the process of conducting trade could be potentially reduced through reforms and development of a country's trade facilitation. The literature on the importance of the institutional subcomponent for economic development refers to the theory of transaction costs which was formulated by Ronald Coase.

According to Coase (1992), the effects of high and costly transactions will without doubt hamper the economy. Entrepreneurs have to include transaction costs as a consideration in making decisions regarding their business and production plans. High costs in obtaining information and poorly protected property rights can make the agreements difficult to specify and implement. This may lead to high transaction costs. According to Shirley (2005), the institution is the key factor in determining whether transaction costs are high or low. Countries with interminably high transaction costs are likely to have fewer firms, less investment, less trade, less specialisation and lower

productivity. This view is also in line with Rodriguez-Pose's study (2013) stating that local institutions are crucial for economics development.

The institutional features of a country, such as red tape bureaucracy in port and customs clearance, and lack of supporting infrastructure, reflect a negative externality on private commerce. This could increase the transaction costs in trade in a substantial level and adversely affect industrial organisations which in turn has a negative effect on economic growth and trade (Iwanow & Kirkpatrick, 2009). This notion is supported by Deardorff (2001) who argues that the process of international trade is more significantly impacted by hidden transaction costs than by technological factors and endowments.

Dimension of the Trade Facilitation Measure, and the Commodity Classification

Studies of the impact of trade facilitation in general can be divided into two groups on how trade facilitation is measured. The first measure focuses on a specific dimension, whereas the second involves all aspects of trade facilitation into the model. There are several studies which analyse trade facilitation impact by a single aspect known as 'mono-dimensional models' – for example Hummels (2001) investigated the effect of time on trade, and Helble, Shepherd, & Wilson (2009) studied the gain from reforms in trade policy transparency. 'Multi-dimensional models' were initiated by Wilson, Mann and Otsuki (2003, 2005) and they included different

measures, such as efficiency of ports, the customs and regulatory environment and implementation of e-business, to examine its relationship with trade flows in the Asia-Pacific region. The objective of using several dimensions is to identify the area that needs to be prioritised by policy makers, rather than focusing on one specific dimension. Moreover, the selected measures are in accordance with GATT articles V, VI, VIII and X which underlie the trade facilitation agreement of WTO.

Both mono and multidimensional study can use aggregate or disaggregate data in the analysis to examine the impact of trade facilitation on the whole sector or in a specific sector of trade. For example, in examining the impact of trade facilitation by using a specific sector of trade, Martinez-Zarzoso and Marquez-Ramos (2008) used disaggregated trade data of the 4-digit level of the Standard International Trade Classification (SITC). The study used a narrow definition of trade facilitation by only including border related elements into the model. On the other hand, Wilson et al. (2003, 2005) used aggregate data through the analysis of one digit level of data in the manufacturing sector. This includes commodities in categories 5 to 8 except category 68 in the two digit level of the SITC. Besides using aggregate data, Shepherd & Wilson (2009) also used a different classification of commodity – the 1 digit product classification of the Broad Economic Categories (BEC).

An alternative commodity classification used internationally is the harmonized system (HS). These different classifications of commodity

are aimed to capture different features and criteria as there are different statistical and analytical needs. In terms of economic analysis, data taken from the SITC are more suitable due to their coverage which includes the production stage and its related factors. In contrast, the HS classification is based on the commodities' nature, while the BEC classification comprises three primary classes: capital goods, intermediate goods and final goods (Lal, 2012). Since the coverage includes the production stage, the use of the SITC commodity classification is for studying the impact of trade facilitation on Indonesia's export of manufactured goods.

Empirical Studies of Trade Facilitation

To date, studies on the impact of trade facilitation on the economy have focused on international trade flows, and also investigated how reforms in trade facilitation can affect trade flows. In addition to the analysis of the global effects of a wide range of countries' relationships, it is also possible to study the effects in both regionally and in a specific country which are still under research.

A study at the regional level was conducted by Shepherd & Wilson (2009) who analysed the advancement and indicators of trade facilitation in the ASEAN region using the gravity model of these following indicators: the quality of sea and air ports, irregular payments and the level of rivalry in Internet Service Providers (ISPs). They found that regional trade is sensitive to the quality of transport infrastructure and ISP. This is also supported by the counterfactual

simulation which showed that the benefits from trade facilitation reforms are greater than the benefits from reduction in tariffs. Following the approach taken by Wilson et al. (2005), the simulation was constructed using five different reform scenarios in order to provide a priority list of recommendations. A recent study by Felipe & Kumar (2012) analysed the relationship between trade facilitation and bilateral trade flows of the Central Asian countries using the gravity model. They found that infrastructure had the most significant contribution to higher trade flows followed by logistic costs and customs environment e.g. efficiency in time and costs of customs.

Another study conducted by Pomfret & Sourdin (2009) analysed trade facilitation using a different approach. It focused directly on trade cost issues by using data from the Cost Insurance Freight (CIF) and Free On Board (FOB) on Australian imports which indicates the international shipping costs between trading countries. By examining ASEAN country exports to Australia, the authors reported that trade costs had reduced significantly during the 1990s and 2000s from 10% of the average *ad valorem* costs in 1990 to less than 4% in 2007. This is related to the formation of the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) in the region that takes into account the liberalisation of trade by reducing tariffs and improving the trade facilitation environment. However, such an approach only captures the international transport costs and does not explain the broader range of trade costs which have

become the underlying focus of trade facilitation.

Dennis & Shepherd (2011) studied the effect of trade facilitation on export diversification in 118 developing countries taking into account the export costs and the market entry costs. The result shows that lowering export costs and market entry costs by 10% can stimulate export diversification by 3 to 4%. There are very few studies of trade facilitation in Indonesia. Damuri (2006) examined the efforts of Indonesian trade facilitation in relation to negotiations in the WTO. This study was done by matching the measures taken by the government with a reference to GATT articles through a survey involving the private sector. The author found that simplification and automation of documentation required in trade procedures are the most important measures to take in order to improve trade facilitation. In addition, illegal charges must be solved before they hamper competitiveness. A recent study by Tambunan (2013) focused on accessibility and usefulness of trade facilitation for export-oriented in small and medium-sized enterprises (SMEs). The author concluded that there were some main factors of low export performance especially for SMEs located in rural areas, such as a lack of information about export markets, available trade facilitation and financial support to increase production capacity. This result is in line with an earlier study of Tambunan (2007, 2011) which found that limited working capital and lack of promotion were the main constraints for Indonesian SMEs to export.

METHODOLOGIES

The main focus of this study is to measure the impact of trade facilitation in Indonesia as an exporter country and in relation to the conditions of trade facilitation in 30 main importing countries. This study uses the data from 2010 to 2014 due to the limitation of data availability.

In order to undertake quantitative analysis of trade facilitation measures and indicators of efforts, the data are divided into four distinct categories following Wilson et al. (2005, 2012): (i) port efficiency to measure the quality of port and air transport infrastructure, (ii) customs environment to measure the efficiency in time and costs of customs, (iii) regulatory environment to measure regulation development and government transparency and (iv) service sector infrastructure to measure the presence of

domestic infrastructure and technology in supporting economic activity.

Each of the trade facilitation indicators was constructed using two relevant surveys for constructing inputs and then it was averaged to obtain the value of each trade facilitation indicator. Because those surveys data are using a different ranges of response, recalculating the inputs index with benchmarking to the country with the highest performance as best practice will allowed those index into a comparable basis. The index ranges from 0 to 1 with the maximum value 1 referring to best-practice country, this indicated the level of performance of other countries. Table 3 depicts summary statistics of constructing indicators and aggregate indicators of trade facilitation, as well as importer country with the highest score compared to the lowest score.

Table 3. Summary of Statistics for Values of Trade Facilitation Indicators

Indeces/variables	Source	Mean	Std. Dev.	Min	Min. Importer	Max	Max. Importer
Port Efficiency		0.749	0.145	0.450	Brazil	0.993	Singapore
Quality of port infrastructure	GCR	0.730	0.149	0.393	Brazil	1	Netherland
Quality of air transport infrastructure	GCR	0.768	0.147	0.447	Bangladesh	1	Singapore
Customs Environment		0.432	0.181	0.175	Russia	1	Singapore
Number of days to import	DB	0.407	0.221	0.118	Bangladesh	1	Singapore
Cost to import	DB	0.456	0.207	0.151	Russia	1	Singapore
Regulatory Environment		0.659	0.162	0.433	Bangladesh	1	Singapore
Burden of government regulation	GCR	0.669	0.157	0.366	Brazil	1	Singapore
Corruption Perception Index	CPI	0.649	0.234	0.298	Bangladesh	1	Singapore
Service Sector Infrastructure		0.835	0.120	0.607	Egypt	0.999	United States
Availability of latest technologies	GCR	0.826	0.128	0.582	Egypt	1	United States
Firm-level technology absorption	GCR	0.842	0.110	0.632	Egypt	1	Japan

Sources: Global Competitiveness Report (2015), Doing Business Report (2015), Transparency International (2015), processed.

Gravity models have been used extensively as an approach to analyse bilateral trade flows. The classical conception of the gravity model was originally reported by Tinbergen (1962) and Pöyhönen (1963), who were inspired by Newton's law of universal gravitation, to explain the bilateral trade flow between trading partners. According to Leamer & Levinsohn (1995), modeling trade between two countries should include several variables, such as GDP and GDP per capita, as a proxy for a country's economic 'mass' to indicate market size. The economic distance between countries is also included to capture the effect of transportation costs. Other variables can also be added into the model in order to weigh the barriers in trade, for example trade policy factors, a common language and the historical and geographical connections between countries. Such a basic formulation has evolved as the objective of hypothesis testing. In this regard, tariff and trade facilitation indicators, as well as additional factors can be added into the model.

The general form of the gravity equation, as used in the study of Anderson & Wincoop (2003), can be written as follows:

$$X_{ij} = \frac{Y_i Y_j}{Y} (t_{i,j})^{1-\sigma} (\Pi_i P_j)^{\sigma-1}$$

Where X_{ij} is the variable of export value from exporter country i to importer country j , while the notation Y_i and Y_j are the GDP of country i and j divided by Y which denotes world GDP. The terms of trade costs are included with the notation of $t_{i,j}$, while Π_i and P_j denote the ease

of market access and/or multilateral resistance, while $\sigma > 1$ is the elasticity substitution of all goods.

In this study, the basic model was estimated by first transforming all variables into natural logarithms form so the estimate parameters β_1 to β_{15} indicate the magnitude of elasticity of manufacturing export to each independent variable. The model presented is as follows:

$$\begin{aligned} \ln(EXP_{jt}) = & a_0 + \beta_1 \ln(100 + TARIFF_{jt}) - \ln(100) \\ & + \beta_2 \ln(EXCR_{jt}) + \beta_3 \ln PE_{jt} + \beta_4 \ln RE_{jt} \\ & + \beta_5 \ln CE_{jt} + \beta_6 \ln SI_{jt} + \beta_7 \ln PE_t \\ & + \beta_8 \ln RE_t + \beta_9 \ln CE_t + \beta_{10} \ln SI_t \\ & + \beta_{11} \ln(GDP_{jt}) + \beta_{12} \ln(POP_{jt}) \\ & + \beta_{13} \ln(Dist_t) + \beta_{14} ASEAN \\ & + \beta_{15} EU + \varepsilon_{ijt} \end{aligned}$$

Where j stands for the 30 main importing countries of Indonesia, respectively and t denotes trading years ($t = 2010$ to 2014). Parameters β_1 to β_{15} are the coefficients of variables, while ε_{ijt} is the error term. The term EXP_{jt} represents export value of the manufacturing commodity from Indonesia to the importing country j in year t , measured at real USD at the 2005 year base. $TARIFF_{jt}$ denotes the weighted applied tariff rate in *ad valorem* terms from country j to Indonesian exports in year t , while $EXCR_{jt}$ represents the real exchange rate of Indonesia to country j currency in year t .

Trade facilitation measures are in the terms of PE_{jt} , RE_{jt} , CE_{jt} , and SI_{jt} which denote the importing country j 's indicators, while PE_t , RE_t , CE_t , and SI_t denote Indonesia as the exporting

country indicators of port efficiency, both the regulatory and customs environments and service sector infrastructure, respectively. For customs environment indicators, the difference between exporter and importer are in the constructing indicators, whereas the cost and time needed to import are used in the importing country j in year t . Also, cost and time needed to export are used in Indonesia as the exporting country in year t .

The term GDP_{jt} denotes Gross Domestic Product, while POP_{jt} denotes total population of the importing country j in year t . These variables are used as a proxy for importer market size in manufacturing commodities. Another variable is the geographical distance or bilateral distance, in this study the distance between capital cities of Indonesia to country j 's is used and denoted as $Dist_j$ as taken from the *Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales* (CEPII). The binary variables of the ASEAN and European Union (EU) preferential trade agreements are used to capture the effect of trade partnership between Indonesia and two major of regional partners.

The incorporation of trade facilitation indicators into the standard gravity model has been used in various studies. Wilson et al. (2003) analysed the empirical relationship between trade facilitation indicators and international trade flows among the APEC member countries in the period 1989 to 2000 by focusing

on four aggregate trade facilitation indicators in the importing country only, it was then regressed with other economic variables and distance. They found that port efficiency had the largest and positive impact on intra-APEC trade flows, while the other variables also positively contributed to trade flows but in smaller coefficient, except for the regulatory environment which was found to have a negative impact. This study was then extended by the authors in 2005 by adding trade facilitation variables of exporting countries, but excluding the customs environment variable. The results indicated that all trade facilitation indicators had a positive impact with higher trade flows. The difference in the resulting sign of regulatory environment variable is due to the differences of the approaches in constructing the trade facilitation measures that is used.

As this study aims to measure the impact of trade facilitation efforts in Indonesia as an exporter country, as well as the conditions in the 30 main importer countries on Indonesia's export performance. It is important that the subject of analysis has a large share of Indonesian merchandise export. For this reason, this study uses manufacturing commodity, the second largest share of Indonesian merchandise exports after the fuel and mining commodity, which is also prioritised by the government to improve performance.

The data was collected from secondary sources during 2010 to 2014 covering the 30 main importing

countries of Indonesia's manufacturing commodities. This study uses bilateral trade flow data of Indonesian exports taken from the United Nations statistics division of Commodity and Trade Data base (UNCOMTRADE). The defined categories of manufactured goods are from the Standard International Trade Classification (SITC Revision 4) with categories 5 to 8 at the one-digit level except category 68 (non-ferrous metal) at the two-digit level. The export value is then adjusted to real terms by using Indonesian data of the Producer Price Index (PPI) with the 2005 value as a base year taken from the *Bank Indonesia* data source.

Tariff data used in this study was taken from Trade Analysis and Information System (TRAINS) of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Import tariffs from the four commodity categories of manufacturing were used, specifically with the weighted average tariff rates in the periods 2010 to 2014 as applied by these 30 main importing countries. Data on Gross Domestic Product (GDP) were in constant 2005 US dollars, while data of total population were also for the period 2010 to 2014, and taken from the World Development Indicators (WDI) generated by the World Bank.

Another key variable used in this study is the exchange rate, with the nominal data taken from the United Nations Conference on Trade and Development statistic (UNCTADstat). The annual data of Indonesian Rupiahs

against importing countries currencies were also collected for the years 2010 to 2014. Afterwards it was deflated using Indonesia's consumer price index and each importing country's consumer price index with the 2005 value as the base year in order to obtain the real terms of exchange rates. This real term of all observed variables was used to address the inflation effect which may create bias in the interpretation of results.

RESULTS AND DISCUSSION

Estimated results of the gravity model are shown in Table 4. The model was run by using ordinary least square (OLS) and by employing the fixed effect (FEM), also random effect model (REM) with panel data regression to compare the differences. A statistical test was carried out using the Hausman test, followed by the Breusch and Pagan Lagrangian-multiplier (LM) and the Pasaran cross-sectional dependence test in order to select the best model to analyse the impact of trade facilitation on Indonesian export performances with its main trading partners.

According to Baltagi (2008), a difference estimation result between fixed effect and random effect models is yielded if the observed time (t) is relatively small while the observed individual (n) is large. A specification test using the Hausman test indicates the random effect model is appropriate to explain the outcome.

Table 4. Regression Result – OLS, FEM, and REM

Variables	OLS	Std. Err.	FEM	Std. Err.	REM	Std. Err.
Constant	9.573 ***	1.168	-26.423	18.080	8.011 ***	2.534
lnTARIFF	0.360	1.709	0.382	1.345	0.792	1.267
lnEXCR	-0.023	0.020	-0.232 *	0.129	-0.055	0.045
lnPE	-0.149	0.363	-0.031	0.450	0.004	0.406
lnCE	0.691 ***	0.146	0.269	0.252	0.544 ***	0.191
lnRE	0.116	0.365	-0.040	0.248	0.110	0.235
lnSI	1.469 ***	0.479	0.375	0.396	0.376	0.360
lnPEIndo	0.082	1.448	0.414	0.463	0.124	0.444
lnCEIndo	1.479	1.746	0.984 *	0.546	1.131 **	0.536
lnREIndo	-3.287	2.696	-2.619 **	0.855	-2.980 ***	0.838
lnSIIndo	0.505	3.511	-0.017	1.105	0.534	1.059
lnGDP	0.561 ***	0.070	1.066 ***	0.378	0.747 ***	0.115
lnPOP	-0.003	0.068	1.063	1.116	-0.151	0.113
lnDIST	-0.473 ***	0.104	0	(omitted)	-0.580 ***	0.226
DummyASEAN	1.024 ***	0.157	0	(omitted)	1.027 ***	0.381
DummyEU	-0.275 ***	0.105	0	(omitted)	-0.283	0.259
Number of obs.	150		150		150	
Adjusted R-squared	0.837					
R-squared – Within			0.415		0.377	
R-squared – Between			0.033		0.846	
R-squared – Overall			0.033		0.837	
Prob>chi2	0.000		0.000		0.000	

Note: The significance levels denoted by *, ** and *** indicate for $P < 0.1$, $P < 0.05$, and $P < 0.01$ respectively.

Source: Author's calculations

The Breusch and Pagan Lagrangian-multiplier (LM) test was conducted to examine whether the pooled regression model is more appropriate

than the random effect model, Table 5 indicates that the random effect model is more appropriate to explain the regression.

Table 5. Specification Rest of The Best Model

Specification test	<i>Hausman test</i>		<i>LM test</i>		<i>Pesaran CD test</i>	
	Statistic	Prob.	Statistic	Prob.	Statistic	Prob.
Chi-square	10.01	0.6153				
Chi-square			239.25	0.0000		
Cross sectional independence					-0.128	1.1020

Source: Author's calculations

According to Hoechle (2007) if cross-sectional dependence exists, it can lead to bias in the results. The Pesaran cross-sectional dependence (CD) test is used to test the serial correlation. The test result (Table 5) shows that there is no serial correlation in the model.

Estimation results from three different regression methods are reported in Table 4. Overall, the preferred model, which is the random effect model, indicates good performance. Its probability value shows that model significance is in a 5 percent alpha ($0.000 < 0.05$), while the R-squared statistic accounts for around 83% of observed variation between dependent and independent variables within the selected sample.

The estimated results of the gravity model regression presented in Table 4 indicate different levels of significance for the three types of estimations performed. The GDP variables for importers were found to be consistent across the three estimations with all being positive and significant at 1 percent in OLS, FEM and REM. Such a result explains that the growing size of a market's economy would generate higher Indonesian manufacturing export performance. The distance variable was found to be significant and had the expected negative signs in both OLS and REM. This means that distance adversely affects bilateral trade. Tariff and exchange rate variables were not statistically significant in the three regression estimations, except that exchange rate was negative and significant at 10 percent in the FEM. The constructed trade facilitation indicators also display considerable variation, but not all indicators were found to be

statistically significant. Specifically, the port efficiency variable was not significant in all three models of estimation, whereas the customs environment, regulatory environment and service sector infrastructure indicated a different level of significance for the three estimations performed.

As a result of the specification test, this study focuses on results from the REM as it is the best model to explain the data variation. The REM estimates that customs environment (CE) in both exporter and importer countries was positive and significantly associated with the Indonesian manufacturing export performance. It was significant at the standard 1% for the CE of the importer country and at 5% for Indonesia as the exporter country. Estimated coefficient magnitudes of the Indonesian customs environment were greater than the coefficient of importing countries by 1.13, while the importer CE coefficient was 0.54. This high and significant coefficients suggest that the customs environment plays an important role in Indonesian manufacturing export performance. However, the Indonesian regulatory environment has a negative and significant effect on manufacturing export performance with a relatively high coefficient of -2.98. This indicates an inverse effect in the tightening of corruption and transparency through government regulation. On the other hand, only the ASEAN binary variable was found to be statistically significant under both OLS and RE estimation, while the EU dummy variable was statistically insignificant.

Regarding statistically insignificant variables in this study, namely port efficiency and service sector infrastructure in both exporter and importer countries and the regulatory environment in importer countries, it can be concluded that there is not enough evidence that these trade facilitation indicators influence Indonesian manufacturing export performance with its main trading partners. Therefore, further study is recommended to use a different approach of trade facilitation measures and to conduct more observations in the analysis for gaining a better understanding in the impact of such variables on manufacturing export performance.

Based on the estimation results in Table 4, and the description above, two trade facilitation indicators which significantly affect the Indonesian manufacturing export performance are the customs and regulatory environments. The coefficient variable of the customs environment in the importer countries showed a positive association of 0.54. This suggests that each one percent of an improvement in the degree of importer customs environment which is closer to the best practice country's conditions will lead to an increase in Indonesian manufacturing export performance amounted to 0.54 percent, *ceteris paribus*. The improvement would be gained through reduction in time and costs to import goods in the importer country.

The impact of Indonesia's trade facilitation on export performance would affect two channels. Firstly, improving the Indonesian customs environment

will positively effect manufacturing export performance. With a coefficient of variable of 1.13, this mean for each one percent of improvement in the degree of Indonesian customs environment closer to the best practice country's conditions will lead to an increase in the Indonesian manufacturing export performance of 1.13 percent, *ceteris paribus*. The increased performance would be achieved by improving efforts to ease flows of export through customs which could reduce time and costs needed for traders to export from Indonesia.

Secondly, the coefficient variable of the Indonesian regulatory environment was -2.98, meaning that each one percent of an improvement in the degree of the Indonesian regulatory environment closer to the best practice country's conditions will lead to a decrease in the Indonesian manufacturing export performance of 2.98 percent, *ceteris paribus*. In other words, tightening regulation will lead to greater corruption in the public sector and negatively affect the Indonesian export performance. This result is in line with the findings of Wilson et al. (2003) showing that high and strict government regulations can reverse the positive effects of other measures. Further studies should be undertaken in this area using a different approach to construct regulatory environment measures in order to find out the association that exists.

CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATIONS

Trade facilitation has become a global concern in the last two decades as reforms and developments in this

area are considered to have a positive impact on greater trade flows. Indonesia has suffered a trade deficit since 2012 with a government policy on banning raw material exports which contributes to lower merchandise export performance. Manufacturing commodities constitute the second largest share of Indonesian merchandise exports, with the improved trade facilitation it is expected to generate the competitiveness of Indonesian processed minerals commodity which can lead to higher export performance. Hence, this study examined a series of regressions using gravity models with panel data to identify indicators that statistically and significantly affect exports in the period 2010 to 2014. The gravity model was applied to measure the impact of trade facilitation in Indonesia and its 30 main trading partners on the Indonesian manufacturing export performance.

Based on the analysis conducted, the customs environment in both Indonesia and its trading partners has a positive and significant impact on Indonesian manufacturing export performance. The constructing indicators of trade facilitation measures in this area are the time and cost in undertaking export for the exporter country, while the time and cost of import was observed as the importer country's indicators. Prioritising efforts to make the customs environment more efficient in time and costs will likely enhance the Indonesian manufacturing export performance. This provides an insight for the government to focus for reforms and development of trade facilitation measures.

The results of this study also indicate that Indonesia's regulatory environment is not optimal in facilitating trade and has an adverse impact on manufacturing export performance, where through the simplification of regulations and less corrupt behaviour in public sector is negatively associated with the export performance. A related aspect which needs to be considered by the policy makers is the openness of information and public transparency. Incomplete information of evolving regulations could hamper trade and create lag time for traders to adjust. However, further study is required to use different approaches to better understand such impact.

It is also suggested to use a different approach to study the impact of port efficiency and service sector of infrastructure on export performance, as these were not statistically significant in this study. On the other hand, the estimated results indicate that improving trade partnerships in the ASEAN region will be beneficial to increase the Indonesia's export performance. The upcoming regional agenda is to fully implement the ASEAN Economic Community by the end of 2015. It is expected to stimulate greater trade flows among the members, and Indonesia especially.

Although new insights into the impact of trade facilitation on export performance has been provided in this study, Indonesia should improve and develop all of trade facilitation measures in order to better engage with the global trade system and cope with evolving agreement and programs at both the

multilateral and regional levels. In conclusion, reforms and development in trade facilitation not only provide benefits for traders, but also for the economy and the society through more efficient and timely trade.

ACKNOWLEDGEMENT

The authors thank the Ministry of Trade Republic of Indonesia and Australia Awards Scholarship for the support and sponsorship on dual degree program between Bogor Agricultural University and the University of Adelaide.

REFERENCES

- Abe, K., & Wilson, J. S. (2009). *Weathering the storm: investing in port infrastructure to lower trade costs in East Asia*. The World Bank, Policy Research Working Paper Series: 4911.
- Anderson, J. E., & Wincoop, E. v. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. *The American Economic Review*, 93(1), 170-192. doi: 10.2307/3132167
- ASEAN. (2015). ASEAN Trade in Goods Agreement. from <http://www.asean.org/images/2013/economic/afta/atiga%20interactive%20rev4.pdf>
- Baltagi, B. (2008). *Econometric analysis of panel data* (Vol. 1): John Wiley & Sons.
- Bank Indonesia. (2015). Producer Price Index. http://www.bi.go.id/sdds/series/ppi/index_ppi.asp
- CEPII. (2015). Geographical Distance dataset. http://www.cepii.fr/cepil/en/bdd_modele/bdd.asp
- Coase, R. H. (1992). The Institutional Structure of Production. *The American Economic Review*, 82(4), 713-719. doi: 10.2307/2117340
- Damuri, Y. R. (2006). An evaluation of the need for selected trade facilitation measures in Indonesia: Implications for the WTO negotiations on trade facilitation. *Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series*(10).
- Deardorff, A. (2001). Local comparative advantage; trade costs and the pattern of trade, processed. *University of Michigan*.
- Dennis, A., & Shepherd, B. (2011). Trade Facilitation and Export Diversification. *World Economy*, 34(1), 101-122. doi:10.1111/j.1467-9701.2010.01303.x
- Di Giovanni, J., & Levchenko, A. A. (2012). Country size, international trade, and aggregate fluctuations in granular economies. *Journal of Political Economy*, 120(6), 1083-1132.
- Felipe, J., & Kumar, U. (2012). The Role of Trade Facilitation in Central Asia. *Eastern European Economics*, 50(4), 5-20.
- Helble, M., Shepherd, B., & Wilson, J. S. (2009). Transparency and Regional Integration in the Asia Pacific. *World Economy*, 32(3), 479-508. doi: 10.1111/j.1467-9701.2009.01170.x
- Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. *Stata Journal*, 7(3), 281.

- Hoekman, B., & Nicita, A. (2010). Assessing the Doha Round: Market Access, Transactions Costs and Aid for Trade Facilitation. *Journal of International Trade and Economic Development*, 19(1), 65-79. doi: <http://www.tandfonline.com/loi/rjte20>
- Hummels, D. (2001). Time as a trade barrier', Mimeo, Purdue University, July.
- Iwanow, T., & Kirkpatrick, C. (2009). Trade Facilitation and Manufactured Exports: Is Africa Different? *World Development*, 37(6), 1039-1050. doi: <http://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X>
- Lal, N. (2012). Commodity Classifications. Regional Workshop on International Merchandise Trade Statistic, New Caledonia: Secretariat of the Pacific Community.
- Leamer, E. E., & Levinsohn, J. (1995). International Trade Theory: The Evidence, Chapter 20 of G. Grossman and K. Rogoff (eds), *Handbook of International Economics* vol. III: Amsterdam: Elsevier.
- Leamer, E. E., & Stern, R. M. (1970). *Quantitative International Economics*. London: Aldine Transaction.
- Martinez-Zarzoso, I., & Marquez-Ramos, L. (2008). The Effect of Trade Facilitation on Sectoral Trade. *B.E. Journal of Economic Analysis and Policy: Topics in Economic Analysis and Policy*, 8(1). doi: <http://www.bepress.com/bejeap/topics/>
- Márquez-Ramos, L., Martínez-Zarzoso, I., and Suarez-Burguet. (2011). Trade Policy versus Trade Facilitation: An Application Using Good Old OLS. *Economics-The Open-Access, Open Assesment E-Journal* 38 : 1-33.
- Pomfret, R., & Sourdin, P. (2009). Have Asian trade agreements reduced trade costs? *Journal of Asian Economics*, 20(3), 255-268. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2009.02.007>
- Portugal-Perez, A., & Wilson, J. S. (2012). Export Performance and Trade Facilitation Reform: Hard and Soft Infrastructure. *World Development*, 40(7), 1295-1307. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.12.002>
- Pöyhönen, P. (1963). A Tentative Model for the Volume of Trade between Countries. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 90, 93-100. doi: 10.2307/40436776
- Rahmaddi, R., & Ichihashi, M. (2012). How do Export Structure and Competitiveness Evolve Since Trade Liberalization? An Overview and Assessment of Indonesian Manufacturing Export Performance. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 3(4), 272.
- Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development?. *Regional Studies*, 47(7), 1034-1047.
- Shepherd, B., & Wilson, J. S. (2009). Trade facilitation in ASEAN member countries: Measuring progress and assessing priorities. *Journal of Asian Economics*, 20(4), 367-383. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2009.03.001>
- Shirley, M. (2005). Institutions and Development. In C. Menard & M. Shirley

- (Eds.), *Handbook of New Institutional Economics* (pp. 611-638): Springer US.
- Tambunan, T. (2007). Entrepreneurship development: SMES in Indonesia. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 12(01), 95-118.
- Tahi Hamonangan Tambunan, T. (2011). Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 5(1), 68-82.
- Tambunan, T. T. (2013). Ongoing trade facilitation improvement: Its impact on export-oriented small and medium-sized enterprises in Indonesia: ARTNeT Working Paper Series.
- Tinbergen, J., & Economics, E. S. O. (1962). *Shaping the World Economy; Suggestions for an International Economic Policy*. Twentieth Century Fund, New York.
- Transparency International. (2015). Corruption Perceptions Index. <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>
- UNCOMTRADE. (2015). International trade statistic database. <http://comtrade.un.org.proxy.library.adelaide.edu.au/data/>
- UNCTADstat. (2015). United Nations Conference on Trade and Development Data Center. <http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html>
- Wilson, J. S., Mann, C. L., & Otsuki, T. (2003). Trade Facilitation and Economic Development: A New Approach to Quantifying the Impact. *World Bank Economic Review*, 17(3), 367-389. doi: <http://wber.oxfordjournals.org/content/by/year>
- Wilson, J. S., Mann, C. L., & Otsuki, T. (2005). Assessing the Benefits of Trade Facilitation: A Global Perspective. *World Economy*, 28(6), 841-871. doi: 10.1111/j.1467-9701.2005.00709.x
- World Bank. (2015a). Indonesia Economic Quartely Retrieved July 2015 <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/IEQ-JUL-2015-english.pdf>
- World Bank. (2015b). World Development Indicators. Retrieved 20 August 2015, from viewed 20 August 2015 <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>
- World Bank. (2015c). *Doing Business Report 2015*. Washington DC.
- World Economic Forum. (2015). *Global Competitiveness Report 2015*. Geneva.
- World Trade Organization. (2014). Trade Profiles 2014. Switzerland: The World Trade Organization.
- World Trade Organization. (2015). Trade Facilitation Agreement. from https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
- Zaki, C. (2008). *Does Trade Facilitation Matter in Bilateral Trade ?* Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2008.100 - ISSN : 1955-611X. Retrieved from <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00348924>

**DINAMIKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA DENGAN
ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI):
POTENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

***The Dynamic Economic Cooperation between Indonesia and
the Members of Organization of the Islamic Conference (OIC):
Prospect and Impacts towards the Indonesian Economy***

Agus Syarip Hidayat

Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Jl. Gatot Subroto Kav.10, Jakarta Selatan 12710
email: aa_gus@yahoo.com; agus067@lipi.go.id

Naskah diterima: 12/03/2015 Naskah direvisi: 23/07/2015 Disetujui diterbitkan: 11/01/2016

Abstrak

Sejak Organisasi Konferensi Islam (OKI) berdiri tahun 1969, kerjasama ekonomi antar anggotanya yang berjumlah 57 negara terbilang belum intensif. Salah satu indikasinya adalah rendahnya porsi *intra-trade* dan *intra-investment* OKI, serta pertumbuhan mereka yang juga relatif lambat. Penelitian ini membahas dinamika kerja sama ekonomi antara Indonesia dan anggota OKI serta prospek liberalisasi ekonomi OKI dan potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Model yang digunakan adalah *standard Global Trade Analysis Project (GTAP)*. Analisis menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi OKI berpotensi memberikan dampak sektoral yang beragam bagi Indonesia, khususnya terlihat pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, output industri dan perdagangan. Indonesia dan anggota OKI lainnya dapat memperoleh manfaat optimal ketika diterapkan *full liberalization*. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil peran untuk mendorong percepatan dan pendalaman liberalisasi perdagangan yang lebih komprehensif antar anggota OKI. Sebagai langkah awal, Indonesia perlu segera meratifikasi perjanjian *Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference (TPS-OIC)*.

Kata kunci: OKI, Liberalisasi Ekonomi, Dampak Bagi Perekonomian Indonesia

Abstract

Since the establishment of Organization of the Islamic Conference (OIC) in 1969, the level of economic cooperation among its 57 member-countries has been limited, indicated by the low portion of intra-trade and intra-investment among the OIC members and their relatively slow growth. This study discusses the dynamic economic cooperation between Indonesia and the OIC members. Further, it analyzes the prospect of OIC economic liberalization and its potential impacts on the Indonesian economy. It uses secondary data and employs the standard of General Trade Analysis Project (GTAP) model. It shows that the OIC economic liberalization potentially had varying sectoral impacts on Indonesian economy, which was particularly shown by macroeconomic variables (such as economic growth and inflation), industrial output, and trade. Furthermore, Indonesia and other OIC members would obtain optimum benefits when full liberalization is applied.

Keywords: OIC, Economic Liberalization, Impacts on Indonesia Economy

JEL Classification: F13, F14, F15, F17, F62

PENDAHULUAN

Dengan pemberlakuan *Agreement on Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference (TPS-OIC)* secara lengkap pada tahun 2012, maka kerjasama ekonomi antar negara OKI berpotensi semakin meningkat. Ada tiga komponen utama dalam kerjasama TPS, yaitu kerangka kerjasama (*The Framework Agreement*); *The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS)* dan aturan asal barang (*Rules of Origin / RoO*). Kerangka kerjasama TPS-OIC mulai diberlakukan tahun 2002. Sementara PRETAS diimplementasikan pada Februari 2010. Selanjutnya perjanjian aturan asal barang telah disepakati untuk dimulai pada Agustus 2012.

Pendalaman kerangka kerjasama dalam bingkai TPS-OIC diharapkan menjadi titik balik untuk membangun kerjasama ekonomi yang semakin mendalam antar anggota OKI. Hal ini sangat penting mengingat sejauh ini kerjasama ekonomi, sosial dan keamanan dalam bingkai OKI masih terbelang tradisional dan tertinggal dibandingkan blok kerjasama ekonomi lain (Hossain, 2012). Hal ini salah satunya bisa dilihat dari porsi *intra trade* OKI yang rendah dengan pertumbuhan yang lambat. Pergerakan investasi antar negara OKI pun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hassan (2002) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya *intra trade* dalam OKI yaitu rendahnya perdagangan yang terkait dengan jasa, minimnya informasi perdagangan antar anggota OKI, hambatan tarif serta non-tarif yang tinggi.

Kerjasama ekonomi antar anggota OKI yang masih rendah ini diperparah oleh sistem perekonomian beberapa negara OKI yang masih diklasifikasikan sebagai perekonomian tertutup. Dengan menggunakan perhitungan rasio ekspor-impor terhadap GDP, Karam (2014) mengelompokkan anggota OKI ke dalam tiga kelompok yaitu *the most open economy* (terdiri dari Emirate Arab, Tajikistan, Guyana, Malaysia dan Bahrain), *closed economy* (Sudan, Niger, Pakistan, Bangladesh dan Djibouti) dan sisanya dikategorikan sebagai *the open economy*. Menurut data WTO (2013), sampai dengan September 2013 hanya 38 anggota OKI yang sudah bergabung menjadi anggota WTO, sementara sisanya sebagai *observers*.

Secara ekonomi, tingkat pembangunan diantara anggota OKI masih sangat beragam. Dengan indikator pendapatan perkapita, sebagian anggota OKI masuk dalam kategori negara maju (*developed countries*) dan berkembang (*developing countries*). Sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap negara tertinggal/miskin (*least developed countries*). Estes dan Tiliouini (2014) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi di 27 negara Afrika yang menjadi anggota OKI. Sementara 23 negara anggota OKI di Asia juga masih menghadapi masalah kemiskinan walaupun tidak separah seperti yang terjadi di Afrika. Dalam kancah global, berdasarkan data IMF (2013a) diketahui bahwa pada tahun 2012 kontribusi anggota OKI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan *Purchasing*

Power Parity (PPP) dunia hanya sekitar 10,7%. Pendapatan perkapita anggota OKI beragam mulai dari USD 869 PPP - USD 102.768 PPP.

OKI sebenarnya mempunyai potensi untuk berperan dan lebih diperhitungkan dalam percaturan global. Kliman dan Fontaine (2012) menyebut dua negara anggota OKI yaitu Indonesia dan Turki (bersama dengan Brazil dan India) sebagai “*The Global Swing States*” yang diprediksi akan mempengaruhi tatanan ekonomi global saat ini dan di masa mendatang. Keempat negara tersebut akan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan dan arah dari pergerakan perdagangan dan investasi internasional. Sebelumnya pada tahun 2011, Asian Development Bank (ADB). (2011) memperkirakan bahwa dua dari tujuh negara yang akan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Asia pada tahun 2050 adalah Indonesia dan Malaysia, yang *notabene* keduanya adalah anggota OKI.

Mencermati latar belakang ini, maka penelitian ini mengulas dinamika kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara OKI. Pembahasan diawali dengan uraian tentang dinamika kerjasama investasi dan perdagangan. Selanjutnya analisis diarahkan untuk melihat sejauh mana dinamika kerjasama investasi dan perdagangan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Bagian akhir mengulas tentang simulasi liberalisasi ekonomi dalam OKI dan potensi pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

METODE

Simulasi potensi dampak ekonomi dari liberalisasi perdagangan negara-negara OKI dianalisis dengan *Computable General Equilibrium (CGE) model*. Model spesifik yang akan digunakan adalah model standar *Global Trade Analysis Project (GTAP)*. Simulasi hanya fokus pada liberalisasi perdagangan barang dan jasa dengan tarif sebagai *shock variabel*. Dalam model CGE GTAP standar yang dikembangkan oleh Hertel & Tsigas (1997) terdapat 98 persamaan matematik yang secara garis besar dikelompokkan ke dalam enam blok meliputi: (1) *Accounting relationship*; (2) *Price linkage*; (3) *Producer behavior*; (4) *Household behavior*; (5) *Global banking/ investment* dan (6) *Global transportation*.

Simulasi liberalisasi perdagangan antar negara-negara OKI menggunakan dua skenario, yaitu *partial liberalization* dan *full liberalization*. Asumsi kedua simulasi ini sama yaitu (a) pasar dalam kondisi persaingan sempurna dalam faktor produksi dan produk yang diperdagangkan; (b) fungsi produksi bersifat *constant return to scale*. Pada skenario pertama (*partial liberalization*), diasumsikan bahwa terjadi penurunan tariff impor sebesar 50% dari *ad valorem tariff* yang berlaku di negara-negara OKI. Penurunan tarif ini hanya berlaku bagi sesama anggota OKI. Adapun negara lainnya diasumsikan tidak mengalami perubahan tarif. Adapun pada skenario kedua (*full liberalization*), simulasi dilakukan dengan penghapusan tarif sebesar 100%.

Analisis GTAP menggunakan GTAP database 8 dengan referensi data tahun 2007 dan disimulasikan dengan RunGTAP software versi 3.61. Agregasi ekonomi/negara dibagi menjadi 4 kelompok yaitu: Indonesia, D8¹ minus Indonesia (Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Mesir, Turki dan Nigeria),

negara-negara OKI minus D8, dan kelompok negara lainnya (*rest of the world*). Simulasi ini memasukkan semua sektor (57 sektor) sebagaimana tertuang dalam database GTAP dalam skema liberalisasi. Sektor-sektor tersebut diagregasi menjadi 11 sektor sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan Negara dan Sektor Dalam Analisis GTAP

Pengelompokan Negara	Pengelompokan Sektor
Indonesia	1. Biji-bijian dan tanaman padi, gandum, sereal, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak dari biji-bijian, gula tebu, gula bit, serat nabati, beras olahan.
D8- Indonesia (Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Iran, Nigeria, Turki)	2. Daging ternak dan produk daging sapi, domba, kambing, kuda, produk hewan, susu mentah, Wol, sutera.
OKI – D8	3. Hasil hutan, Ikan dan Perikanan.
Rest of the World	4. Makanan olahan, minyak nabati, lemak, produk susu, gula, produk makanan dan minuman dan produk tembakau.
	5. Tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi.
	6. Light manufacturing products, kulit, produk kayu, produk kertas, penerbitan, produk logam, kendaraan bermotor dan suku cadang dan peralatan transportasi.
	7. <i>Heavy manufacturing product</i> , bahan kimia, karet, produk plastik, logam besi, logam baja, peralatan elektronik, mesin dan perlengkapannya.
	8. Utilitas dan konstruksi listrik, gas manufaktur, distribusi, air, Konstruksi.
	9. Transportasi dan komunikasi, perdagangan; transportasi laut, transportasi udara.
	10. Jasa-Jasa Lain, jasa keuangan, asuransi, jasa bisnis, rekreasi dan jasa lainnya; Pertahanan / Kesehatan / Pendidikan.
	11. Minyak, gas, batubara, Mineral, produk batubara dan produk Mineral.

Sumber: Narayanan et al (2012), diolah

Hasil simulasi 2 skenario tersebut akan dibagi menjadi empat bagian yaitu 1) potensi dampak liberalisasi terhadap kondisi makroekonomi; 2) ekspor-impor dan neraca perdagangan; 3) output industri; dan 4) serapan tenaga kerja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden pelaku usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari GTAP database dan data

1. D8 adalah kelompok kerjasama pembangunan 8 negara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Mesir, Turki dan Nigeria. Tujuan kerjasama ekonomi D-8 adalah untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, diversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.

dari berbagai terbitan instansi seperti data ekspor-impor dari Kementerian Perdagangan, serta beragam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kerjasama Perdagangan antara Indonesia Dengan Anggota OKI

Arsitektur Sistem Perdagangan Antar Anggota OKI

Mengacu pada *The Third Extraordinary Islamic Summit* tahun 2005 yang diadakan di Makkah, OKI menargetkan *intratrade* antar anggotanya bisa mencapai 20% pada tahun 2015. Framework kerjasama perdagangan yang diandalkan oleh OKI untuk mencapai target tersebut adalah *Agreement on Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conferences (TPS-OIC)*. Ada tiga komponen utama dalam kerjasama TPS-OIC, yaitu *The Framework Agreement*; *The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS)*; *The Rules of Origin*.

The Framework Agreement yang mulai diberlakukan tahun 2002 berisi tentang peraturan-peraturan umum dan prinsip-prinsip untuk negosiasi dalam pembentukan TPS. Di antara fitur utama dari perjanjian perdagangan adalah prinsip *Most Favored Nation (MFN)*, perlakuan yang sama bagi negara-negara anggota, perlakuan khusus bagi anggota yang masih berstatus *Least Developed Countries*. TPS OIC ini mencakup semua kelompok komoditas, termasuk produk pertanian. Perjanjian

ini juga menekankan pentingnya pengurangan hambatan perdagangan dalam bentuk hambatan dan non-tarif.

The Framework Agreement selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam *Preferential Tariff Scheme (PRETAS)* yang di dalamnya dinyatakan secara konkret kesepakatan pengurangan tarif beserta kerangka waktu (*time-table*) untuk implementasinya. PRETAS mulai diberlakukan pada Februari 2010. Sementara pemberlakuan *The Rule of Origin* dimulai pada Agustus 2012.

Komisi Tetap Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan OKI, COMCEC, telah merumuskan sebuah *road map* sebagai panduan untuk mencapai target 20% *intra-trade* antar anggota OKI. Ada lima aspek yang menjadi fokus *road map* tersebut yaitu pembiayaan perdagangan (*trade finance*), promosi perdagangan (*trade promotion*), fasilitas perdagangan (*trade facilitation*), pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan pengembangan komoditas-komoditas strategis (*development of strategic commodities*).

Salah satu tantangan berat OKI dalam mencapai target 20% *intra trade* tersebut adalah belum semua negara anggota OKI meratifikasi TPS-OIC. Per September 2012, tercatat hanya 27 anggota OKI yang sudah meratifikasi *Framework Agreement*, 14 negara meratifikasi PRETAS dan baru 12 negara meratifikasi *Rule of Origin*. Indonesia termasuk negara yang belum meratifikasi TPS-OIC tersebut. Masih banyaknya anggota OKI yang belum bersedia meratifikasi TPS-OIC sangat jelas menunjukkan bahwa sebagian

besar anggota OKI belum berminat untuk mengintegrasikan perekonomiannya dengan anggota OKI lainnya.

Sejauh ini, negara-negara yang sudah meratifikasi *Framework Agreement* cukup memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan *intra trade* dalam OKI. Menurut catatan *The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation (COMCEC) coordination office*, sejak *Makkah summit* tersebut, *intra trade* anggota OKI mengalami peningkatan hingga mencapai 17,7% pada tahun 2011.

Dinamika Perdagangan Indonesia dengan Anggota OKI

Anggota OKI merupakan bagian penting dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia-OKI menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam 10 tahun terakhir. Perdagangan luar negeri Indonesia-OKI dalam periode 2003-2012 mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perdagangan Indonesia secara total.

Pada periode tersebut, pertumbuhan perdagangan Indonesia-OKI mencapai 400%. Sementara pertumbuhan perdagangan Indonesia secara total pada periode yang sama sekitar 308%. Pada tahun 2012, nilai perdagangan Indonesia-OKI untuk komoditi migas dan non-migas telah mencapai USD 52,4 miliar atau setara dengan 13,7% total perdagangan Indonesia.

Menurut catatan *United Nations Commodity Trade Statistics Database*, pada tahun 2012 Indonesia melakukan ekspor ke 48 dari 57 negara anggota OKI. Dari jumlah tersebut, 10 besar negara OKI yang menjadi negara tujuan ekspor utama Indonesia meliputi Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Bangladesh, Mesir, Iran, Nigeria dan Djibouti. Sementara di sisi impor, tercatat Indonesia mengimpor dari 46 negara anggota OKI. Adapun 10 besar anggota OKI yang menjadi mitra impor Indonesia meliputi Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Azerbaijan, Iran, Brunei Darussalam dan Jordan.

Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara OKI, 2010-2012

Tahun	2010	2011	2012
Neraca Perdagangan (USD Juta)	619,9	-3.900	-7.200

Sumber: United Nations Comtrade Data Base, 2013

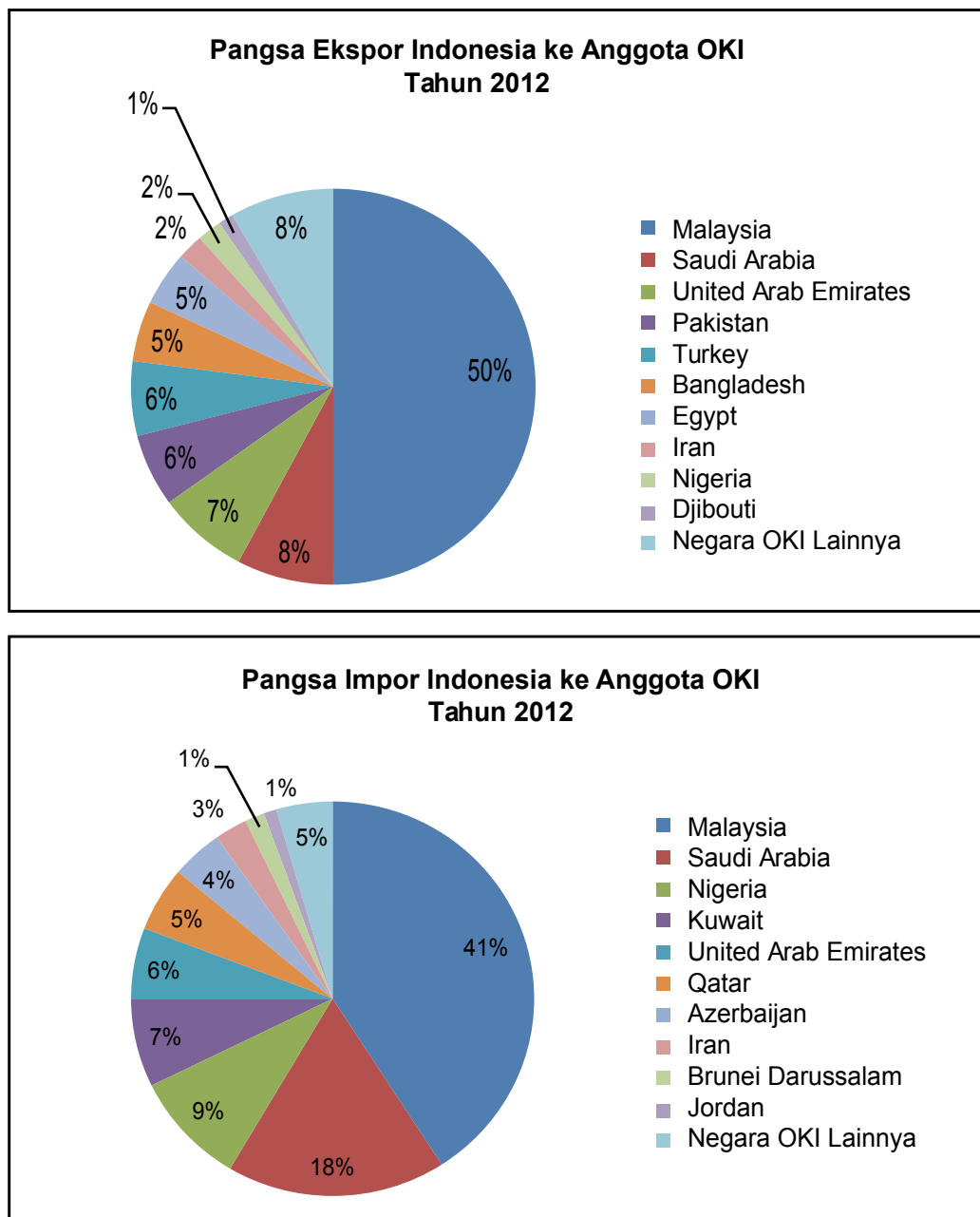
Perdagangan Indonesia-OKI dalam 10 tahun terakhir telah mengalami pergeseran baik secara struktur ekspor-impor maupun secara komoditas utamanya. Pada tahun 2010, Indonesia

mampu membukukan surplus perdagangan dengan OKI sebesar USD 619,9 juta (tabel 2).

Namun sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit

perdagangan berkelanjutan dengan OKI. Pada tahun 2011, defisit perdagangan Indonesia dengan OKI tercatat sebesar USD 3,9 miliar (tabel 2). Nilai defisit perdagangan ini terus melonjak hingga mencapai USD 7,2 miliar pada tahun 2012. Salah satu pemicu

defisit perdagangan Indonesia dari anggota OKI adalah impor minyak yang cenderung terus meningkat. Sementara pada saat yang sama, Indonesia tidak mampu menggenjot pertumbuhan ekspor non migas untuk mengimbangi lonjakan tinggi impor minyak.



Gambar 1. Pangsa Ekspor dan Impor Indonesia Ke dan Dari Anggota OKI Tahun 2012

Sumber: United Nations Comtrade Data Base (2013), diolah

Dari sisi perdagangan non-migas, dinamika kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara OKI dalam dua tahun terakhir ini berjalan relatif konstan. Secara statistik tidak ada perubahan signifikan dalam perdagangan antara kedua pihak. Pada tahun 2012, nilai perdagangan non-migas Indonesia dengan 11 anggota OKI yang menjadi mitra utama tercatat sebesar USD 28,1 miliar atau sekitar 9,3% dari total perdagangan non-migas Indonesia. Nilai perdagangan non-migas Indonesia-OKI pada tahun 2012 hanya tumbuh tipis 0,1% dari perdagangan tahun 2011.

Pertumbuhan perdagangan non-migas Indonesia-OKI pada tahun 2012 menjadi yang terendah paska terjadinya puncak krisis keuangan global pada tahun 2009. Pada tahun 2009, perdagangan non-migas Indonesia-OKI mengalami pertumbuhan negatif sebesar -17,1%. Kontraksi perdagangan non-migas Indonesia-OKI yang terjadi pada tahun 2009 ini jauh lebih besar dari perlambatan perdagangan Indonesia dengan seluruh mitra dagang yang tercatat sebesar -15,1%. Kondisi ini tidak berlangsung lama, pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan perdagangan mencapai 34,8% dan 27%. Lonjakan perdagangan yang cukup fantastis dengan OKI ini meredup tahun 2012 yang ditandai dengan anjloknya pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke anggota OKI sebesar -5,5%.

Ada beberapa faktor yang diduga kuat menjadi penyebab dari melambatnya pertumbuhan perdagangan Indonesia - OKI diantaranya: *Pertama*, perlambatan pertumbuhan ekonomi di sebagian negara OKI yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Laporan IMF (2013b) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2012 di kelompok *Group Cooperation Council (GCC)*² tercatat sebesar 6%. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata kelompok ini sejak tahun 2000 sampai 2011 (kecuali tahun 2009) selalu berada di atas angka 6%. Perlambatan ekonomi kelompok GCC yang merupakan pengeskor minyak terbesar ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam kelompok ini telah menurunkan permintaan produk impor asal Indonesia

Kedua terkait dengan fenomena *Arab Spring*³ yang melanda beberapa negara OKI di kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, Bahrain, Suriah, Iraq, Yordania, Kuwait, Maroko dan Sudan. Masalah ekonomi dan politik dalam negeri di beberapa negara OKI ini telah berdampak pada menurunnya daya beli masyarakatnya sehingga mengurangi permintaan produk-produk impor termasuk dari Indonesia.

Faktor lainnya terkait dengan penurunan harga komoditas ekspor secara umum. Menurut catatan Kementerian Perdagangan, secara

2. GCC beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan the United Arab Emirates.

3. Arab Spring adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan revolusi, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah, kerusuhan, pemberontakan, perang saudara di kawasan Arab yang terjadi sejak tahun 2010.

umum beberapa komoditas ekspor Indonesia yang mengalami penurunan harga di pasar global pada tahun 2012 diantaranya adalah bahan bakar mineral (harga turun 3,8%), lemak dan minyak hewan/nabati (harga turun 1,7%), barang dari karet (harga turun 27%), bijih kerak dan abu logam (harga turun 30,8%), bahan kimia organik (harga turun 26,2%).

Perlambatan pertumbuhan perdagangan Indonesia – OKI diharapkan tidak akan berlangsung lama. Indonesia sendiri mempunyai potensi untuk memperbaiki kinerja perdagangannya baik di pasar negara-negara OKI maupun pasar global secara umum. Menurut penilaian World Economic Forum (WEF) (2013), dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mampu memperbaiki posisi daya saingnya secara umum. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh membaiknya peringkat *Global Competitiveness Index (GCI)* Indonesia. Pada tahun 2013 posisi GCI Indonesia berada di urutan 38, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya berada di posisi 50.

Pendalaman perdagangan dengan OKI juga diharapkan bisa terjadi dengan dorongan D8 yang diharapkan akan menjadi *main drivers* dalam liberalisasi perdagangan OKI. Kelompok D8 terdiri dari 8 negara OKI yaitu Malaysia, Iran, Turkey, Indonesia, Egypt, Bangladesh, Pakistan, and Nigeria. Sebagaimana dikemukakan oleh Jafari *et al* (2011) bahwa dalam beberapa tahun ini hubungan ekonomi antar negara D8 telah menunjukkan perluasan dan penguatan. Kelompok D8 tidak hanya aktif mendorong proses liberalisasi dalam OKI, namun juga aktif berpartisipasi dalam proses liberalisasi global.

Dinamika Kerjasama Investasi antara Indonesia dengan Anggota OKI

Payung hukum perjanjian kerjasama investasi antar anggota OKI dituangkan dalam *The Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments among the OIC Member States*. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Februari 1988 dan hingga saat ini sudah ditandatangani oleh 31 negara dan baru diratifikasi oleh 25 anggota OKI. Indonesia termasuk salah satu anggota yang sudah meratifikasi perjanjian ini.

Perjanjian investasi OKI ini meliputi prinsip-prinsip dasar investasi, pemberian fasilitas dan insentif, perlakuan kesetaraan serta perlindungan investasi anggota OKI dari berbagai resiko komersial. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan investasi ini harus mengizinkan transfer modal diantara mereka dan menggunakannya dalam bidang-bidang yang diizinkan untuk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini secara khusus juga menyatakan perlunya jaminan dari negara tujuan investasi untuk memberikan kebebasan dalam melepaskan kepemilikan modal/ saham melalui penjualan sebagian atau seluruhnya, likuidasi, cessi, hibah atau cara lainnya.

Dalam konteks perekonomian Indonesia, perjanjian kerjasama investasi OKI ini belum menjadi daya tarik dan daya dorong bagi perkembangan investasi anggota OKI di Indonesia. Investasi anggota OKI di Indonesia terbilang masih relatif kecil dibandingkan dengan investasi dari kelompok negara

lain. Pada tahun 2010, jumlah investasi dari anggota OKI tercatat sekitar USD 603 juta (tabel 3) atau hanya 3,7% dari total PMA yang mengalir ke Indonesia. Investasi dari negara-negara OKI sempat meningkat pada tahun 2011, namun satu tahun kemudian kembali mengalami perlambatan hingga

porsinya hanya sekitar 2,4% dari total PMA yang masuk ke Indonesia pada tahun 2012. Pada periode 2010-2012, secara agregat berdasarkan negara asalnya, ada 5 investor OKI terbesar di Indonesia yaitu Malaysia, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki dan Mauritania.

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Dari Negara-Negara OKI, 2010-2012 (Juta USD)

Negara	2010		2011		2012	
	P	I	P	I	P	I
Afghanistan	-	-	-	-	1	0.6
Arab Saudi	2	-	5	0.1	2	-
Brunei Darussalam	2	0.0	5	11.8	3	0.0
Iraq	-	-	1	-	1	0.4
Iran	1	0.0	3	0.5	3	1.5
Lebanon	-	-	4	0.1	1	0.0
Malaysia	198	472.1	275	618.3	237	529.6
Mali	2	0.6	4	0.2	-	-
Maroko	1	-	3	0.0	2	0.0
Mauritania	4	117.4	2	48.0	1	-
Mesir	-	-	2	0.1	3	0.7
Oman	1	0.1	1	0.1		
Pakistan	5	1.0	2	0.4	4	0.2
Qatar	1	-	2	0.0	1	-
Sudan	1	0.2	1	0.0	-	-
Turki	3	5.2	6	10.9	13	7.3
Ukraina	-	-	-	-	1	0.0
Uni Emirat Arab (UEA)	6	6.2	6	6.8	12	32.4
Yaman	-	-			1	0.1
Yordania	-	-	1	1.1	1	19.9
Jumlah Investasi Negara-Negara OKI	227	603	323	698	287	592
Jumlah Investasi Total di Indonesia	3,076	16,215	4,342	19,475	4,579	24,565
Porsi Investasi OKI Terhadap Total Investasi (%)	7.4	3.7	7.4	3.6	6.3	2.4

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2013)

Keterangan :

– P: Jumlah Proyek, I: Nilai Investasi Dalam Juta USD

– Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi Yang Perizinannya Dikeluarkan Oleh Instansi Teknis/Sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) Dan Investasi Rumah Tangga / *Excluding Of Oil & Gas, Banking, Non Bank Financial Institution, Insurance, Leasing, Investment Which Licenses Issued By Technical/Sectoral Agency, Porto Folio As Well As Household Investment.*

Berdasarkan sektor, investasi Malaysia di Indonesia terkonsentrasi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perbankan dan telekomunikasi. Sementara investasi UEA di Indonesia diantaranya berupa proyek USD 1,5 miliar *oil rig* di lepas pantai Pulau Batam, proyek real estate USD 1,7 miliar di Epicentrum Jakarta, serta proyek logistik infrastruktur dengan RAK minerals di Sumatera. Investasi di sektor pariwisata adalah berupa pembangunan hotel dan area wisata di Lombok senilai USD 2 miliar (UEA Embassy in Indonesia, 2013).

Rendahnya minat investor dari OKI untuk menanamkan modalnya di Indonesia setidaknya mengindikasikan beberapa hal berikut ini. *Pertama*, para investor OKI memandang Indonesia kurang prospektif untuk bisnis mereka. Pandangan ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah minimnya informasi tentang Indonesia. *Kedua*, Indonesia belum mampu mewarnai kerjasama ekonomi dalam bingkai OKI. *Ketiga*, secara umum iklim investasi di Indonesia masih dianggap belum *business friendly*. Hal ini bisa dilihat dari survei World Bank (2013) tentang *doing business* 2013 yang menempatkan Indonesia pada posisi 128 dari 184 negara. Hal ini jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara Islam lainnya seperti, Malaysia (posisi 12), Turki (posisi 71) dan Pakistan (posisi 107).

Di sisi lain, investor Indonesia juga belum banyak yang memanfaatkan peluang investasi di negara-negara OKI. Selama ini hanya tercatat beberapa pengusaha dan BUMN saja yang

berinvestasi di negara-negara OKI. Menurut catatan kedutaan besar UEA, beberapa investasi dari Indonesia di UEA berupa proyek konstruksi di Abu Dhabi oleh PT. Abu Dhabi Berkah Abdi Mulya, dan pembangunan gedung perkantoran senilai USD 900 juta oleh PT. Waskita Karya dan BUMN RI di Abu Dhabi.

PMA yang berasal dari anggota OKI telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Kontribusi PMA dari OKI secara langsung bisa dilihat melalui serapan tenaga kerja, pendalaman struktur dan kerjasama antar industri serta nilai tambah dalam GDP. Mengingat data kuantitatif tentang kontribusi PMA ini tidak tersedia secara memadai, maka untuk menghitungnya digunakan beberapa proksi untuk mengukurnya. Dalam hal ketenagakerjaan, PMA dari negara OKI pada periode 2010-2012 yang berjumlah USD 1,89 miliar (setara dengan Rp.18,93 triliun pada kurs USD 1 = Rp 10,000) diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 33.152 orang. Perkiraan angka ini mengacu pada hasil studi Soekarni et al (2010) yang menyebutkan bahwa rata-rata rasio nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di PMA sekitar Rp 571 (artinya setiap Rp 571 juta investasi PMA menyerap tenaga kerja 1 orang).

Potensi Pengaruh Liberalisasi OKI Terhadap Perekonomian Indonesia

Liberalisasi perdagangan OKI berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui berbagai mekanisme transmisi. Pengaruh dari liberalisasi perdagangan OKI terhadap perekonomian Indonesia

secara garis besar bisa terjadi melalui mekanisme transmisi berikut ini: (i) dalam tahap pertama, efek perjanjian liberalisasi perdagangan OKI terhadap Indonesia akan terjadi melalui serangkaian perubahan regulasi dalam bidang perdagangan (kegiatan ekspor-impor) yang kemudian diikuti dengan perubahan regulasi kegiatan investasi; (ii) dalam tahap kedua, efek implementasi liberalisasi perdagangan OKI akan mulai masuk ke dalam aktivitas perdagangan, investasi,

industri, penyerapan tenaga kerja serta kondisi makroekonomi lainnya; (iii) dalam tahap ketiga, perubahan-perubahan dalam regulasi dan aktivitas perdagangan, investasi, industri, tenaga kerja serta kondisi makro ekonomi akan berpengaruh pada regulasi dan aktivitas perekonomian lainnya yang mempunyai keterkaitan erat dengan kegiatan perdagangan, investasi, industri dan migrasi tenaga kerja seperti aktivitas di sektor keuangan, sektor pendidikan dan sektor lainnya.

Tabel 4. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI terhadap Kondisi Makroekonomi Indonesia dan OKI

Indikator Makroekonomi	Skenario 1 Partial Liberalization			Skenario 2 Full Liberalization		
	Indonesia	D8	OKI minus D8	Indonesia	D8	OKI minus D8
Kesejahteraan (Miliar USD)	-77,0	-301,80	-251,89	11,00	93,23	53,64
Perubahan Pertumbuhan ekonomi (% perubahan dalam GDP Quantity Index)	-0,17	-0,18	-0,17	0,03	0,06	0,04
Inflasi (% perubahan dalam GDP Price Index)	-0,22	-0,24	-0,26	-0,29	-0,29	-0,4
Perubahan Neraca Perdagangan (Ekspor – Impor) (Miliar USD)	-42,13	-195,32	-269,85	-36,14	-227,68	-298,04
Terms of trade (% change)	-12,35	-11,75	-3,25	-0,19	-0,18	-0,08

Sumber: Analisis GTAP (2013)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa Indonesia dan anggota OKI lainnya berpotensi memperoleh manfaat lebih besar dan mengalami resiko lebih kecil ketika diterapkan *full liberalization scenario* (tabel 4). Pada skenario ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendapatkan tambahan manfaat peningkatan sebesar 0,03% (tabel 4).

Bagi negara dalam kelompok D8 dan anggota OKI lainnya, *full liberalization scenario* diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 0,06% dan 0,04%. Hasil ini memperkuat studi yang dilakukan Ghani (2011)⁴ yang menjelaskan bahwa liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh anggota OKI telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan GDP dan GDP per kapita di negara-negara tersebut dalam jangka menengah. Abidin, Irwan Shah Zainal et. al (2014), misalnya, dengan menggunakan gravity model, menjelaskan bahwa kerjasama bilateral Malaysia dan OKI serta liberalisasi perdagangan OKI berpotensi meningkatkan pendapatan perkapita Malaysia dan anggota OKI. Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi ini merupakan akumulasi bersih dari perubahan yang terjadi pada neraca perdagangan, perubahan output industri, konsumsi domestik, tambahan serapan tenaga kerja dan lain-lain.

Di sisi lain, dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi anggota OKI berpotensi terjadi jika liberalisasi yang

diterapkan dalam OKI hanya sebatas *partial liberalization* (skenario 1, tabel 4). Skenario ini diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia (-0,17%), negara-negara dalam kelompok D8 (-0,18%) dan anggota OKI lainnya (-0,17%). Beberapa faktor yang diduga akan berpengaruh adalah *term of trade* yang menurun secara tajam sehingga memperburuk kondisi defisit neraca perdagangan. Hal ini selanjutnya berpengaruh pada penurunan output industri dan pada akhirnya mengurangi kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini, sumber pertumbuhan ekonomi lain seperti konsumsi domestik juga berpotensi melambat.

Liberalisasi perdagangan dalam OKI, baik pada *skenario partial liberalization* maupun *full liberalization*, juga diprediksi akan berkontribusi pada penurunan laju inflasi. Indonesia dan negara-negara dalam kelompok D8 diperkirakan akan mampu meredam inflasi sekitar -0,29% pada *full liberalization scenario*. Sementara bagi anggota OKI lainnya, liberalisasi OKI akan mampu membantu penurunan inflasi hingga -0,4%. Logika ekonomi yang bisa menjelaskan hal ini adalah bahwa liberalisasi akan mengeliminir faktor-faktor penyebab *imported inflation* yang disebabkan oleh ketidakpastian dan ketidakberlanjutan pasokan bahan baku/produk setengah jadi/ produk jadi serta fluktuasi harga yang berlebihan.

4 Dalam studi Ghani ini, negara OKI yang dianalisis berjumlah 24 negara yaitu yang sudah melakukan liberalisasi perdagangan sejak periode 1979-2001.

Tabel 5. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI terhadap Pertumbuhan Ekspor dan Impor Indonesia

Indikator	Skenario 1 Partial Liberalization		Skenario 2 Full Liberalization	
	Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)	Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
GrainsCrops	29,69	29,82	30,33	30,39
MeatLstk	21,44	22,07	16,75	17,16
ForestFish	8,92	9,17	8,53	8,72
ProcFood	12,18	12,6	15,15	15,62
TextWapp	28,72	29,36	23,77	24,13
LightMnfc	9,8	10,16	10,96	11,28
HeavyMnfc	13,15	13,56	12,78	13,06
Util_Cons	44,24	44,24	32,00	32,00
TransComm	16,19	10,88	15,10	11,69
OthServices	11,63	11,63	12,92	12,92
OilGasMin	24,1	24,37	18,49	18,50

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia, kelompok D8 dan anggota OKI berpotensi mengalami penambahan defisit ketika diberlakukan liberalisasi perdagangan baik secara parsial maupun penuh. Indonesia dan kelompok negara D8 diperkirakan menjadi pihak yang akan mengalami dampak defisit neraca perdagangan terbesar dibandingkan dengan anggota OKI lainnya. Jika melihat akumulasi penambahan defisit neraca perdagangan yang akan dialami oleh 7 negara D8 sebesar USD, 227,68 miliar maka diperkirakan dampak liberalisasi

OKI terhadap neraca perdagangan D8 merata pada kisaran USD 30-an miliar. Untuk Indonesia misalnya, pada *partial liberalization scenario* diperkirakan berpotensi mengalami tambahan defisit neraca perdagangan hingga mencapai USD 42,13 miliar. Potensi defisit ini bisa diperkecil menjadi sekitar USD 36,14 miliar pada *full liberalization scenario*. Defisit ini terjadi karena akselerasi pertumbuhan impor lebih cepat daripada pertumbuhan ekspor di semua komoditas sebagaimana terlihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI Terhadap Perubahan Neraca Perdagangan Sektoral Indonesia

Indikator	Skenario 1 Partial Liberalization (USD Miliar)	Skenario 2 Full Liberalization (USD Miliar)
GrainsCrops	-4,53	-5,16
MeatLstk	-1,38	-1,22
ForestFish	-0,06	-0,03
ProcFood	0,56	1,87
TextWapp	10,79	13,54
LightMnfc	-0,67	1,47
HeavyMnfc	5,15	-8,44
Util_Cons	-1,77	-1,09
TransComm	-8,94	-8,41
OthServices	-13,53	-12,31
OilGasMin	-27,76	-16,37

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Potensi dampak liberalisasi OKI baik pada *partial liberalization* maupun *full liberalization scenario* terhadap neraca perdagangan sektoral (tabel 6) memiliki pola yang hampir sama walaupun dengan besaran yang sedikit berbeda. Pada skenario pertama, Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit perdagangan pada 8 komoditas (*GrainsCrops, MeatLstk, Forest Fish, LightMnfc, Util_Cons, TransComm, OthServices dan OilGasMin*) dan surplus pada 3 komoditas (*ProcFood, TextWapp dan HeavyMnfc*). Akumulasi

perubahan defisit perdagangan pada skenario pertama diperkirakan mencapai USD 42,13 miliar. Sebanyak 7 komoditas yang diperkirakan defisit pada skenario pertama akan tetap berjalan defisit pada skenario kedua, namun dengan besaran yang lebih kecil. Satu tambahan komoditi yang diprediksi akan mengalami defisit pada skenario kedua adalah *HeavyMnfc*. Menariknya, defisit produk *HeavyMnfc* pada skenario kedua akan terimbangi dengan surplusnya produk *LightMnfc*. Produk *procFood* dan *TextWapp* diperkirakan akan konsisten

menyumbang surplus perdagangan pada kedua skenario diatas.

Satu hal penting yang perlu menjadi catatan adalah tambahan defisit perdagangan terbesar pada kedua skenario berasal dari 4 komoditas yaitu *GrainCrops*, *TransComm*, *OthServices* dan *OilGasMin*. Pada *full liberalization scenario*, tambahan defisit juga terjadi pada *HeavyMnfc*. Defisit perdagangan pada lima komoditas ini setara dengan 95,6% dari akumulasi komoditas yang mengalami defisit pada *full liberalization scenario*. Dua komodoitas primer, *GrainCrops* dan *OilGasMin*, diperkirakan menyumbang defisit perdagangan masing-masing 9,7% dan 30,9% dari akumulasi komoditas yang mengalami defisit.

Bagi Indonesia, mengalami defisit perdagangan pada komoditas primer seperti *GrainCrops* dan *OilGasMin* tentu sangat memprihatinkan. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya mampu mengerem laju impor produk-produk dalam kelompok komoditas *GrainCrops*, kecuali gandum yang memang kurang cocok untuk ditanam di tanah Indonesia. Bahkan sebaliknya, jika potensi sumberdaya alam ini mampu dikelola dan diolah secara optimal, Indonesia berpotensi mendapatkan surplus dalam perdagangan internasional untuk komoditas *GrainCrops*.

Liberalisasi menyediakan banyak peluang serta tantangan bagi produk pertanian Indonesia. Menurut Apriantono (2007), kualitas produk pertanian di Indonesia telah menjadi titik kritis ditingkatkan untuk kompetisi di pasar

domestik dan global. Saat ini, salah satu tantangan berat yang dihadapi produsen produk pertanian untuk bersaing di pasar ekspor produsen dan eksportir produk pertanian harus memenuhi persyaratan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dan *Technical Barrier to Trade* (TBT). Untuk mencapai persyaratan ini, maka produser di Indonesia harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan *Good Agricultural Practices* (GAP). Pada produk pertanian olahan, juga dipersyaratkan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Persyaratan ini telah menjadi hambatan besar bagi sebagian besar produsen pertanian di Indonesia.

Defisit perdagangan yang cukup besar juga terjadi pada impor *Oil Gas Mining* yang mendorong defisit neraca perdagangan secara keseluruhan semakin melebar. Dari sisi *demand*, permintaan energi minyak yang meningkat ini bisa dipandang sebagai hal yang wajar seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Namun menjadi tidak wajar ketika hal ini tidak dibarengi dengan ketersediaan *supply* dalam negeri akibat ketersediaan sumberdaya yang menipis. kondisi ini diperparah dengan minimnya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi minyak. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan Indonesia belum bisa meraih manfaat besar dalam integrasi ekonomi dengan OKI. Pertama, secara geografis, posisi Indonesia relatif jauh dari komunitas anggota OKI. Sebagaimana terlihat dalam peta di bawah ini, posisi geografis

anggota OKI lebih terkonsentrasi di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan dan Afrika. Kondisi ini menyebabkan biaya transportasi yang harus ditanggung oleh eksportir dan importir negara OKI lainnya menjadi lebih tinggi ketika akan mengekspor dan atau mengimpor barang dari Indonesia dibandingkan dengan mengimpor barang serupa dari negara OKI lainnya yang lebih dekat. Lokasi geografis yang jauh juga berpotensi meningkatkan resiko dalam proses ekspor dan impor barang-barang yang tidak tahan lama, seperti pada komoditas pertanian. Hal ini pada akhirnya dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas barang. Maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memperbaiki keunggulan daya saingnya untuk mencapai *better price, better quality* dan *better delivery time*.

Kedua, struktur perdagangan Indonesia-OKI sangat kental diwarnai oleh perdagangan komoditi minyak. Pada tahun 2011, berdasarkan data dari Kementerian ESDM, Impor minyak bumi Indonesia yang berasal dari anggota OKI mencapai 89,5% dari total impor minyak bumi. Pada tahun tersebut, Indonesia tercatat mengimpor minyak bumi dari Saudi Arabia, Azerbaijan, Nigeria, Brunei Darussalam dan Malaysia. Di sisi lain, pertumbuhan perdagangan non-migas berjalan relatif lambat.

Ketiga, peluang Indonesia memanfaatkan pasar negara-negara OKI belum optimal karena kuatnya intra-trade antar negara OKI di kawasan tertentu seperti di Asia Selatan, Asia

Timur dan Pasifik dan kelompok GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan U.A. Emirates). Sebagai contoh, menurut Alpay, Savas, Murat Atlamaz dan Esat Bakimli (2011), sebanyak dua pertiga import negara-negara OKI di kawasan Asia Timur dan Pasifik ini berasal dari kawasan mereka sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sekitar seperempat dari total intra impor dalam OKI ditujukan ke kelompok GCC, sementara 22,8% lainnya ke negara-negara di Timur Tengah. Dengan demikian, hampir setengah dari intra impor dalam OKI terjadi dalam kelompok negara OKI yang berada di Timur Tengah.

Perubahan peta perdagangan dalam skema liberalisasi OKI dipastikan akan berpengaruh terhadap output sektor industri Indonesia (tabel 7). Dalam *partial liberalization scenario*, output sektor industri yang memproduksi tujuh produk (*Graincrops, Meatlstk, Forsetfish, Frocfood, Transcom, Othservices, Oilgasmin*) diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan. Industri *Othservice* dan *Meatlstk* berpotensi menjadi sektor yang paling terpengaruh dengan penurunan tertinggi masing-masing -32,76% dan -19,45%. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan dalam skema liberalisasi OKI juga berpotensi mendorong laju pertumbuhan output industri yang memproduksi 4 produk seperti *Textwapp, Lightmnfc, Heavymnfc* dan *Util_cons*. Pertumbuhan produk *Textwapp* diprediksi menjadi yang paling signifikan (139%).

Tabel 7. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI Terhadap Perubahan Pertumbuhan Output Sektor Industri Indonesia

Sub-Sektor Industri	Skenario 1 Partial Liberalization (%)	Skenario 2 Full Liberalization (%)
GrainsCrops	-7,94	-7,62
MeatLstk	-19,45	-10,05
ForestFish	-1,76	4,70
ProcFood	-4,43	4,95
TextWapp	139,02	101,53
LightMnfc	25,03	18,75
HeavyMnfc	68,22	13,95
Util_Cons	20,96	28,04
TransComm	-6,61	-1,29
OthServices	-32,76	-16,88
OilGasMin	-1,59	-9,29

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Sedikit berbeda dengan skenario pertama, liberalisasi OKI pada *full liberalization scenario* berpotensi mendorong pertumbuhan *output* sektor industri secara lebih luas. Ada 6 sektor industri yang bisa menikmati pertumbuhan *output* positif pada skenario ini yaitu *Forestfish*, *procfood*, *Textwapp*, *Lightmnfc*, *Heavymnfc* dan *Util-cons*. Sementara 5 industri lainnya dikhawatirkan akan mengalami penurunan *output* yaitu *Graincrops*, *Meatlstk*, *Transcom*, *Othservices*, *Oilgasmin*.

Pada kasus produk *Meatlstk*, Indonesia memang masih tergantung pada pasokan impor. Ketergantungan pada pasokan impor produk *Meatlstk*

bukan hanya untuk sisi konsumsi, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sektor industri makanan. Menurut salah satu narasumber penelitian ini, seorang pengusaha makanan, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan produk *Meatlstk* impor salah satunya disebabkan oleh masih lemahnya pengembangan di sisi hulu, khususnya peternakan. Dalam persepsi narasumber, peternakan sapi perah dan sapi potong saat ini kondisinya sama saja dengan tahun 70-an. Sekarang sangat minim jumlah peternakan besar yang bisa memasok susu dan daging untuk kebutuhan industri makanan dalam negeri.

Tabel 8. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sub-Sektor Industri	Skenario 1 Partial Liberalization		Skenario 2 Full Liberalization	
	Perubahan Permintaan TK Terampil (%)	Perubahan Permintaan TK Kurang Terampil (%)	Perubahan Permintaan TK Terampil (%)	Perubahan Permintaan TK Kurang Terampil (%)
GrainsCrops	-12,28	-14,1	-13,03	-14,44
MeatLstk	-24,93	-27,84	-16,64	-19,3
ForestFish	-1,39	-2,91	6,73	5,69
ProcFood	0,8	-7,56	7,83	2,01
TextWapp	152,93	129,48	104,5	97,96
LightMnfc	31,81	19,59	21,42	14,87
HeavyMnfc	77,13	60,7	16,57	10,03
Util_Cons	29,01	16,1	31,63	24,54
TransComm	1,49	-10,48	3,46	-4,97
OthServices	-30,07	-36,56	-15,3	-21,84
OilGasMin	-0,62	-4,04	-11,46	-13,81

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Penurunan maupun pertumbuhan output sektor industri akan mempunyai efek domino terhadap kemampuannya dalam menyerap dan mempertahankan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Pada skenario 1-skenario *partial liberalization*, penurunan output tujuh sub-sektor industri (*GrainsCrops*, *MeatLstk*, *ForestFish*, *ProcFood*, *TransComm*, *OthServices* dan *OilGasMin*) akan menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja kurang terampil di tujuh sub-sektor industri tersebut (tabel 8). Hal yang sama juga akan dirasakan oleh para

pencari kerja di kelompok tenaga kerja terampil, walaupun dengan penurunan yang lebih rendah.

Pada kasus *Procfood* dan *Transcomm industry*, walaupun jumlah output diperkirakan menurun, namun penyerapan tenaga kerja terampil berpotensi tetap tumbuh positif (tabel 8). Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah penggunaan teknologi baru yang membutuhkan tenaga kerja terampil untuk mengoperasikannya, terjadi proses substitusi tenaga kerja kurang terampil oleh tenaga kerja terampil dan

ekspektasi perubahan permintaan yang cepat untuk kedua produk tersebut.

Sama halnya dengan skenario pertama, tenaga kerja kurang terampil akan menjadi pihak yang paling terdampak negatif oleh proses *full liberalization scenario*. Penurunan output pada lima sub-sektor industri berimplikasi pada turunnya secara signifikan permintaan tenaga kerja kurang terampil di sub-sektor tersebut (tabel 8). Hal yang sama juga terjadi pada penyerapan tenaga kerja terampil di sektor tersebut (kecuali *Transcomm*), namun dengan besaran pengaruh yang lebih kecil.

Di sisi lain, sub-sektor sektor industri yang memiliki pertumbuhan output positif akan menjadi mesin penyerap tenaga kerja yang besar baik untuk tenaga kerja terampil maupun kurang terampil. Diantara sub-sektor industri tersebut, produsen *Textwapp* akan menjadi sub-sektor dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tertinggi, baik pada skenario pertama maupun skenario kedua.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kurang intensifnya kerjasama ekonomi antar anggota OKI dimanfaatkan oleh negara non-anggota untuk penetrasi produk di pasar OKI. Temporal (2011) menyebutkan bahwa saat ini banyak produk dengan brand Barat (*Western brands*) telah menguasai pasar negara-negara OKI. Sementara penjualan produk dengan *brand* Muslim masih relatif tertinggal. Sementara itu, Hossain (2005) menjelaskan bahwa lebih dari separuh total impor 30 anggota OKI berasal dari negara maju di luar anggota OKI, dimana tiga diantaranya sebagai

mitra dagang utamanya adalah Amerika, Jepang dan Eropa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gurler (2000), struktur produksi dan ekspor mayoritas negara OKI masih bergantung pada sektor primer. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan bahwa memang kerjasama perdagangan dan kemampuan inovasi para pengusaha dari anggota OKI untuk memproduksi barang dengan *brand* Muslim masih rendah. Namun di sisi lain, masih minimnya produk dengan *brand* Muslim merupakan kesempatan bagi investor dari anggota OKI untuk mulai memasuki pasar anggota OKI. Beberapa produk potensial yang bisa dikembangkan dengan brand Muslim untuk pasar di negara-negara OKI meliputi *food and beverage; education; tourism and hospitality; medical and pharmaceutical products and services; entertainment; cosmetics and personal care; internet and digital products and services; financial products and services; children's products; dan lifestyle and fashion products*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

OKI berpotensi menjadi pasar potensial bagi produk ekspor Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Potensi pasar anggota OKI yang besar ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia jika mempunyai akses pasar yang luas. Secara bilateral, Indonesia sudah mempunyai kerjasama perdagangan dengan beberapa negara OKI, namun tentu hal ini belum cukup untuk

mendapatkan akses pasar ke semua anggota OKI. Skema liberalisasi perdagangan yang dibuat oleh OKI melalui TPS-OIC merupakan saluran awal untuk membuka akses menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam.

Hasil simulasi dengan model GTAP menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan negara-negara OKI memberikan dampak sektoral yang variatif. Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat besar jika liberalisasi perdagangan dalam OKI dilakukan secara komprehensif/*full liberalization* (meliputi semua komoditas dan pengurangan tariff secara penuh). Melalui skema ini, Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03% dan menurunkan inflasi 0,29%. Namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan adalah liberalisasi perdagangan OKI, dalam jangka pendek, juga berpotensi meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Dalam beberapa tahun ke depan ketika sebagian besar anggota OKI sudah meratifikasi TPS-OIC, maka Indonesia perlu mengambil peran untuk mendorong percepatan dan pendalaman liberalisasi perdagangan yang lebih komprehensif antar anggota OKI. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, Indonesia perlu kiranya segera meratifikasi perjanjian TPS-OIC. Seandainya pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi dan bergabung dalam skema TPS-OIC, maka pembenahan dalam aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan perlu dibenahi sedini mungkin khususnya terkait aspek pembiayaan perdagangan,

promosi perdagangan, fasilitas perdagangan, pembangunan kapasitas dan pengembangan komoditas-komoditas strategis. Hal ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia baik di pasar OKI maupun pasar global. Dengan produk yang berdaya saing, maka diharapkan Indonesia bisa memperkecil defisit neraca perdagangan dan bahkan merubahnya menjadi surplus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para reviewer, editor dan mitra bestari atas kritik dan saran-saran yang sangat konstruktif. Selain itu, apresiasi yang tinggi sudah selayaknya diberikan kepada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI atas dukungannya selama penelitian naskah ini. Pendapat dalam paper ini merupakan tanggung jawab pribadi penulis dan tidak mewakili LIPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Irwan Shah Zainal, et. al. (2014). Trade Linkages between Malaysia and the OIC Member Countries: Empirical Evidence Based on Gravity Model. *American Journal of Applied Sciences* 2014, 11 (11): 1938-1944
- Alpay, Savas., Murat Atlamaz dan Esat Bakimli. (2011). *Trade among OIC Countries: Limits of Islamic Solidarity. Insight Turkey* Vol.13/ No.2 / 2011 pp. 145-170.
- Apriantono, Anton. (2007). *Prospek dan tantangan Sektor Pertanian di era Globalisasi*. Pidato Menteri Pertanian

- RI Pada Acara Seminar dan Peluncuran buku 35 Tahun PT. Agricon, 17 April 2007.
- Asian Development Bank (ADB). (2011). *Asia 2050: Realizing the Asian Century*. ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2013). *Statistik Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Langsung Berdasarkan Negara*. Jakarta.
- Estes, Richard J. and Tiliouine, Habib. (2014). Development Trends in Islamic Societies: From Collective Wishes to Concerted Actions. *Social Indicators Research Journal* 116.1. (Mar 2014) pp. 67-114.
- General Secretariat of Organisation of the Islamic Conference. (1991). *Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of The Organization of The Islamic Conference*. Jeddah.
- Ghani, Ghairuzazmi M. (2011). The Impact of Trade Liberalization on the Economic Performance of OIC Member Countries. *Journal of Economic Cooperation and Development* Vol. 32-1 (2011).
- Gurler Oker. (2000). Blocs in Islamic Common Market-Role and Function Of Regional Blocs And Arrangement In The Formation Of The Islamic Common Market. *Journal of Economic Cooperation* 21, 4 (2000) Page 1-28.
- Hasan, M. Kabir. (2002). *An Empirical Investigation of Economic Cooperation among The OIC Member Countries*. Economic Research Forum (ERF) Working Paper Series 200212. Cairo, Egypt.
- Hertel, Thomas W dan Tsigas, Marinos, E. (1997). *Structure of GTAP*, dalam Hertel, Thomas W (ed)., *Global Trade Analysis: Modeling and Applications*. Cambridge University Press.
- Hossain, Md Zakir, et.al. (2005). Econometric Analysis of Marketing Potential of OIC Countries: Some Facts under Global Economy. *Managerial Auditing Journal*; 2005; 20, 2; ABI/INFORM Global pp. 198-207.
- Hossain Ishtiaq. (2012). The Organisation of Islamic Conference (OIC): Nature, Role and The Issues. *Journal of Third World Studies*; Spring 2012; 29, 1; ProQuest Research Library. pg. 287.
- International Monetary Fund (IMF). (2013a). *World Economic Outlook Database 2013*. Washington DC.
- International Monetary Fund (IMF). (2013b). *Regional Economic Outlook Update-Middle East and North Africa: Defining the Road A head*. May 2013. Washington DC.
- Jafari, Yaghoob, Mohd Adib Ismail and Morteza Sadegh Kouhestani. (2011). Determinants of Trade Flows among D8 Countries:Evidence from the Gravity Model. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 32, 3 (2011), Page 21-3.
- Karam, Sina. (2014). *Socio-Economic Development And Muslim Countries' Islamic Solidarity Through Globalization; (A Comparative Study Of 51 Countries of the Muslim World, Including Iran, 2006-2005)*, Kuwait Chapter of *Arabian*

- Journal of Business and Management Review* Vol. 3, No.6; Feb. 2014
- Kliman, Daniel M. and Richard Fontaine. (2012). *Global Swing States Brazil, India, Indonesia, Turkey and the Future of International Order*. The German Marshall Fund of the United States.
- Lotze, Hermann. (1998). Integration And Transition on European Agricultural and Food Markets: Policy Reform, European Union Enlargement, and Foreign Direct Investment - Four Essays in Applied Partial and General Equilibrium Modeling -. Disertasi doctor rerum agriculturarum di Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin
- Narayanan, G., Badri, Angel Aguiar and Robert McDougall, Eds. (2012). *Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 8 Data Base*, Center for Global Trade Analysis, Purdue University
- Soekarni, M., Hidayat, Agus S., Suryanto, Joko. (2010). Peta Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 18 No. 1 Hal 1-20. Pusat Penelitian Ekonomi- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Temporal, Paul. (2011). *Islamic Branding and Marketing*. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore.
- UEA Embassy in Indonesia. *Hubungan Uni Emirat Arab-Indonesia*. Didownload dari www.uaembassyjakarta.org pada 20 September 2013.
- United Nations Comtrade Data Base. (2013) Indonesia's Export and Import 2000-2012. <http://comtrade.un.org>
- World Economic Forum. (2013). *The Global Competitiveness Report 2013–2014*. Geneva. www.weforum.org. Diunduh pada September 2013.
- World Bank. (2013). *Doing Business 2013*. Washington DC.
- World Trade Organization (WTO). (2013). Understanding The WTO: The Organization, Members and Observers. Didownload dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, diakses Pada Juni 2013.

HUBUNGAN ANTARA *CONSUMPTION ABROAD* (MODA 2) DENGAN *COMMERCIAL PRESENCE* (MODA 3) DI SEKTOR JASA PARIWISATA INDONESIA

The Relationship Between Consumption Abroad (Mode 2) and Commercial Presence (Mode 3) in Indonesia's Tourism Sectors

Muhammad Fawaiq

Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat,
email: muhammadfawaiq@yahoo.co.id

Naskah diterima: 01/03/2016 Naskah direvisi: 14/04/2016 Disetujui diterbitkan: 14/05/2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Moda 2 dan Moda 3 dalam perdagangan internasional di sektor jasa pariwisata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel *Vector Error Correction Model* (VECM) *Granger*. Data yang digunakan adalah data kedatangan wisatawan mancanegara dan *Foreign Direct Investment* (FDI) jasa hotel dan restoran tahun 1997-2014 di Bali, Jakarta, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Daerah-daerah ini berkontribusi sebesar 81,26% dari total kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia dan 68% terhadap total FDI di jasa hotel dan restoran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas jangka pendek antara kedua variabel tetapi terdapat hubungan jangka panjang satu arah yaitu variabel Moda 3 dipengaruhi oleh variabel Moda 2. Hasil pengujian pada gabungan antara jangka panjang dan jangka pendek menunjukkan bahwa variabel Moda 3 secara kuat dipengaruhi oleh variabel Moda 2. Dengan demikian diketahui bahwa semakin banyak jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia maka akan mendorong meningkatnya FDI di jasa hotel dan restoran, tetapi meningkatnya FDI di jasa tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap masuknya jumlah wisatawan mancanegara.

Kata kunci: Perdagangan Jasa, Moda 2, Moda 3, Pariwisata, VECM *Granger*.

Abstract

This paper examines the relationship between Mode 2 and Mode 3 of international trade in tourism sector. The method used is the Panel Vector Error Correction Model (VECM) Granger. The data used in this study were the number of foreign tourist arrivals and the Foreign Direct Investment (FDI) in some hotels and restaurants during 1997-2014 in Bali, Jakarta, Riau Islands and Nort Sumatera. These regions contributed for 81.26% out of the total tourist arrivals in Indonesia and 68% of the total FDI in the services of hotels and restaurants Indonesia. The results using VECM Granger demonstrated that there was no short-term causality relationship between these two variables but they had a long-term causality relationship that the Moda 3 was affected by the variable mode 2. Test results on a combination of long-term and short-term showed that the variable mode 3 was strongly influenced by variable mode 2. Thus, it is known that the more foreign tourists coming to Indonesia, the more FDI we gained from the service of hotels and restaurants, but this increase does not significantly affect the number of foreign tourists.

Keyword: Trade in Services, Mode 2, Mode 3, Tourism, VECM *Granger*

JEL Classification: F13, F14, F16, F21, F23

PENDAHULUAN

Dalam konsep perdagangan internasional di sektor jasa sebagaimana yang tertuang dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dikenal empat jenis pasokan jasa dan 12 sektor jasa. Keempat jenis pasokan jasa tersebut adalah pasokan lintas batas (Moda 1), konsumsi di luar negeri (Moda 2), keberadaan komersial (Moda 3) dan perpindahan manusia (Moda 4). Keduabelas sektor jasa adalah 1). Jasa Bisnis; 2). Jasa Komunikasi; 3). Jasa Konstruksi dan yang terkait; 4). Jasa Distribusi; 5). Jasa Pendidikan; 6). Jasa Lingkungan; 7). Jasa Keuangan; 8). Jasa Kesehatan dan Sosial; 9). Jasa Pariwisata dan yang terkait; 10). Jasa Rekreasi, Budaya dan Olah Raga; 11). Jasa Transportasi; dan 12). Jasa Lainnya.

Pada kerjasama liberalisasi perdagangan jasa, setiap negara memberikan komitmen untuk membuka sektor jasanya berdasarkan sektor dan jenis pasokan. Komitmen yang diberikan tersebut biasanya dengan tingkat keterbukaan yang berbeda-beda tergantung pada kepentingan setiap negara. Tingkat keterbukaan sektor jasa secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu dibuka secara penuh tanpa pembatasan atau diliberalisasi secara penuh dalam *Schedule of Commitment* (SOC) dituliskan dengan kata *none*, dibuka dengan pembatasan dituliskan pembatasan-pembatasan dan belum dibuka atau belum

diliberalisasikan dituliskan dengan kata *unbound* (WTO, 2001).

Salah sektor jasa penting dan telah diliberalisasi oleh Indonesia adalah jasa pariwisata. Sektor jasa pariwisata Indonesia merupakan sektor andalan utama Indonesia dalam hal ekspor. Kontribusi ekspor jasa pariwisata adalah yang terbesar yaitu mencapai 48,98% dari total ekspor jasa pada tahun 2014 (Bank Indonesia, 2015). Sektor yang berkontribusi besar lainnya adalah jasa bisnis (28,79%). Kontribusi sektor jasa lainnya terhadap ekspor jasa-jasa Indonesia pada tahun 2014 rata-rata dibawa 10%. Tingkat komitmen yang diberikan Indonesia pada sektor jasa pariwisata di berbagai fora kerjasama Indonesia seperti WTO, ASEAN, ASEAN+1 dan IJEPA adalah terbuka secara penuh pada Moda 1 dan Moda 2, kemudian terbuka dengan pembatasan pada Moda 3 dan Moda 4.

Diberikanya tingkat keterbukaan penuh pada Moda 2 jasa pariwisata Indonesia berarti bahwa konsumen dari luar negeri dapat menikmati jasa pariwisata Indonesia tanpa diberikan pembatasan-pembatasan. Dibukanya Moda 2 secara penuh diharapkan dapat mendorong kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Hal ini menjadi penting karena wisatawan mancanegara dapat mendorong penerimaan devisa negara (Lumaksono, *et al.*, 2012). Lebih lanjut Lumaksono, *et al.* menjelaskan bahwa pertumbuhan devisa dari sektor pariwisata lebih cepat jika dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa lainnya. Kedatangan wisatawan mancanegara merupakan

suatu kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan ekspornya (Ivanovic, Baresa, & Bogdan, 2011). Dalam perdagangan internasional di sektor jasa pariwisata, masuknya Moda 2 atau kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia merupakan bentuk ekspor Indonesia.

Adapun komitmen Indonesia pada Moda 3 adalah terbuka dengan pembatasan (pembatasan wilayah yang dibuka) terutama pada batas kepemilikan Modal asing yaitu 51% untuk Indonesia wilayah barat dan 100% untuk Indonesia wilayah timur. Tingkat keterbukaan ini dimaksudkan untuk mendorong masuknya Modal asing di bidang kepariwisataan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pentingnya FDI dalam mendorong masuknya wisatawan asing sebagai salah satu bentuk ekspor jasa diungkapkan oleh Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013). Berdasarkan hasil penelitian Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013) terdapat hubungan kausalitas jangka panjang dua arah antara datangnya wisatawan asing dengan FDI. Lebih lanjut menurut Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013) masuknya FDI signifikan mendorong datangnya wisatawan mancanegara khususnya pada negara-negara berkembang dan sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara juga mendorong masuknya FDI pada negara-negara tersebut.

Hubungan antara Moda 2 (konsumsi di luar negeri) dalam bentuk kedatangan

wisatawan mancanegara dengan Moda 3 (keberadaan komersial) dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) sangat penting untuk diteliti dalam konteks pengembangan ekspor jasa dan kerjasama perdagangan internasional sektor jasa khususnya di jasa pariwisata. Untuk kasus Indonesia, tulisan ini melihat bagaimana peran masuknya Moda 3 dalam bentuk FDI pada hotel dan restoran sebagai salah satu bentuk impor Indonesia di sektor jasa pariwisata terhadap masuknya Moda 2 dalam bentuk kedatangan wisatawan mancanegara sebagai bentuk ekspor Indonesia di jasa tersebut.

METODE

Penelitian terkait dengan hubungan antara FDI di jasa hotel dan restoran dengan kedatangan wisatawan mancanegara serta manfaatnya terhadap pengembangan jasa pariwisata telah banyak dilakukan, namun dalam kasus Indonesia terutama terkait dengan perdagangan jasa belum banyak dilakukan. Untuk itu penelitian ini akan mengadopsi metode-metode dari penelitian tersebut dan membandingkan hasilnya dengan kasus Indonesia. Penelitian serupa juga telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti di dunia seperti Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013), Alam *et al.* (2015), Isik (2015) dan Peric & Radic (2015). Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013) mengukur hubungan kausalitas antara FDI dengan jumlah kedatangan wisatawan asing dengan metode *vector error correction model* (VECM) pada 20 negara berkembang

dengan periode 1995-2008. Alam *et al.* (2015) meneliti mengenai hubungan antara pariwisata dengan FDI pada negara-negara berkembang dengan menggunakan analisis regresi linier. Penelitian Isik (2015) mengenai hubungan kausalitas antara FDI dengan pengembangan industri wisata dengan FDI metode analisis data panel. Adapun Peric & Radic (2015) meneliti mengenai produktifitas pariwisata FDI di Kroasia menggunakan metode regresi berganda dengan fungsi produksi *Cobb-Douglas*. Setelah membandingkan beberapa metode-metode pada penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengadopsi metode yang digunakan oleh Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013). Hal ini disebabkan karena kesamaan variabel serta format data yang digunakan, namun demikian penelitian-penelitian lainnya digunakan sebagai pembandingan hubungan antar variabel.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu analisis deskriptif dan pendekatan *Panel vector error correction mode* (VECM) untuk melihat kausalitas Granger antar Variabel. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis perkembangan kedatangan wisatawan manca negara ke Indonesia serta perkembangan penanaman Modal asing langsung di subsektor jasa hotel dan restoran. Jumlah kunjungan wisatawan asing merupakan proksi untuk Moda konsumsi di luar negeri (Moda 2) dinamakan variabel Moda 2, kemudian *foreign direct investment* (FDI) untuk hotel dan restoran merupakan proksi untuk Moda kehadiran komersial (Moda 3) dan dinamakan variabel Moda 3. Daerah

yang diamati pada penelitian ini adalah daerah dengan kunjungan pariwisata terbesar di Indonesia yaitu Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau dengan periode selama 14 tahun yaitu dari tahun 1997 sampai tahun 2014.

Selanjutnya, dalam menentukan hubungan kausalitas antar variabel, terdapat beberapa tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari pengujian uji stasioneritas, uji kointegrasi, uji *lag length criteria*, dan uji kausalitas granger. Adapun penjelasan setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Uji Stasioneritas

Uji stasioner sangat penting dilakukan untuk melihat apakah data mengandung *unit root* atau tidak. Apabila tidak mengandung *unit root* berarti data tersebut stasioner. Stasioneritas ini penting karena menunjukkan bahwa data tersebut memiliki fluktuasi yang rendah sehingga menghasilkan estimasi bervarian rendah (Hidayat, 2010). Pengujian non-stasioneritas menggunakan *Im, Pesaran dan Shin (IPS) unit root test*. Keputusan menerima hipotesis 0 apabila $H_0: t\text{-statistik} = 0$ untuk semua i yang berarti bahwa data mengandung *unit root* atau tidak stasioner. Sebaliknya keputusan menolak hipotesis 0 apabila $H_0: t\text{-statistik} < 0$ untuk semua i yang berarti bahwa data tidak mengandung *unit root* atau stasioner. Pengujian ini lakukan pada level, dan apabila tidak stasioner kemudian dilakukan pengujian pada *first difference*.

Uji kointegrasi

Apabila hasil pengujian sebelumnya (stasioneritas) diketahui bahwa data stasioner pada tingkat *first differencing* maka dapat dilakukan pengujian kointegrasi (Athanasios & Antonios, 2010). Panel *co-integration* data menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh Pedroni (1999). Pengujian ini bertujuan untuk menentukan perlunya kontrol pada hubungan ekuilibrium jangka panjang antar variabel dalam spesifikasi ekonometrika (Samimi, Sadeghi & Sadeghi, 2013). Kesimpulan menolak H_0 apabila nilai *prob.* pada pengujian Ko-integrasi dengan *Pedroni Panel* prob.-nya lebih kecil dari nilai kritis 5%.

Uji Lag Length Criteria

Hal penting yang dilakukan dalam menganalisis model kelambatan adalah menentukan panjang kelambatan dan hal ini merupakan suatu permasalahan dalam spesifikasi model (Widarjono, 2009 dalam Nurrohimi, 2013). Uji *lag* ini bertujuan untuk mengukur panjang *lag* optimum yang digunakan dalam pengujian selanjutnya (Safitriani, 2014). Adapun uji *lag* dalam penelitian ini menggunakan *Schwarz information criterion* (SC).

Uji Kausalitas Granger dengan VECM

Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013) mengusulkan model kausalitas *Granger* dalam menguji hubungan antara kunjungan wisatawan mancanegara (*Tourism* dengan FDI di jasa hotel

dan restoran). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengestimasi residual dari persamaan jangka panjang, kemudian menggunakan *dynamic error correction model* sebagai berikut:

$$\Delta \text{Moda2}_{i,t} = \alpha_{1,i} + \phi_{1,i} \text{ECT}_{i,t-1} + \sum_{j=1}^k \gamma_{1,j,i}$$

$$\Delta \text{Moda2}_{i,t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{1,j,i} \Delta \text{Moda3}_{i,t-j} + \varepsilon_{1,i,t} \dots (1)$$

$$\Delta \text{Moda3}_{i,t} = \alpha_{2,i} + \phi_{2,i} \text{ECT}_{i,t-1} + \sum_{j=2}^k \gamma_{2,j,i}$$

$$\Delta \text{Moda2}_{i,t-j} + \sum_{j=2}^k \theta_{2,j,i} \Delta \text{Moda3}_{i,t-j} + \varepsilon_{2,i,t} \dots (2)$$

Dimana i menggambarkan provinsi, t (periode), dan j adalah *lag* optimum. Adapun Δ adalah perbedaan operator, ECT adalah *lagged error-correction term* yang diperoleh dari hubungan ko-integrasi jangka panjang, ϕ_1 dan ϕ_2 adalah koefisien serta $\varepsilon_{1,i,t}$ dan $\varepsilon_{2,i,t}$ adalah istilah gangguan yang diasumsikan tidak berkorelasi. Persamaan (1) dan (2) pada penelitian Samimi, Sadeghi and Sadeghi (2013) kemudian disesuaikan dengan istilah perdagangan internasional disektor jasa yang mana masuknya FDI adalah proksi untuk impor di Moda 3 dan Tour adalah proksi untuk ekspor di Moda 3. Dengan kata lain, persamaan (1) dan (2) menggambarkan hubungan antara ekspor jasa pariwisata di Moda 2 dan impor melalui Moda 3.

Pengujian kausalitas *Granger* pada kedua persamaan tersebut dibagi menjadi kausalitas jangka panjang dan kausalitas jangka pendek. Untuk kausalitas jangka pendek diuji menggunakan *F-statistic* dengan *Wald Test* pada setiap variabel. Kesimpulan ditolaknya hipotesis 0 jika $H_0: \Theta_1 = 0$ atau $H_0: \gamma_2 = 0$ untuk semua i dan j . Jika hipotesis nol ditolak berarti kedua

variabel memiliki kausalitas *Granger* jangka pendek. Untuk kausalitas *Granger* jangka panjang menggunakan ECT (*error correction terms*). Apabila koefisien ECT sebesar nol ($\varphi_{1,i} = 0$ atau $\varphi_{2,i} = 0$) untuk semua i , maka tidak terdapat kausalitas jangka panjang antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Setelah dilakukan analisis maka diketahui hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas ini menurut Gujarati (2003) dalam Nurrohm (2013) dapat berupa:

1. Hubungan kausalitas satu arah adalah hanya salah satu variabel yang yang berpengaruh pada variabel lainnya. Dalam hal ini yaitu variabel Moda 2 yang mempengaruhi Moda 3 atau variabel Moda 3 yang mempengaruhi Moda 2.
2. Hubungan kausalitas dua arah adalah kedua variabel memiliki hubungan timbal balik, Moda 2 mempengaruhi Moda 3 dan juga Moda 3 mempengaruhi Moda 2.
3. Tidak ada hubungan timbal balik adalah kedua variabel sama-sama tidak saling mempengaruhi, Moda 2 tidak mempengaruhi Moda 3 dan Moda 3 juga tidak mempengaruhi Moda 2.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari berbagai instansi terkait dengan daerah

penelitian (Provinsi Bali, Provinsi DKI. Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara). Data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data *Schedule of Commitment* (SOC) jasa pariwisata pada kerjasama ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) Paket 8 diperoleh dari *Website ASEAN Secretariat*. Data SOC berupa dokumen hasil kesepakatan negara-negara ASEAN yang dipublikasikan di *Website ASEAN Secretariat* dengan judul "*Annexes to the Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS).
2. Data jumlah kunjungan wisatawan asing berdasarkan pintu kedatangan di Provinsi Bali, Provinsi DKI. Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara antara tahun 1997-2014 diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini dipulikasi di *website* BPS dengan judul Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 1997-2014
3. Data realisasi *foreign direct investment* (FDI) untuk jasa hotel dan restoran di Provinsi Bali, Provinsi DKI. Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara antara tahun 1997 sampai tahun 2014 diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/ BKPM (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Liberalisasi Jasa Pariwisata Indonesia

Indonesia telah membuka sektor jasa pariwisata khususnya jasa hotel dan restoran pada kerjasama ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS). Komitmen yang diberikan Indonesia untuk Moda 2 adalah terbuka penuh tanpa pembatasan. Hal ini berarti bahwa wisatawan mancanegara dapat menikmati jasa pariwisata Indonesia tanpa diberikan persyaratan-persyaratan

yang berlaku dalam perdagangan jasa atau dengan kata lain wisatawan asal negara-negara ASEAN bebas datang untuk berwisata ke Indonesia. Adapun komitmen Indonesia di Moda 3 adalah terbuka dengan pembatasan. Bentuk pembatasan yang diberikan Indonesia terkait dengan akses pasar adalah pembatasan jumlah kepemilikan Modal asing (FEP) dan pembatasan wilayah-wilayah tertentu Indonesia yang diizinkan untuk investasi asing. Adapun komitmen Indonesia pada Moda 3 kerjasama AFAS paket 8 di jasa pariwisata disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komitmen Liberalisasi Moda 3 Jasa Pariwisata Indonesia Pada Kerjasama AFAS Paket 8.

Jasa Pariwisata	Komitmen untuk akses pasar
Hotel (CPC 64110) (hotel bintang 3,4,5)	Kepemilikan Modal asing 100% untuk: Bagian Timur Indonesia, Bengkulu, Jambi, Sulawesi, NTT dan daerah lainnya maksimum 51%.
Hotel (CPC 64110) (hotel bintang 1,2)	Kepemilikan Modal asing maksimum 51% untuk: Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara.
Jasa penyediaan makanan dengan restoran (64210)	Kepemilikan Modal asing maksimum 51% untuk: Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara.
Jasa penyediaan minuman tanpa hiburan (64310) dan dengan hiburan (CPC 6432/64320)	Kepemilikan Modal asing maksimum 49% untuk: Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara.

Sumber: ASEAN *Secretariat* (2014)

Komitmen tertinggi jasa pariwisata Indonesia berdasarkan Tabel 1 adalah pada hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Untuk jasa hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5, Indonesia membuka 100% kepemilikan asing di wilayah timur Indonesia, Provinsi Bengkulu,

Provinsi Jambi, semua provinsi di pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedangkan Provinsi Indonesia lainnya seperti Provinsi Bali, Provinsi DKI. Jakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Indonesia lainnya dibatasi maksimum

sebesar 51%. Dibukanya hotel dengan kepemilikan Modal asing 100% ini bertujuan untuk mendorong masuknya investasi di daerah-daerah tersebut. Untuk hotel bintang 1 dan bintang 2 diharuskan sepenuhnya dimiliki oleh penyedia jasa dalam negeri kecuali pada beberapa wilayah seperti semua provinsi di pulau Sulawesi, semua provinsi di pulau Papua, semua provinsi di kepulauan Maluku dan semua provinsi di kepulauan Nusa Tenggara diperbolehkan kepemilikan Modal asing maksimum 51%. Komitmen untuk jasa penyediaan makanan dengan restoran sama dengan komitmen untuk jasa hotel bintang 1 dan bintang 2. Jasa penyediaan minuman tanpa dan dengan hiburan, maksimum kepemilikan Modal asing sebesar 49% untuk wilayah Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara. Dengan demikian daerah penelitian ini belum mengizinkan kepemilikan Modal asing 100% untuk hotel bintang 3, bintang 4 dan hotel bintang lima serta masih belum membuka hotel bintang 1 dan bintang 2 untuk asing.

Analisis Masuknya Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia (Moda 2)

Pintu masuk utama wisatawan asing ke Indonesia adalah melalui Bandara Ngurah Rai di Provinsi Bali, Bandara Soekarno Hatta di Provinsi DKI Jakarta, Pelabuhan laut Batam Center di Provinsi Kepulauan Riau dan Bandara Polinia/Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara. Ke empat pintu masuk tersebut sudah berkontribusi sangat besar dan mewakili sebesar 81,26% dari total wisatawan asing yang masuk ke

Indonesia pada tahun 2014. Kontribusi dari setiap pintu masuk tersebut terhadap total nasional adalah Provinsi Bali di urutan pertama dengan kontribusi sebesar 39,55%, kemudian Provinsi DKI Jakarta di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 23,81%, Provinsi Kepulauan Riau di urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 15,41% dan Provinsi Sumatera Utara di urutan ke empat dengan kontribusi sebesar 2,49%.

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif sejak 1997 sampai 2014. Pertumbuhan rata-rata wisatawan asing ke Indonesia pada periode tersebut sebesar 3,94%. Daerah dengan pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi Bali sebesar 6,59% kemudian Provinsi Sumatera Utara dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 5,91% dan 5,25%. Pertumbuhan tiga pintu utama tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan nasional. Untuk pintu masuk wisatawan manca negara melalui Provinsi Kepulauan Riau relatif tidak mengalami peningkatan yang penting (hanya 0,22%) dengan rata-rata sebesar 1,17 juta orang per tahun. Tingginya jumlah wisatawan mancanegara di daerah-daerah ini dapat disebabkan karena daya tarik, akses yang mudah, akomodasi, fasilitas, dan keamanan yang ditawarkan (Jumpstart, 2008). Adapun pintu masuk Indonesia lainnya tumbuh rata-rata dibawah pertumbuhan nasional yaitu sebesar 2,22% dengan rata-rata kedatangan wisatawan manca negara sebesar 1,4 juta orang per tahun. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara periode 1997-2014 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 1997-2014

(dalam orang)

Tahun	Bandara					Jumlah
	Soekarno Hatta	Ngurah Rai	Polonia/ Kualanamu	Batam	Bandara Lainnya	
1997	1 457 340	1 293 657	174 724	1 119 238	1 140 284	5 185 243
1998	883 016	1 246 289	70 441	1 173 392	1 233 278	4 606 416
1999	819 318	1 399 571	76 097	1 248 791	1 183 743	4 727 520
2000	1 029 888	1 468 207	84 301	1 134 051	1 347 770	5 064 217
2001	1 049 471	1 422 714	94 211	1 145 578	1 441 646	5 153 620
2002	1 095 507	1 351 176	97 870	1 101 048	1 387 799	5 033 400
2003	921 737	1 054 143	74 776	1 285 394	1 130 971	4 467 021
2004	1 005 072	1 525 994	97 087	1 527 132	1 165 880	5 321 165
2005	1 105 202	1 454 804	109 034	1 024 758	1 308 303	5 002 101
2006	1 147 250	1 328 929	110 405	1 012 711	1 272 056	4 871 351
2007	1 153 006	1 741 935	116 614	1 077 306	1 416 898	5 505 759
2008	1 464 717	2 081 786	130 211	1 061 390	1 496 393	6 234 497
2009	1 390 440	2 384 819	184 193	951 384	1 448 894	6 323 730
2010	1 823 636	2 546 023	162 410	1 007 446	1 463 429	7 002 944
2011	1 933 022	2 788 706	192 650	1 161 581	1 573 772	7 649 731
2012	2 053 850	2 902 125	205 845	1 219 608	1 663 034	8 044 462
2013	2 240 502	3 241 889	225 550	1 336 430	1 757 758	8 802 129
2014	2 246 437	3 731 735	234 724	1 454 110	1 768 405	9 435 411

Sumber: BPS (2015)

Analisis Masuknya FDI Jasa Hotel dan Restoran Ke Indonesia (Moda 3)

Realisasi FDI di jasa hotel dan restoran pada empat provinsi Indonesia (Provinsi Bali, Provinsi DKI. Jakarta, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau) telah mendominasi total realisasi FDI jasa hotel dan restoran di Indonesia. Kontribusi total FDI jasa hotel dan restoran dari tahun 1997

sampai 2014 untuk keempat provinsi ini sudah mencapai 68 % dari total FDI di total secara nasional. Provinsi dengan kontribusi tertinggi dari keempat provinsi tersebut adalah Provinsi Bali sebesar 36,7%, kemudian Provinsi DKI. Jakarta (19,5%), Provinsi Kepulauan Riau (10,7%) dan Provinsi Sumatera Utara (1,2%). Realisasi FDI di jasa hotel dan restoran pada daerah penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi FDI Jasa Hotel dan Restoran Yang Masuk Ke Indonesia (1997-2014)

(dalam USD ribu)

Tahun	Sumatera Utara	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Bali	Provinsi Lainnya	Jumlah
1997	-	-	107.293	213.859	160.239	481.391
1998	-	71.417	-	10	4.226	75.652
1999	7.495	101	2.167	11.965	99.523	121.252
2000	-	4.815	30.381	15.237	596.307	646.740
2001	-	221.054	137.883	37.360	5.166	401.463
2002	-	8.535	-	24.536	2.400	35.471
2003	-	-	14.200	1.939	1.977	18.116
2004	-	-	78.816	968	544	80.327
2005	-	-	3.566	1.047	-	4.614
2006	250	16.500	53.179	76.213	34.158	180.300
2007	-	-	37.186	73.793	500	111.479
2008	8.215	2.582	73.058	5.102	50.714	139.672
2009	23.587	1.648	15.422	57.594	58.677	156.927
2010	-	2.180	96.023	180.620	27.699	306.522
2011	2.780	10.599	22.687	249.310	61.237	346.613
2012	4.672	57	31.511	100.382	105.620	242.242
2013	4.143	149.250	66.453	380.943	167.370	768.159
2014	1.735	1.136	122.425	249.474	87.753	462.522

Sumber: BKPM (2015)

Rata-rata FDI di jasa hotel dan restoran yang masuk ke Indonesia antara tahun 1997-2014 adalah sebesar USD 254,42 juta per tahun. Pada periode tersebut, Provinsi Bali menerima FDI di jasa hotel dan restoran sebesar USD 93,35 juta per tahun kemudian Provinsi DKI. Jakarta sebesar USD 49,57 juta per tahun, Provinsi Kepulauan Riau sebesar USD 28,82 juta per tahun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar USD 2,94 juta per tahun. Gabungan Provinsi lainnya

menerima FDI sebesar USD 81,34 juta per tahun. Tingginya FDI di jasa hotel dan restoran di daerah tersebut dapat disebabkan oleh tingginya aktifitas pariwisata dan bisnis yang mendorong investor untuk menanamkan modalnya di provinsi-provinsi tersebut. Adapun faktor jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sebagai konsumen jasa ini akan dianalisis pada pokok bahasan selanjutnya.

Analisis Hubungan Kausalitas Antara Moda 2 dan Moda 3 Pada Jasa Pariwisata Indonesia

Pengujian pertama yang dilakukan untuk menguji hubungan kausalitas antara Moda 2 dan Moda 3 adalah

uji stasioneritas. Pengujian ini menggunakan uji *unit root* Im, Pesaran dan Shin (IPS). Tahap pertama yang dilakukan pada uji *unit root* adalah pengujian pada tingkat level. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian *Unit Root* dengan IPS pada Tingkat Level

Variabel	Prob. Pada Level	Keterangan
Moda 2 (Tour)	0.9991	Tidak Stasioner
Moda 3 (FDI)	0.1863	Tidak Stasioner

Sumber: data diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa kedua variabel (Moda 2 dan Moda 3) tidak stasioner pada tingkat level. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *prob.* yang lebih tinggi dari tingkat nilai kritis 5%. Oleh karena kedua variabel tidak stasioner

pada tingkat level maka diperlukan pengujian *unit root* pada tingkat *first differencing*. Hasil pengujian *unit root* pada *first differencing* tersebut yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian *Unit Root* dengan IPS pada Tingkat *First Differencing*

Variabel	Prob. Pada First Difference	Keterangan
Moda 2 (Tour)	0.0030	Stasioner
Moda 3 (FDI)	0.0002	Stasioner

Sumber: data diolah

Pengujian *unit root* pada tingkat *first differencing* menunjukkan bahwa nilai *prob.* kedua variabel lebih kecil dari nilai kritis 5% atau kedua variabel tersebut stasioner pada tingkat *first differencing*. Setelah diperoleh data dari kedua variabel yang stasioner

pada tingkat *first differencing* kemudian diijinkan untuk dilakukannya pengujian selanjutnya yaitu uji kointegrasi dengan Pedroni panel. Hasil pengujian kointegrasi menggunakan Pedroni Panel disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Pedroni Panel Ko-integrasi

Test Statistics	Statistics	Prob.
Panel v-statistic	-0,460286	0,6773
Panel rho-statistic	-4,460151	0,0000
Panel PP-statistic	-21,08139	0,0000
Panel ADF-statistic	-6,533611	0,0000
Group rho-statistic	-2,883261	0,0020
Group PP-statistic	-23,12006	0,0000
Group ADF-statistic	-6,648601	0,0000

Sumber: data diolah

Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh pengujian (kecuali panel v-statistic) signifikan pada tingkat 5%. Hal ini berarti bahwa hasil uji co-integrasi menolak hipotesis H_0 dan menerima Hipotesis H_1 . Dengan kata lain terjadi hubungan ko-integrasi antara Moda 2 dan Moda 3 dalam jangka panjang. Hubungan kointegrasi ini juga berarti bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel tersebut dan tidak ada ruang untuk terjadinya regresi lancung (Kao, 1999 dalam Eslamloueyan & Jokar, 2014). Dengan tidak adanya regresi lancung berarti koefisien variabel Moda 2 dan Moda

3 dapat menghasilkan ramalan yang akurat.

Menurut Srivastava (2015), apabila tidak terdapat hubungan kointegrasi antar variabel maka dilakukan pengujian kausalitas dengan VAR *Granger* dan apabila terdapat hubungan kointegrasi maka dilakukan pengujian kausalitas dengan VECM *Granger*. Dengan demikian pengujian kausalitas yang digunakan adalah VECM *Granger*. Sebelum melakukan pengujian VECM *Granger* terlebih dahulu melakukan uji *lag length criteria*. Hasil *lag length criteria* ini disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Lag Length Criteria

Lag	Schwarz Information Criterion (SC)	Hannan - Quinn Criterion (HQ)
0	55.04797	55.00368
1	51.99264*	51.85977*
2	52.18214	51.96068
3	52.27025	51.96021
4	52.48813	52.08952

Sumber: data diolah

Hasil Uji Lag menggunakan *Schwarz Information Criterion* (SC) menunjukkan kedua variabel saling berpengaruh pada lag ke 1. Hal ini berarti bahwa kenaikan nilai Moda 2 dan Moda 3 pada satu tahun sebelumnya berpengaruh pada kenaikan nilainya pada tahun berikutnya.

Nilai lag ke-1 digunakan dalam persamaan 1 dan 2 untuk menghitung hubungan kausalitas menggunakan VECM *Granger* jangka pendek dan jangka panjang. Hasil pengujian VECM *Granger* untuk hubungan kausalitas jangka pendek disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Pengujian Panel Kausalitas Jangka Pendek

Dependent Variabel	Δ Moda 2	Δ Moda 3
Δ Moda 2	-	0,600806 (Prob.0,4413)
Δ Moda 3	0,115899 (Prob. 0,7347)	-

Sumber: data diolah

Keterangan: Semua nilai dalam tabel adalah F-statistik.

Berdasarkan hasil uji koefisien θ_1 untuk variabel Moda 3 dengan *Wald Test* pada Tabel 8, diperoleh nilai prob. F-statistik sebesar 0,4413 atau lebih besar dari 5%. Hal ini berarti bahwa hipotesis 0 ($\theta_1 = 0$) diterima atau Moda 3 tidak mempengaruhi Moda 2 dalam jangka pendek. Tabel 8 juga menunjukkan hasil uji koefisien γ_2 untuk variabel Moda 3 yang menunjukkan pengaruh Moda 2 terhadap Moda 3. Hasil uji *Wald Test* untuk koefisien γ_2 menunjukkan prob. F-statistik sebesar 0,7347 yang juga lebih besar dari 5%. Hal ini berarti bahwa hipotesis 0 ($\gamma_2 = 0$)

diterima atau Moda 2 tidak dipengaruhi oleh Moda 3 dalam jangka pendek. Hasil ini juga sama dengan temuan Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013) yang menemukan bahwa FDI di jasa hotel dan restoran tidak memiliki hubungan kausalitas jangka pendek dengan kedatangan wisatawan manca negara. Setelah diketahui pengujian kausalitas jangka pendek, selanjutnya dilakukan pengujian kausalitas jangka panjang. Adapun hubungan kausalitas jangka panjang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Pengujian Panel Kausalitas Jangka Panjang

Dependent Variabel	Koefisien ECT	F-statistik (Prob)
Δ Moda 2	0,892075	2,327894 (0,1323)
Δ Moda 3	-0,823750	16,32096 (0,0002)

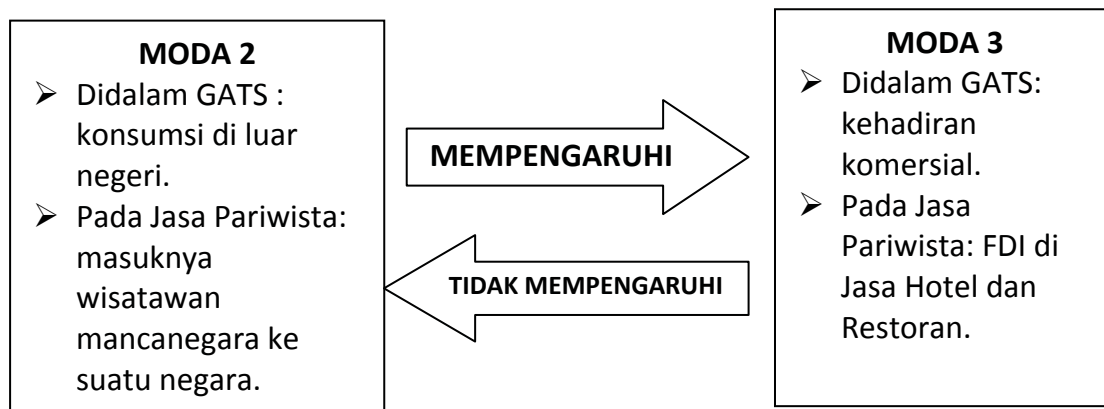
Sumber: data diolah

Tabel 9. menunjukkan bahwa nilai prob. F-statistik pada uji koefisien ECT (φ_1) untuk variabel terikat Moda 3 lebih kecil dari 5% yang berarti bahwa menolak hipotesis nol ($\varphi_1 = 0$). Hal ini berarti bahwa masuknya Moda 2 mempengaruhi masuknya Moda 3 ke Indonesia. Koefisien ECT dengan variabel terikat Moda 3 ini sebesar -0,823750 yang berarti bahwa perubahan nilai Moda 3 yang disebabkan oleh perubahan nilai Moda 2 adalah sebesar 82,24% per tahun. Besarnya nilai koefisien ECT ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh variabel Moda 3 untuk mencapai keseimbangan yang disebabkan oleh perubahan nilai Moda 2 apabila terjadi gangguan akan semakin cepat. Namun demikian, nilai prob. pada

uji koefisien ECT (φ_2) untuk variabel terikat Moda 2 lebih besar dari 5% yang berarti bahwa menerima hipotesis nol ($\varphi_2 = 0$). Hal ini berarti masuknya Moda 3 tidak signifikan mempengaruhi masuknya Moda 2 ke Indonesia. Dengan kata lain, masuknya FDI di jasa hotel dan restoran ke Indonesia tidak signifikan mendorong datangnya wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam jangka panjang. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013) yang menemukan bahwa terdapat hubungan dua arah antara kedua variabel yaitu kedatangan wisatawan mancanegara mendorong FDI di jasa hotel dan restoran dan sebaliknya. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena penelitian Samimi, Sadeghi &

Sadeghi (2013) menggunakan data negara-negara dengan karakteristik yang berbeda-beda sedangkan pada kasus ini secara khusus menggunakan data dari provinsi-provinsi Indonesia yang berkontribusi besar terhadap kedatangan wisatawan mancanegara dan memiliki aktifitas pariwisata dan bisnis yang tinggi. Untuk kasus ini, dapat diketahui bahwa investor asing lebih melihat potensi pasar Indonesia dalam hal ini jumlah konsumen

potensial (wisatawan mancanegara) sebelum menanamkan Modalnya di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Samimi, Sadeghi & Sadeghi (2013) tersebut dan penelitian Alam, *et. al.* (2015) yang menemukan bahwa jumlah kedatangan wisatawan manca negara mempengaruhi masuknya FDI ke Malaysia. Bentuk hubungan jangka panjang satu arah antara Moda 2 dan Moda 3 ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi Hubungan Kausalitas Jangka Panjang antara Moda 2 dan Moda 3 dalam Perdagangan Internasional di Jasa Pariwisata

Pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian kausalitas gabungan antara jangka pendek dan jangka panjang. Pengujian ini dilakukan

untuk mengetahui apakah variabel Moda 2 kuat mempengaruhi variabel Moda 3. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Pengujian Gabungan antara Kausalitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dependent Variabel	Δ Moda 2 ECT (-1)	Δ Moda 3 ECT (-1)
Δ Moda 2	-	1,312600 (Prob. 0,2767)
Δ Moda 3	8,164362 (Prob. 0,0007)	-

Sumber: data diolah

Keterangan: semua nilai dalam tabel adalah F-statistik.

Nilai prob. dari hasil pengujian koefisien Θ_1 dan φ_1 (gabungan variabel Δ Moda 2 dan variabel ECT(-1)) adalah sebesar 0,0007 atau lebih kecil dari 5%. Hal ini berarti bahwa Moda 2 kuat mempengaruhi masuknya Moda 3 ke Indonesia. dengan kata lain kedatangan wisatawan mancanegara kuat berpengaruh pada masuknya FDI di jasa hotel dan restoran. Samimi *et al.* (2013) juga menemukan bahwa kedatangan wisatawan manca negara secara kuat berpengaruh terhadap masuknya FDI di jasa hotel dan restoran. Apabila terjadi *shock* dalam sistem maka variabel-variabel akan melakukan penyesuaian jangka pendek untuk mengembalikan keseimbangan jangka panjang (Samimi, Sadeghi & Sadeghi, 2013).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Indonesia telah mengizinkan kepemilikan Modal mayoritas (maksimum 51%) bagi negara-negara ASEAN pada jasa hotel dan restoran di daerah penelitian (Provinsi Bali, Provinsi DKI. Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara). Daerah-daerah ini telah mewakili sebesar 81,26% dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan sebesar 68% dari total FDI pada sektor ini di Indonesia pada tahun 2014.

Pengujian hubungan kausalitas antara Moda 2 dan Moda 3 di mulai dari pengujian stasioneritas dengan *unit root* sampai pengujian kausalitas dengan VECM *Granger*. Pengujian *unit root* menghasilkan bahwa kedua variabel

(Moda 2 dan Moda 3) stasioner pada *first differferent*. Pada pengujian ko-integrasi diketahui terdapat hubungan ko-integrasi antara variabel Moda 2 dan Moda 3. Hasil pengujian hubungan kausalitas jangka pendek adalah kedua variabel tidak saling berhubungan dalam jangka pendek (menerima Hipotesis 0). Pada pengujian kausalitas jangka panjang ditemukan bahwa kedua variabel memiliki hubungan satu arah yaitu variabel Moda 2 mempengaruhi variabel Moda 3 tetapi variabel Moda 3 tidak mempengaruhi variabel Moda 2. Hal ini berarti bahwa masuknya FDI di Jasa Hotel dan Restoran dipengaruhi oleh jumlah kedatangan wisatawan mancanegara tetapi kedatangan wisatawan mancanegara tidak dipengaruhi oleh masuknya FDI di jasa hotel dan restoran dalam jangka panjang. Hasil pengujian kausalitas jangka panjang ini diperkuat oleh hasil pengujian hubungan kausalitas *Granger* gabungan antara jangka pendek dengan jangka panjang yaitu variabel Moda 3 kuat dipengaruhi oleh variabel Moda 2.

Walaupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDI di jasa hotel dan restoran tidak signifikan mempengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara, tetapi FDI menjadi penting untuk meningkatkan produktifitas pariwisata (Peric & Radic, 2015). Artinya terdapat dampak penting lainnya dari masuknya FDI. Oleh karena kedatangan wisatawan mancanegara signifikan berpengaruh terhadap FDI di jasa hotel dan restoran maka pengembangan dan promosi pariwisata yang mendorong masuknya wisatawan manca negara perlu

dilakukan. Pengembangan pariwisata ini juga mendorong masuknya FDI (Isik, 2015).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Daru Kurniawan dari Badan Koordinator Penanaman Modal yang memberikan data investasi dan kepada Bapak Miftah Farid yang telah membantu menyusun model ekonometrika. Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional serta Kepala Bidang Kerjasama Multilateral dan Kepala Sub-bidang Jasa, HKI dan Isu Baru, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., O.M. Malik, M. Ahmed, dan K. Gaadar. (2015). *Empirical Analysis of Tourism as a Tool to Increase Foreign Direct Investment in Developing Country: Evidence from Malaysia*. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6 (4), 201-206.
- ASEAN Secretariat. (2014). *Annexes to the Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Diunduh 24 Juli 2014 dari [http://www.asean.org/news/item/member-countries-horizontal-commitments-schedules-of-specific-commitments-](http://www.asean.org/news/item/member-countries-horizontal-commitments-schedules-of-specific-commitments-and-the-list-of-most-favoured-nation-exemptions)
- [and-the-list-of-most-favoured-nation-exemptions](http://www.asean.org/news/item/member-countries-horizontal-commitments-schedules-of-specific-commitments-and-the-list-of-most-favoured-nation-exemptions).
- Athanasios, V. dan A. Antonios. (2010). *The Effect of Stock and Credit Market Development on Economic Growth an Empirical Analysis for Italy*. International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 41.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2015). Diunduh 20 Oktober 2014 dari http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal/biumum/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hDAwNPJydDRwN3U1MTA0fEGOvYDcXYwMDQ_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAkmxVPg!!!dI3/d3/L2dJQS_EvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMTAwSUJCMUEwRzU1NDBBT1QzSINGRDMwMDE!
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 1997-2014. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1387>
- Bank Indonesia (BI). (2015). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Diunduh 20 Oktober 2014 dari <http://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspx>.
- Eslamloueyan, K., dan Z. Jokar. (2014). *Energy Consumption and Economic Growth in the Middle East and North Africa: A Multivariate Causality Test*. Iranian Journal of Economic Research. Vol. 18 (57), pp. 27-46.
- Gujarati, D.N. (2003). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, P. (2010). *Analisis Kausalitas dan Kointegrasi Antara Jumlah Uang*

- Beredar, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonom, Vol 13. (1), 27-35.
- Isik, M. (2015). *Foreign Direct Investment in Tourism: Panel Data Analysis of D7 Countries*. Athens Journal of Tourism. Vol. 2 (2), 93-103.
- Ivanovic, Z., S. Baresa, and S. Bogdan. (2011). *Influence of FDI on Tourism in Croatia*. UTMS Journal of Economics. Vol. 2 (1), 21-28.
- Jumpstart. (2008). Five A's of Tourism. Diunduh 11 April 2016 dari http://www.tourism.wa.gov.au/jumpstartguide/pdf/Quickstart_five%20A's%20of%20TourismLOW.pdf.
- Kao, C. (1999). *Spurious Regression and Residual-based Tests for Cointegration in Panel Data*. Journal of Econometrics, Vol. 90 (1), pp. 1–44.
- Lumaksono, A., D.S. Priyarsono, Kuntjoro, dan R. Heriawan. (2012). *Dampak Ekonomi Pariwisata Internasional Pada Perekonomian Indonesia*. Forum Pascasarjana Vol. 35 (1), 53-68.
- Nurrohim, M. (2013). *Analisis Kausalitas Volatilitas Nilai Tukar Mata Uang Dengan Kinerja Sektor Keuangan Dan Sektor Rill*. Economics Development Analysis Journal. Vol. 2 (4), 351-366.
- Pedroni, P. (1999). *Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors*. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, pp. 653–70.
- Peric, J. dan M.N. Radic. (2015). *Tourism Productivity and Tourism FDI in Croatia*. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6 (5), 425-433.
- Safitriani, S. (2014). *Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8 (1), pp. 93-116.
- Samimi, A. J., S. Sadeghi and S. Sadeghi. (2013). *The Relationship between Foreign Direct Investment and Tourism Development: Evidence from Developing Countries*. Institutions and Economies Vol. 5 (2), 59-68.
- Srivastava, A. (2015). *Exploring the Determinants of India's Intra-Industry Trade: A Panel VAR/VECM Approach*. IJCEM International Journal of Computational Engineering & Management, Vol. 18 (3), pp. 2230-7893.
- World Trade Organization (WTO). (2001). *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services (Document S/L/92)*. (Geneva: WTO Secretariat), 3-13.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

PENENTUAN NEGARA PRIORITAS PENGEMBANGAN ATDAG DAN ITPC MELALUI METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS

Determining Priority Development Countries of ATDAG and ITPC Using Analytical Hierarchy Process

Hasni, Fitria Faradila

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat,
e-mail: hasni.melati@gmail.com

Naskah diterima: 01/12/2015 Naskah direvisi: 25/01/2016 Disetujui diterbitkan: 25/03/2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kriteria-kriteria penentuan negara prioritas untuk pengembangan Atase Perdagangan (Atdag)/*Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC), dan mengidentifikasi negara-negara prioritas untuk mengembangkan Atdag/ITPC yang sudah ada atau mendirikan Atdag/ITPC yang baru. Metode pengkajian yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Data sekunder bersumber dari BPS, *Fragile States Index*, *UN COMTRADE*, *World Bank* dan CEPII. Sedangkan data primer diperoleh dari kegiatan FGD dengan para pelaku ekspor, akademisi dan pejabat Disperindag Jakarta dan Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan dalam pemilihan negara prioritas Atdag dan ITPC secara berturut-turut adalah *country risk; commercial infrastructure; market growth; trade complementary index; market intensity; trade openness; dan trade cooperation*. Keberadaan Atdag dan ITPC sebagai perwakilan perdagangan berperan penting dalam peningkatan ekspor, sehingga perlu penguatan dan pengembangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan Atdag dan ITPC di 16 negara prioritas serta pembentukan Atdag dan atau ITPC baru di tiga negara prioritas, yaitu Myanmar, Swedia dan Austria.

Kata Kunci: Atdag, ITPC, AHP, Kriteria, Negara Prioritas

Abstract

This study aims to develop the main criteria to determine priority countries for new Trade Attaché/ITPC Representatives and to identify priority countries for further development of the Trade Attaché/ITPC Representatives. This study employs an Analytical Hierarchy Process (AHP) methodology. The secondary data were collected from the BPS, Fragile States Index, UN COMTRADE, World Bank and CEPII. The primary data were collected from qualitative research using Focus Group Discussion (FGD) with the stakeholders in Jakarta and Yogyakarta. The results showed that the main criteria for choosing countries for establishing Atdag and ITPC in sequence were country risk, commercial infrastructure, market growth, trade complementary index, market intensity, trade openness, and trade cooperation. The presence of Trade Attaché/ITPC Representative in many countries has an important role in increasing Indonesia's export. However, further efforts are required to strengthen their roles, particularly in 16 countries. This study recommends to establish trade attaché and or ITPC in three potential countries: Myanmar, Sweden and Austria.

Keywords: Trade Attaché, ITPC, AHP, Criteria, Priority Countries

JEL Classification: C82, F13, H30, O24

PENDAHULUAN

Peranan lembaga perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri khususnya Atase Perdagangan (Atdag) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) mutlak diperlukan dalam pencapaian target ekspor nasional. Lembaga perwakilan perdagangan ini mengemban tugas bukan hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan promosi, namun juga dalam kerjasama, fasilitasi perdagangan, pengamatan pasar, diplomasi, *business intelligence* serta penetrasi pasar untuk berbagai produk Indonesia ke berbagai negara tujuan ekspor. Keberhasilan para perwakilan perdagangan dalam meningkatkan kinerja ekspor secara tidak langsung memiliki kontribusi yang besar terhadap pencapaian target ekspor nasional.

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia telah memiliki 23 Atase Perdagangan dan 19 *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) yang tersebar di berbagai negara mitra dagang Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2014). Berbagai studi menunjukkan bahwa peran lembaga sejenis Atdag atau ITPC cukup efektif untuk meningkatkan ekspor suatu negara, sehingga program pemerintah dalam pengembangan perwakilan sangat dibutuhkan baik dalam bentuk penguatan yang sudah ada, maupun pembentukan Atdag atau ITPC baru.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, keberadaan Atdag dan

ITPC terbukti mampu meningkatkan ekspor. Secara teoritis, Biesebroeck et al. (2010) menyebutkan bahwa salah satu hambatan pasar yang dihadapi eksportir adalah besarnya *sunk costs* yang antara lain mencakup biaya untuk memperoleh informasi pasar yang spesifik, membangun jaringan distribusi, identifikasi pelanggan, dan memahami peraturan di negara importir. Peran ini akan lebih efektif dilakukan oleh lembaga sejenis Atdag atau ITPC. Adapun menurut Nguyen (2012), salah satu faktor yang menyebabkan eksportir gagal melakukan ekspor karena eksportir cenderung memasok produk dengan spesifikasi yang sama antar negara tujuan, padahal belum tentu setiap negara tujuan mempunyai permintaan yang sama. Informasi yang asimetrik mengenai permintaan pasar tersebut akan dapat diatasi melalui penempatan Atdag/ITPC di negara tujuan. Berdasarkan Yang et al. (2012), suatu perusahaan yang fokus menysasar negara lain akan terkendala dalam hal *social acceptance*, terutama dalam mencari informasi pasar di negara tujuan. Hal ini juga kerap mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Menurut Titus et al. (2013), negara berkembang membutuhkan *The Trade Promotion Organization* (TPO) untuk mengimplementasikan strategi promosi ekspor. Diplomasi perdagangan semakin tumbuh dalam kepentingan globalisasi dunia, namun masih jarang terdapat penelitian mengenai kegiatan

diplomata perdagangan Ruel & Visser (2012).

Dampak positif lembaga sejenis Atdag dan ITPC terhadap kinerja ekspor juga disampaikan oleh Kosteci dan Naray (2007). Secara empiris Martincus dan Carballo (2008) membuktikan dampak positif dari program promosi ekspor di Peru. Rose (2007) dalam kajiannya menunjukkan bahwa setiap penambahan satu kedutaan akan meningkatkan ekspor sebesar 6%-10%. Penelitian Kang (2011) menunjukkan bahwa setiap peningkatan anggaran untuk kantor perwakilan perdagangan sebesar 10% akan meningkatkan ekspor Korea Selatan sebesar 2,45%-6,34%. Selain itu, TPO juga dapat dimanfaatkan untuk promosi ekspor sektor jasa (Olaru, 2012).

Mengingat pentingnya peranan lembaga perwakilan perdagangan ini serta keterbatasan sumberdaya dan anggaran, pemerintah perlu membuat skala prioritas dalam pengembangan Atdag dan ITPC agar ekspor dapat meningkat secara efektif dan optimal.

Hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai skala prioritas dalam pengembangan Atdag dan ITPC. Penentuan Atdag maupun ITPC dilakukan berdasarkan usulan tanpa mepedulikan skala prioritasnya. Dengan demikian, adanya kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk pemilihan negara untuk Atdag dan ITPC, dapat membantu pemerintah dalam menyusun skala prioritas negara-negara prioritas untuk Atdag dan ITPC. Studi

sebelumnya, seperti oleh Martincus dan Carballo (2008) serta Rose (2007), bersifat global atau spesifik negara lain, namun tidak spesifik untuk Atdag dan ITPC. Sementara itu, studi oleh Ruël dan Zuiderma (2012) adalah studi kasus diplomat ekonomi untuk negara Belanda. Ferreira dan Teixeira (2011) disisi lain lebih menekankan analisis pada model kelembagaan yang efektif untuk peningkatan ekspor dengan kasus Portugal dan Irlandia. Meskipun demikian penelitian Justinek dan Sidej (2012) menyimpulkan bahwa sulit untuk mengukur secara langsung dukungan promosi ekspor terhadap peningkatan ekspor.

Berdasarkan hasil *Mapping Reposisi* Perwakilan Perdagangan RI di Luar Negeri dibandingkan dengan beberapa perwakilan luar negeri yang dimiliki beberapa negara tetangga, kemampuan Atdag dan ITPC masih lemah ditinjau dari jumlah dan kelengkapan operasional organisasi. Dari sisi sumber daya manusia masih sangat terbatas dengan jumlah rata-rata hanya 1 hingga 4 orang dan dari 23 Atdag yang ada, 21 diantaranya tidak memiliki *home staf* (Kementerian Perdagangan, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015), terdapat beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja ITPC dalam mempromosikan ekspor Indonesia. Kendala internal mencakup anggaran yang terbatas, kekurangan SDM dan hambatan koordinasi. Sementara kendala eksternal berasal

dari ketidaksiapan industri di Indonesia dan saluran distribusi ekspor karena infrastruktur logistik yang kurang memadai.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan studi ini ada dua yaitu mengembangkan kriteria-kriteria penentuan negara prioritas untuk pengembangan Atdag/ITPC dan mengidentifikasi negara-negara prioritas untuk mengembangkan atau mendirikan Atdag /ITPC yang baru. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah berupa negara yang diusulkan untuk pembukaan Atdag dan ITPC baru.

METODE

Data yang digunakan dalam analisis terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan FGD yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 dan Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2015 guna memperoleh bobot kriteria prioritas dan bobot negara prioritas. Peserta FGD adalah para

pelaku ekspor, akademisi dan pejabat Disperindag yang biasa menghadapi permasalahan ekspor di daerah. Sebelum dilakukan pembobotan terlebih dahulu dilakukan konfirmasi terhadap calon kriteria pemilihan negara yang diajukan. Hal ini untuk memastikan bahwa kriteria-kriteria pemilihan negara prioritas untuk pengembangan Atdag/ITPC dapat teridentifikasi secara komprehensif.

Negara yang digunakan dalam analisis AHP diseleksi melalui pangsa PDB minimal sebesar 0,5% dari total PDB dunia. Selain itu, negara-negara ASEAN juga diikutsertakan dalam analisis mengingat pada akhir 2015, Indonesia akan menghadapi MEA, sehingga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke sesama negara ASEAN, pembukaan Atdag dan ITPC di negara-negara ASEAN juga perlu dipertimbangkan. Dengan pendekatan tersebut, terpilih 39 negara yang akan dianalisis seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Negara Terpilih Untuk Analisis AHP

No	Negara	PDB 2013 (USD Triliun)
1	Amerika Serikat	16,768.1
2	RRT	9,469.1
3	Jepang	4,898.5
4	Jerman	3,636.0
5	Perancis	2,807.3
6	Inggris	2,523.2
7	Brazil	2,246.0
8	Rusia	2,096.8
9	Italia	2,072.0
10	India	1,876.8

No	Negara	PDB 2013 (USD Triliun)
11	Kanada	1,826.8
12	Australia	1,505.9
13	Spanyol	1,358.7
14	Korea Selatan	1,304.5
15	Meksiko	1,260.9
16	Belanda	853.8
17	Turki	820.0
18	Arab Saudi	748.5
19	Swiss	650.4
20	Argentina	610.3
21	Swedia	558.95
22	Nigeria	521.81
23	Polandia	517.71
24	Norwegia	512.58
25	Belgia	508.28
26	Austria	416.06
27	Uni Emirat Arab	402.34
28	Thailand	387.25
29	Kolombia	378.42
30	Iran	367.10
31	Afrika Selatan	350.80
32	Malaysia	313.16
33	Singapura	297.94
34	Pilipina	272.07
35	Vietnam	170.57
36	Myanmar	56.76
37	Brunei Darussalam	16.11
38	Kamboja	15.51
39	Laos	10.79

Sumber: World Bank, 2015

Setelah kriteria pemilihan negara ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pemberian penilaian prioritas atau pemberian skor/bobot untuk setiap elemen kriteria yang dipasang-pasangkan. Pemberian bobot tersebut

diberikan berdasarkan penilaian subyektif peserta diskusi. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti *Fragile States Index*, UN COMTRADE, World Bank, *Logistic Performance Index* serta BPS.

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Saaty (1987) merupakan salah satu instrumen yang dinilai cukup efektif dalam membantu para pemangku kebijakan untuk dapat menetapkan prioritas sehingga didapat keputusan terbaik. Metode AHP juga merupakan metode pengambilan keputusan yang paling banyak digunakan dan telah diaplikasikan dalam berbagai bidang.

Beberapa contoh penelitian yang menggunakan metode AHP antara lain Abu-Sarhan (2011) yang menerapkan metode AHP untuk menyeleksi sistem informasi terbaik untuk *Reengineering Projects*. Sementara di bidang ekologi, Barzekar *et al.* (2011) menyusun prioritas dan ranking indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan (*sustainability*) dari Ecotourism di Iran dengan menggunakan metode AHP; selanjutnya Chamodrakas *et al.* (2010), Chakraborty *et al.* (2011), Ngatawi dan Setyaningsih (2011), Ozkan *et al.* (2011) dan Mardhikawarih *et al.* (2012) menggunakan metode AHP untuk pemilihan *vendor* atau *supplier* terbaik. Di bidang pendidikan, Juliyanti (2011) menggunakan metode AHP untuk melakukan pemilihan guru berprestasi dan Setyawan (2014) dalam memutuskan lokasi investasi perumahan. Dalam bidang perdagangan dalam negeri, Prabowo (2014) menggunakan metode AHP untuk memilih komoditas

yang masuk dalam bahan pangan pokok prioritas.

Dalam AHP terdapat sekumpulan opsi alternatif yang akan dievaluasi dengan menggunakan beberapa variabel atau kriteria. Prinsip kerja AHP adalah berupa simplifikasi dari keputusan yang bersifat kompleks dan tidak terstruktur menjadi elemen-elemen (kriteria dan opsi alternatif). Elemen-elemen tersebut disusun secara hierarki untuk kemudian tingkat kepentingan setiap elemen diberikan skor atau bobot secara subyektif terkait tingkat prioritas dari suatu elemen secara relatif dibandingkan dengan elemen yang lain pada tingkatan yang sama dan juga terkait dengan elemen yang berada pada satu tingkat di atasnya (Marimin, 2004). Oleh karena itu, keandalan analisis dengan menggunakan metode AHP sangat bergantung pada persepsi subyektif manusia yang dianggap sebagai ahli representatif di bidangnya sebagai input utama dalam menentukan prioritas.

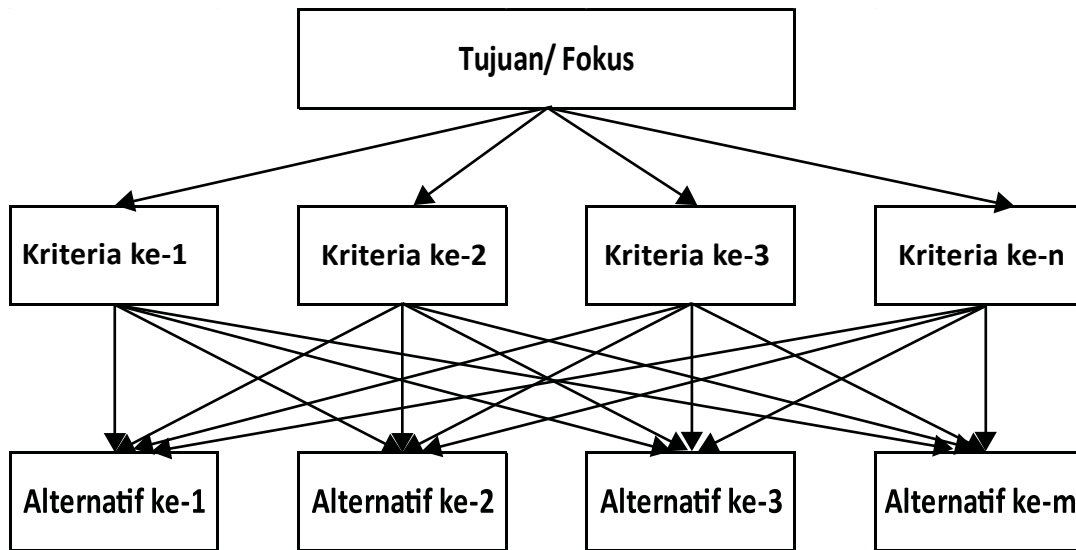
Dalam analisis AHP, tahapan-tahapan yang digunakan antara lain:

- a. *Decomposition*, setelah permasalahan didefinisikan, maka perlu dilakukan dekomposisi yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi beberapa unsur-unsur yaitu tujuan (*goal*) dari suatu kegiatan, perumusan kriteria (*criteria*) untuk memilih prioritas dan identifikasi pilihan-pilihan atau alternatif (*options*).
- b. *Comparatif Judgement*, prinsip ini berarti membuat penilaian prioritas antara 2 elemen yang dipasangkan

pada satu tingkatan tertentu berdasarkan atau berkaitan dengan tingkat yang terdapat di atasnya. Penilaian ini merupakan bagian yang paling penting dalam metode AHP. Hasil penilaian tersebut dapat disajikan melalui matrik *pairwise comparison*.

c. *Synthesis of Priority*, melakukan sintesis terhadap prioritas.

Struktur hirarki pada metode AHP dengan kriteria sebanyak n dan terdapat jumlah alternatif sebanyak m dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hirarki Pada Metode AHP

Sumber: Saaty (1987)

Metode AHP untuk Menentukan Negara Prioritas Pengembangan Atdag/ITPC

Pada pemilihan negara prioritas penempatan perwakilan perdagangan luar negeri baik untuk Atdag maupun ITPC, pemangku kebijakan dihadapkan dengan berbagai pertimbangan yang cukup rumit dan kompleks. Penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan negara prioritas pengembangan Atdag/ITPC juga berdasarkan pada tiga prinsip penting dasar dalam pemilihan prioritas yaitu *decomposition*, *comparatif judgement* dan *synthesis of priority*.

Decomposition (Dekomposisi Permasalahan)

Langkah pertama yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mendefinisikan masalah dan kemudian menterjemahkannya ke dalam beberapa elemen yaitu tujuan (*goal*) yang menjadi fokus utama. *Goal* ini akan menentukan kriteria yang digunakan dalam menentukan lokasi prioritas serta alternatif lokasi penempatan perwakilan perdagangan luar negeri. Fokus utama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kinerja ekspor non migas Indonesia.

Setelah fokus atau tujuan yang ingin dicapai telah didefinisikan, selanjutnya adalah menentukan kriteria pemilihan lokasi perwakilan perdagangan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk membuat proses AHP menjadi dapat dikelola (*managable*), maka alternatif (negara yang menjadi lokasi prioritas) serta kriteria pemilihan lokasi prioritas perlu untuk dibatasi mengingat jumlah negara yang cukup banyak. Negara yang akan dianalisis lebih lanjut dan menjadi alternatif lokasi prioritas bagi pendirian perwakilan perdagangan luar negeri dijaring atau diseleksi terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa indikator menjadi “*m*” negara prioritas. Indikator yang digunakan adalah negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) minimal 0,5% dari total PDB dunia.

Sementara itu, untuk kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi dibatasi hanya menjadi “*n*” kriteria yang diadopsi dari 7 kriteria yang digunakan dalam pengukuran *Market Potential Index* (Global EDGE, 2011), sementara “*n-7*” kriteria lainnya yang akan diperoleh dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta yaitu para pelaku ekspor, akademisi dan pejabat Disperindag setempat pada tanggal 28 April 2015 di Jakarta dan 20 Mei 2015 di Yogyakarta, sebagaimana berikut:

- a. *Partial Trade openness* menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara. Kriteria ini diukur dari rasio antara impor dengan GDP yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan perdagangan negara tersebut semakin terbuka, terutama dari sisi impor;
- b. *Trade Complementary Index* yaitu indeks yang mengukur kesesuaian ekspor Indonesia dengan impor negara tujuan. Indeks ini berkisar antara 0 sampai 100. Semakin mendekati angka 100, maka ekspor Indonesia semakin *match* (sesuai) dengan impor mitra dagangnya;
- c. *Market Growth Rate* adalah tingkat pertumbuhan pasar yang diukur dari besarnya peningkatan permintaan rata-rata impor selama lima tahun terakhir. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar pertumbuhan pasar di negara tersebut;
- d. *Market Intensity* adalah kemampuan daya beli yang diukur dengan besarnya pangsa belanja sektor swasta (investasi dan konsumsi) dalam GDP. Kisaran nilai untuk kriteria ini yakni 0 hingga 100. Semakin tinggi angka tersebut, mengindikasikan semakin besar daya beli negara tersebut;
- e. *Commercial Infrastructure* yang diukur dengan *Logistic Performance Index* (LPI) menunjukkan tingkat pemakaian infrastruktur komersil suatu negara. Kriteria ini berkisar pada angka 1 hingga 5. Semakin mendekati 5, semakin bagus infrastruktur negara tersebut;
- f. *Country Risk* (resiko pasar) adalah faktor resiko investasi, penetrasi pasar yang telah dilakukan pemerintah yang diukur dengan *Fragile State Index*. Nilai kriteria *Country Risk* berkisar antara 0 sampai 120. Semakin mendekati

angka 120, semakin beresiko tinggi untuk berinvestasi di negara tersebut;

g. *Trade Cooperation* yang diukur dengan ada tidaknya *Free Trade Agreement (FTA)*, *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Custom Union*, *Common Market* dan *Economic Community* antara Indonesia dengan negara tersebut. Urutan tingkat kerjasama paling tinggi adalah *Custom Union*, *Common Market* dan *Economic Community*; FTA dan PTA. Semakin terintegrasi bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan negara mitra dagang maka semakin tinggi skornya.

Beberapa kriteria penentuan negara prioritas diadopsi dari *Market Potential Index* yang disusun oleh *International Business Center* di *Michigan State University (MSU)* untuk mengukur dan mengurutkan potensi pasar dari negara-negara *emerging market*. Kriteria-kriteria tersebut antara lain *market growth rate*, *market intensity*, *commercial infrastructure*, dan *country risk*. Selain itu, beberapa kriteria lain seperti *trade openness*, *trade complementary index*, dan *trade cooperation* ditambahkan untuk melengkapi kriteria yang sudah ada. Penambahan kriteria tersebut terutama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayakawa *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa beberapa pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan lokasi/negara penempatan *export promotion agency (EPA)* antara

lain dengan melihat hubungan politik kedua negara (*geo-political*), faktor sosial-ekonomi suatu negara serta level perdagangan antara kedua negara.

Comparatif Judgement

Setelah permasalahan telah berhasil didekomposisi, maka langkah selanjutnya adalah pemberian penilaian prioritas atau pemberian skor/bobot untuk setiap elemen (kriteria dan alternatif negara) yang dipasang-pasangkan. Pemberian bobot tersebut diberikan berdasarkan penilaian subyektif dari para ahli dengan mempertimbangkan tujuan (*goal*) dan fokus yang hendak dicapai yaitu peningkatan ekspor non migas Indonesia.

Namun demikian, beberapa penelitian seperti Bourgeois (2005) dan Susila & Munadi (2007) menyebutkan bahwa pemberian skor secara *reciprocals* tersebut dinilai kurang logis karena perbedaan skor antara elemen satu dan yang lain yang diperbandingkan cukup besar. Skala penilaian yang ditawarkan oleh Bourgeois (2005) adalah dari 0,2 sampai dengan 1,8 dan dinilai lebih logis karena jarak yang tidak terlalu jauh. Tabel 2 berikut menyajikan skor penilaian menurut Bourgeois (2005). Oleh karena itu, kajian ini menggunakan skor pembobotan yang diperkenalkan oleh Bourgeois (2005) sehingga didapatkan hasil yang relatif lebih valid dan logis.

Tabel 2. Skor Penilaian Kriteria

Hasil Penilaian	Nilai A	Nilai B
A jauh lebih disukai dari B	1.4	0.6
A sedikit lebih disukai dari B	1.2	0.8
A sama dengan B	1	1
A sedikit kurang disukai dari B	0.8	1.2
A jauh kurang disukai dari B	0.6	1.4

Sumber: Bourgeois (2005)

Dengan menggunakan skor kriteria dapat disusun sebagai berikut penilaian seperti pada Tabel 1, maka (Tabel 3): matriks *pairwise comparison* untuk “n”

Tabel 3. Matriks *Pairwise Comparison* untuk “n” Kriteria

Kriteria	C_1	C_2	C_3	...	C_n	Jumlah	Bobot
C_1	-	C_{12}	C_{13}	...	C_{1n}	C_1	$bc_1 = C_1 / C$
C_2	C_{21}	-	C_{23}	...	C_{2n}	C_2	$bc_2 = C_2 / C$
C_3	C_{31}	C_{32}	-	..	C_{3n}	C_3	$bc_3 = C_3 / C$
...	-
C_n	C_{41}	C_{42}	C_{43}	...	C_{nn}	C_4	$bc_n = C_n / C$
Jumlah	$C_{.1}$	$C_{.2}$	$C_{.3}$...	$C_{.n}$	C	

Keterangan:

C_{ij} : hasil penilaian/perbandingan antara kriteria i dengan j; C_i : merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki kriteria ke i; C : penjumlahan semua nilai C_i ; BC_i : Bobot kriteria ke i diperoleh dengan membagi nilai C_i dengan C.

Setelah didapatkan skor penilaian untuk kriteria evaluasi, kemudian dilakukan skor penilaian terhadap “m” alternatif negara prioritas berdasarkan “n” kriteria. Pembobotan dilakukan dengan cara yang sama yaitu membuat

matrik *pairwise comparison* untuk tiap pasangan alternatif berdasarkan tiap-tiap “n” kriteria. Tabel 4 mengilustrasikan matrik perbandingan antar negara alternatif untuk kriteria satu (C_1).

Tabel 4. Pairwise Comparison untuk “m” Alternatif Negara Prioritas Berdasarkan Kriteria 1

Kriteria 1 (C1)	A1	A2	A3	...	Am	Jumlah	Bobot
A1	-	A12	A13	...	A1m	A1.	ba11=a1./a
A2	A21	-	A23	...	A2m	A2.	ba21=a2./a
A3	A31	A32	-	...	A3m	A3.	ba31=a3./a
...	-
Am	A41	A42	A43	...	Amm	A4.	bam1=am./a
Jumlah	A.1	A.2	A.3	...	A.m	A	

Keterangan:

A_{ij} : hasil penilaian/perbandingan antara alternatif i dengan j berdasarkan kriteria 1; A_i : merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki alternatif ke-i; A : penjumlahan semua nilai A_i ; BA_{ij} : Bobot alternatif ke-i berdasarkan kriteria ke-j diperoleh dengan membagi nilai A_{ij} dengan A .

Synthesis of Priority

Sintesis prioritas dilakukan dengan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap alternatif negara untuk tiap-tiap kriteria setelah kriteria evaluasi telah diberikan bobot atau skor penilaian. Secara umum, sintesis prioritas dirumuskan Ngatawi & Setyaningsih (2011) adalah sebagai berikut:

$$bA_i = \sum_{j=1}^n bA_{ij} \times bC_j \quad 1, 2, \dots, m \dots (1)$$

Keterangan:

bA_i : Skor penilaian atau bobot alternatif ke-i

bA_{ij} : Skor penilaian atau bobot alternatif ke-i berdasarkan kriteria ke-j

bC_j : Skor penilaian atau bobot kriteria ke-j

Negara dengan peringkat tinggi akan diprioritaskan untuk dibuka Atdag atau ITPC baru, sementara kalau sudah ada dipertimbangkan untuk ditambah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Prioritas Dalam Menetapkan Negara untuk Atdag dan ITPC

a. Temuan di Jakarta

Berdasarkan hasil pembobotan kriteria prioritas negara terlihat bahwa **country risk** memiliki bobot paling besar, yaitu 0,188 dan menempati **urutan pertama**. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria utama yang perlu diperhatikan dalam memilih negara untuk membuka Atdag dan ITPC adalah negara dengan resiko politik dan resiko bisnis yang paling rendah. Pada **peringkat kedua**, kriteria yang penting dalam menyusun prioritas negara adalah **commercial infrastructure** yang memiliki bobot sebesar 0,167 (Tabel 5). Ekspor ke negara dengan infrastruktur yang memadai dinilai efektif dalam meningkatkan ekspor.

Kriteria *market growth* atau pertumbuhan pasar juga merupakan

kriteria penting meskipun bobotnya lebih rendah dari bobot kriteria *country risk* dan *commercial infrastructure*. Hal ini menggambarkan bahwa negara yang pertumbuhan impornya selama lima tahun terakhir cukup tinggi merupakan negara yang cocok bagi Indonesia untuk mengembangkan Atdag dan ITPC, namun harus didukung oleh resiko negara yang rendah dan infrastruktur yang baik.

Selanjutnya, kriteria kerjasama perdagangan dan *trade complementry index* berada pada prioritas keempat dan kelima dalam menentukan prioritas negara untuk mengembangkan Atdag dan ITPC. Kerjasama perdagangan dan kesesuaian antara barang yang diekspor Indonesia dengan barang yang diimpor oleh negara mitra dagang

masuk dalam kriteria pemilihan prioritas negara, namun masih kalah penting dari kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan.

Sementara itu, baik *market intensity* dan *trade openness* memiliki bobot yang sama, yaitu 0,118. Keduanya juga menjadi pilihan terakhir para peserta FGD sebagai kriteria penentuan prioritas negara. Semua negara sudah mengalami keterbukaan perdagangan sehingga peran *trade openness* sebagai salah satu kriteria dalam menentukan negara tempat pengembangan Atdag dan ITPC tidak terlalu penting. Selain itu, bagi kebanyakan pelaku usaha *trade openness* merupakan tugas pemerintah. Detail dari hasil pembobotan criteria prioritas negara hasil FGD di Jakarta diberikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pembobotan Kriteria Prioritas Negara hasil FGD di Jakarta

Kriteria	Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	Commercial Infrastructure	Country Risk	Trade Cooperation	Total	Bobot
<i>Trade Openness</i>	1	1.2	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	5.8	0.118
<i>Trade Complementary Index</i>	0.8	1	0.8	1.2	0.8	0.6	0.8	6	0.122
<i>Market Growth</i>	1.2	1.2	1	1.2	0.8	0.6	1.4	7.4	0.151
<i>Market Intensity</i>	1.2	0.8	0.8	1	0.6	0.6	0.8	5.8	0.118
<i>Commercial Infrastructure</i>	1.4	1.2	1.2	1.4	1	0.8	1.2	8.2	0.167
<i>Country Risk</i>	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1	1.4	9.2	0.188
<i>Trade Cooperation</i>	1.2	1.2	0.6	1.2	0.8	0.6	1	6.6	0.135
Total	8.2	8	6.6	8.2	5.8	4.8	7.4	49	1

Sumber: Hasil FGD

b. Temuan di Yogyakarta

Hasil FGD di Yogyakarta juga menunjukkan bahwa kriteria *country risk* unggul dibandingkan kriteria-kriteria yang lain. Bobot kriteria *country risk* sebesar 0,182 (Tabel 6). Dengan demikian, kriteria *country risk* secara konsisten dinilai sebagai kriteria yang paling penting dalam menentukan prioritas negara tempat Atdag dan ITPC akan dibuka atau dikembangkan.

Berbeda dari hasil FGD di Jakarta yang menempatkan *commercial infrastructure* sebagai kriteria penting setelah *country risk*, hasil di Yogyakarta menunjukkan bahwa *Trade Complementary Index* merupakan kriteria penting kedua setelah *country risk* dengan bobot sebesar 0,147. Kesesuaian pasar merupakan salah satu kriteria terpenting karena jika ada kesesuaian pasar berarti ada permintaan. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan ekspor di negara-negara yang impornya sesuai dengan produk ekspor Indonesia. Di negara-negara itulah, peran Atdag dan ITPC akan menjadi penting sehingga pengembangan pasar di negara-negara tersebut diperlukan.

Sementara itu, baik *market growth*, *market intensity*, dan *commercial*

infrastructure secara bersamaan memiliki bobot yang sama, yaitu sebesar 0,143 dan menempati prioritas ketiga sebagai kriteria dalam penyusunan prioritas negara pengembangan dan pembukaan Atdag dan ITPC. Menurut peserta FGD, infrastruktur merupakan cerminan dari pertumbuhan pasar di suatu negara sehingga keduanya sama penting dalam memilih negara untuk pengembangan dan pembukaan Atdag dan ITPC. *Market intensity* yang mengukur daya beli masyarakat juga salah satu kriteria penting meskipun bobotnya masih di bawah kriteria *country risk* dan *trade complementary index*.

Kriteria *trade openness* dan *trade cooperation* menempati urutan keempat dan kelima dengan bobot masing-masing sebesar 0,131 dan 0,110. Menurut peserta FGD, hampir seluruh negara sudah mengalami keterbukaan perdagangan sehingga peran kriteria tersebut dalam menentukan prioritas negara untuk pengembangan atdag dan ITPC sudah tidak terlalu penting. Sementara itu, kriteria *trade cooperation* bukanlah kriteria prioritas karena menurut peserta FGD *trade cooperation* merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi pasar yang masih tertutup (Tabel 6).

Tabel 6. Hasil Pembobotan Kriteria Prioritas Negara hasil FGD di Yogyakarta

Kriteria	Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	Commercial Infrastructure	Country Risk	Trade Cooperation	Total	Bobot
<i>Trade Openness</i>	1	1.2	0.8	0.8	1	0.6	1	6.4	0.131
<i>Trade Complementary Index</i>	0.8	1	1.2	1.2	1	0.6	1.4	7.2	0.147
<i>Market Growth</i>	1.2	0.8	1	0.8	1	0.8	1.4	7	0.143
<i>Market Intensity</i>	1.2	0.8	1.2	1	1	0.6	1.2	7	0.143
<i>Commercial Infrastructure</i>	1	1	1	1	1	0.8	1.2	7	0.143
<i>Country Risk</i>	1.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1	1.4	9	0.184
<i>Trade Cooperation</i>	1	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	1	5.4	0.110
Total	7.6	6.8	7	7	7	5	8.6	49	1

Sumber: Hasil FGD

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria yang dianggap penting adalah hambatan atau kriteria-kriteria yang sulit untuk dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Sebagai contoh, kriteria *country risk* atau resiko suatu negara seperti gejolak politik atau perang saudara yang terjadi di negara mitra dagang tidak dapat diintervensi oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga sulit mempengaruhi kinerja infrastruktur dan pertumbuhan negara mitra dagang. Dengan demikian, *commercial infrastructure* dan *market growth* juga termasuk dalam kriteria penting yang dipilih oleh peserta FGD.

Sebaliknya, kriteria-kriteria yang dianggap tidak penting adalah kriteria-kriteria yang tidak termasuk ke dalam hambatan. Bagi peserta FGD, keterbukaan perdagangan bukan

hambatan berarti bagi kinerja ekspor Indonesia. Saat ini, hampir semua negara sudah mengalami keterbukaan perdagangan. Sementara itu, untuk mengatasi tingkat perdagangan masih tertutup yang masih dialami oleh beberapa negara, Indonesia masih dapat melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan kerjasama perdagangan. Oleh karena itu, baik *trade openness* maupun *trade cooperation* masuk ke dalam kriteria yang dianggap kurang penting dalam menentukan negara prioritas pengembangan Atdag dan ITPC.

Dengan demikian urutan kriteria prioritas dalam pemilihan negara Atdag dan ITPC adalah 1) *country risk*; 2) *commercial infrastructure*; 3) *market growth*; 4) *trade complementary index*; 5) *market intensity*; 6) *trade openness*; dan 7) *trade cooperation*.

Prioritas Negara Pengembangan Atdag dan ITPC

Setelah kriteria untuk menyusun prioritas negara pengembangan Atdag dan ITPC diurutkan, maka tahap selanjutnya adalah perbandingan antar negara untuk setiap kriteria. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan penilaian terhadap setiap negara untuk masing-masing kriteria. Untuk tahap ini dilakukan proses FGD sebanyak dua kali yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Pada bagian ini akan dibahas tentang hasil analisis terkait dengan penilaian negara berdasarkan kriteria yang telah dibobot, dan sintesa penilaian negara prioritas.

a. Prioritas Negara Hasil FGD di Jakarta

Setelah semua peringkat negara berdasarkan tujuh kriteria telah dipaparkan, pembahasan dilanjutkan pada prioritas negara berdasarkan kriteria yang telah dibobot baik pada kegiatan FGD di Jakarta maupun Yogyakarta. Berdasarkan hasil FGD, negara yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan perwakilan dagangnya adalah Singapura, dengan nilai total kriteria terbobot sebesar 0,0313. Sementara Jepang dan Korea Selatan berada di prioritas kedua dan ketiga dengan nilai total kriteria terbobot yang sama yakni 0,0300 (Tabel 7).

Singapura juga menduduki tempat teratas untuk kriteria *Partial Trade Openness* dengan nilai 0,0046. Sementara itu, tiga negara yang menempati urutan nilai *Trade Complementary Index* terbobot tertinggi dengan Indonesia adalah Korea Selatan, Jepang dan Spanyol masing-masing dengan nilai 0,0043 (Tabel 7).

Dengan menggunakan kriteria *market growth*, Myanmar dan Brunei Darussalam menempati urutan pertama dengan nilai *market growth* yang sama yakni 0,0055. Untuk kriteria *market intensity*, Amerika Serikat menempati posisi teratas dengan nilai *market intensity* berbobot sebesar 0,0048.

Kriteria *Logistic Performance Index* (LPI) kembali menempatkan Amerika Serikat dengan nilai tertinggi yaitu 0,0052. Namun Amerika Serikat tidak sendirian, ada 16 negara lain yang memiliki nilai terbobot LPI sama dengan Amerika Serikat yaitu 0,0052. Dengan menggunakan *Country risk* sebagai kriteria penentuan negara prioritas, pada hasil FGD Singapura, Jepang, Korea Selatan dan 12 negara lainnya menduduki tempat teratas dengan nilai 0,0060. Sementara itu, terdapat sembilan negara yang menempati urutan nilai *Trade Cooperation* tertinggi dengan Indonesia diantaranya Singapura, Thailand dan Malaysia masing-masing dengan nilai 0,0049 (Tabel 7).

Tabel 7. Prioritas Negara Berdasarkan Kriteria yang Telah Dibobot (FGD Jakarta)

No	Negara	Partial Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	LPI	Country Risk	Trade Cooperation	Priority
	BOBOT	0.1184	0.1224	0.1510	0.1184	0.1673	0.1878	0.1347	
1	Singapura	0.0046	0.0037	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0049	0.0313
2	Jepang	0.0027	0.0043	0.0040	0.0035	0.0052	0.0060	0.0042	0.0300
3	Korsel	0.0033	0.0043	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0042	0.0300
4	Amerika Serikat	0.0027	0.0030	0.0040	0.0048	0.0052	0.0060	0.0028	0.0286
5	Belgia	0.0046	0.0030	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0286
6	Australia	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0042	0.0282
7	Belanda	0.0033	0.0037	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0272
8	Kanada	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0268
9	Thailand	0.0033	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0049	0.0267
10	Malaysia	0.0033	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0049	0.0267
11	Perancis	0.0027	0.0037	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0266
12	Austria	0.0033	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0266
13	RRT	0.0027	0.0030	0.0040	0.0042	0.0044	0.0041	0.0042	0.0266
14	Spanyol	0.0027	0.0043	0.0032	0.0029	0.0052	0.0051	0.0028	0.0263
15	Myanmar	0.0033	0.0037	0.0055	0.0029	0.0027	0.0032	0.0049	0.0262
16	Uni Emirat Arab	0.0040	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0051	0.0028	0.0262
17	Jerman	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0260
18	Inggris	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0260
19	Swedia	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0260
20	Vietnam	0.0040	0.0024	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0049	0.0258
21	Italia	0.0027	0.0037	0.0032	0.0029	0.0052	0.0051	0.0028	0.0257
22	Polandia	0.0033	0.0030	0.0040	0.0029	0.0044	0.0051	0.0028	0.0256
23	Laos	0.0033	0.0037	0.0048	0.0029	0.0027	0.0032	0.0049	0.0254
24	Swiss	0.0027	0.0024	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0254
25	Norwegia	0.0027	0.0024	0.0032	0.0029	0.0052	0.0060	0.0028	0.0254
26	Brunei Darussalam	0.0027	0.0024	0.0055	0.0029	0.0027	0.0041	0.0049	0.0253
27	India	0.0027	0.0037	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0042	0.0252
28	Kamboja	0.0033	0.0024	0.0048	0.0029	0.0035	0.0032	0.0049	0.0250
29	Pilipina	0.0027	0.0037	0.0040	0.0029	0.0035	0.0032	0.0049	0.0249
30	Afrika Selatan	0.0027	0.0037	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0028	0.0246
31	Argentina	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0035	0.0051	0.0028	0.0241
32	Turki	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0044	0.0041	0.0028	0.0234
33	Brazil	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0028	0.0231
34	Meksiko	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0028	0.0225
35	Arab Saudi	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0035	0.0041	0.0028	0.0225
36	Nigeria	0.0027	0.0037	0.0032	0.0029	0.0035	0.0032	0.0028	0.0220
37	Rusia	0.0027	0.0024	0.0040	0.0029	0.0027	0.0041	0.0028	0.0217
38	Kolombia	0.0027	0.0030	0.0040	0.0029	0.0027	0.0032	0.0028	0.0213
39	Iran	0.0027	0.0030	0.0032	0.0029	0.0027	0.0032	0.0028	0.0205

Sumber: Hasil Analisis FGD

b. Prioritas Negara Hasil FGD di Yogyakarta

Pada hasil FGD yang dilaksanakan di Yogyakarta, Singapura masih bertahan di posisi teratas dengan nilai total terbobot dari 7 kriteria sebesar 0,0311. Demikian juga dengan negara prioritas kedua dan ketiga tidak berbeda dengan hasil pada diskusi terbatas, dimana Jepang dan Korea Selatan berada di posisi tersebut dan nilai total yang sama juga dengan diskusi terbatas yakni 0,0300. Pada kriteria *Partial Trade Openness* Singapura dan Belgia paling unggul dengan nilai terbobot 0,0050. Sementara untuk kriteria *Trade Complementary Index*, negara dengan nilai tertinggi yang sudah dibobot untuk kriteria TCI adalah Jepang, Korsel dan Spanyol, masing-masing dengan nilai TCI terbobot 0,0051. Sedangkan untuk

kriteria *market growth* Myanmar dan Brunei Darussalam menempati posisi teratas dengan nilai 0,0052.

Berdasarkan hasil FGD untuk nilai terbobot *market intensity*, Amerika Serikat berada di posisi teratas dengan nilai *market intensity* sebesar 0,0057. Sementara dari kriteria *Logistic Performance Index* pada FGD diperoleh hasil, Singapura dan 16 negara lain memiliki nilai LPI tertinggi dibanding negara lainnya yaitu 0,0045. Hasil FGD untuk *Country Risk* negara Singapura, Jepang, Korsel dan 12 negara lainnya berada di posisi teratas dengan nilai 0,0059. Sementara negara dengan nilai tertinggi untuk kriteria *Trade Cooperation* adalah Singapura, Thailand, Malaysia dan enam negara lainnya, masing-masing dengan nilai TCI 0,0040 (Tabel 8).

Tabel 8. Prioritas Negara Berdasarkan Kriteria yang Telah Dibobot (FGD Yogyakarta)

No	Negara	Partial Trade Openness	Trade Complementary Index	Market Growth	Market Intensity	LPI	Country Risk	Trade Cooperation	Priority
	BOBOT	0.1306	0.1469	0.1429	0.1429	0.1429	0.1837	0.1102	
1	Singapura	0.0050	0.0044	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0040	0.0311
2	Jepang	0.0030	0.0051	0.0038	0.0043	0.0045	0.0059	0.0034	0.0300
3	Korsel	0.0037	0.0051	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0034	0.0300
4	Amerika Serikat	0.0030	0.0036	0.0038	0.0057	0.0045	0.0059	0.0023	0.0289
5	Belgia	0.0050	0.0036	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0287
6	Australia	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0034	0.0278
7	Belanda	0.0037	0.0044	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0273
8	Perancis	0.0030	0.0044	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0267
9	Kanada	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0267
10	RRT	0.0030	0.0036	0.0038	0.0050	0.0037	0.0040	0.0034	0.0266
11	Austria	0.0037	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0266
12	Spanyol	0.0030	0.0051	0.0030	0.0036	0.0045	0.0050	0.0023	0.0265
13	Thailand	0.0037	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0040	0.0264
14	Malaysia	0.0037	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0040	0.0264
15	Uni Emirat Arab	0.0044	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0050	0.0023	0.0263
16	Myanmar	0.0037	0.0044	0.0052	0.0036	0.0023	0.0031	0.0040	0.0262
17	Jerman	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0259
18	Inggris	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0259
19	Swedia	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0259
20	Italia	0.0030	0.0044	0.0030	0.0036	0.0045	0.0050	0.0023	0.0257
21	Polandia	0.0037	0.0036	0.0038	0.0036	0.0037	0.0050	0.0023	0.0257
22	Vietnam	0.0044	0.0029	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0040	0.0256
23	Laos	0.0037	0.0044	0.0045	0.0036	0.0023	0.0031	0.0040	0.0255
24	India	0.0030	0.0044	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0034	0.0252
25	Swiss	0.0030	0.0029	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0252
26	Norwegia	0.0030	0.0029	0.0030	0.0036	0.0045	0.0059	0.0023	0.0252
27	Brunei Darussalam	0.0030	0.0029	0.0052	0.0036	0.0023	0.0040	0.0040	0.0250
28	Pilipina	0.0030	0.0044	0.0038	0.0036	0.0030	0.0031	0.0040	0.0248
29	Afrika Selatan	0.0030	0.0044	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0023	0.0248
30	Kamboja	0.0037	0.0029	0.0045	0.0036	0.0030	0.0031	0.0040	0.0247
31	Argentina	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0030	0.0050	0.0023	0.0243
32	Brazil	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0023	0.0233
33	Turki	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0037	0.0040	0.0023	0.0233
34	Meksiko	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0023	0.0226
35	Arab Saudi	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0030	0.0040	0.0023	0.0226
36	Nigeria	0.0030	0.0044	0.0030	0.0036	0.0030	0.0031	0.0023	0.0224
37	Rusia	0.0030	0.0029	0.0038	0.0036	0.0023	0.0040	0.0023	0.0218
38	Kolombia	0.0030	0.0036	0.0038	0.0036	0.0023	0.0031	0.0023	0.0216
39	Iran	0.0030	0.0036	0.0030	0.0036	0.0023	0.0031	0.0023	0.0209

Sumber: Hasil Analisis FGD

Berdasarkan sintesa hasil penilaian seluruh kriteria yang telah dibobot pada kegiatan FGD di Jakarta dan Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa negara Singapura, Jepang, Korea Selatan merupakan negara yang konsisten berada di tiga besar. Dengan demikian dapat disimpulkan ketiga negara tersebut dapat ditetapkan sebagai calon negara utama yang perlu dimaksimalkan peranan perwakilan dagangnya. Singapura menempati urutan teratas untuk kriteria *Partial Trade Openness* dan *Trade Cooperation*. Sementara Jepang berada di posisi kedua untuk kriteria *Trade Compelementary Index*,

LPI, dan *Country risk*, serta peringkat ketiga untuk kriteria *Market intensity*. Korea Selatan berada di posisi teratas untuk kriteria *Trade Compelementary Index*, artinya ekspor Korea Selatan ke Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan impor Indonesia, sedangkan pada kriteria *LPI* dan *Country risk* Korea Selatan menempati peringkat ketiga. Dari 39 negara yang dianalisis pada dua kegiatan FGD untuk menentukan negara prioritas pengembangan pembukaan perwakilan dagang, diperoleh hasil akhir 19 negara tersebut di Tabel 9. merupakan prioritas utama untuk dikembangkan perwakilan dagangnya.

Tabel 9. Negara 20 Besar Prioritas

No	Negara	Atase Perdagangan	ITPC
1	Singapura	1	-
2	Jepang	1	1
3	Korsel	1	1
4	Amerika Serikat	1	2
5	Belgia	1	-
6	Australia	1	1
7	Belanda	1	-
8	Perancis	1	1
9	Kanada	1	1
10	RRT	1	1
11	Austria	-	-
12	Spanyol	1	1
13	Thailand	1	-
14	Malaysia	1	-
15	Uni Emirat Arab	1	1
16	Myanmar	-	-
17	Jerman	1	1
18	Inggris	1	-
19	Swedia	-	-

Sumber: Hasil Analisis

Dari 19 negara yang konsisten berada di 20 besar pada hasil diskusi di Jakarta dan Yogyakarta terdapat tiga negara yang sama sekali belum memiliki perwakilan dagang RI di negara tersebut yaitu Austria, Myanmar dan Swedia. Dengan demikian pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan Atdag dan atau ITPC di ketiga negara tersebut. Sementara negara yang hanya memiliki Atase Perdagangan saja, namun tidak memiliki perwakilan untuk ITPC ada enam yaitu Singapura, Belgia, Belanda, Thailand, Malaysia dan Inggris. Sementara negara yang memiliki ITPC namun tidak memiliki Atase Perdagangan, ternyata tidak ada pada 19 negara terpilih tersebut. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang memiliki Atase Perdagangan RI dan dua ITPC yang berada di Los Angeles dan Chicago.

Berdasarkan sintesa prioritas negara pengembangan perwakilan perdagangan, diperoleh hasil bahwa negara prioritas yang belum terdapat perwakilan perdagangan, sehingga diusulkan untuk didirikan Atase Perdagangan (Atdag) dan atau ITPC ada tiga (3) negara yaitu Austria, Myanmar dan Swedia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Urutan kriteria prioritas yang utama untuk membuka perwakilan perdagangan adalah: 1) *country risk*; 2) *commercial infrastructure*; 3) *market growth*; 4) *trade complementary index*; 5) *market intensity*; 6) *trade openness*; dan 7) *trade cooperation*.

Urutan sepuluh besar negara prioritas pengembangan Atdag dan ITPC antara lain: 1) Singapura, 2) Jepang, 3) Korea Selatan, 4) Amerika Serikat, 5) Belgia, 6) Australia, 7) Belanda, 8) Perancis, 9) Kanada, dan 10) RRT. Sebagian besar negara yang menjadi prioritas untuk pengembangan perwakilan perdagangan telah memiliki paling tidak satu perwakilan perdagangan.

Pengembangan perwakilan perdagangan dapat dilakukan dengan penguatan Atdag dan atau ITPC yang sudah ada, dan pembentukan Atdag dan atau ITPC baru. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Atdag dan atau ITPC di tiga negara prioritas yang belum memiliki Atdag dan ITPC yaitu Myanmar, Swedia dan Austria.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dan Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (Puska Daglu), Kementerian Perdagangan yang mengizinkan penulis untuk menggunakan hasil kajiannya untuk dipublikasikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan tim dari Bidang ekspor yang memiliki andil besar dalam penyelesaian kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abu-Sarhan, Z. (2011). Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in The Evaluation and Selection of An

- Information System Reengineering Projects. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 11(1), 172–177.
- Barzekar, G., Aziz, A., Mariapan, M., Ismail, M. H., Hosseni, S. M. (2011). Using Analytical Hierarchy Process (AHP) for Prioritizing and Ranking of Ecological Indicators for Monitoring Sustainability of Ecotourism in Northern Forest, Iran. *Ecologia Balkanica*, 3(1), 59–67.
- Biesebroeck, J. V., Yu, E., Chen, S. (2010). The impact of trade promotion services on Canadian exporter performance pp 145-190. Diunduh dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1612209.
- Bourgeois, R. (2005). Analytical Hierarchy Process: an Overview, UNCAPSA-UNESCAP, Bogor.
- Chakraborty, T., Ghosh, T., Dan, P. K. (2011). Application of Analytic Hierarchy Process and Heuristic Algorithm in Solving Vendor Selection Problem. *Business Intelligence Journal*, 4(1), 167–177.
- Chamodrakas, I., Batis, D., Martakos, D. (2010). Supplier Selection in Electronic Marketplaces Using Satisficing and Fuzzy AHP. *Expert Systems with Applications*, 37(1), 490–498.
- Ferreira, M. I. V., Teixeira, A. A. (2011). Organizational Characteristics and Performance of Export Promotion Agencies: Portugal and Ireland compared. Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto. Diunduh dari <http://ideas.repec.org/p/por/fepwps/424.html>.
- Global EDGE. (2011). Market Potential Index (MPI). Diunduh dari <http://globaledge.msu.edu/mpi>.
- Hayakawa, K., H.H. Lee, D. Park. (2011). Do Export Promotion Agencies Promote Exports? *IDE Discussion Paper No. 313*.
- Juliyanti, M.I. Irawan, I. Mukhlash. (2011). Pemilihan Guru Berprestasi Menggunakan Metode AHP dan Topsis. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 63-68.
- Justinek, G., Sedej, T. (2012) Measuring Export Support Performance in Slovenia. *International Journal of Diplomacy and Economy*, 1(1): 80-94.
- Kang, K. (2011). Overseas Network of Export Promotion Agency and Export Performance: The Korean Case. *Contemporary Economic Policy*, 29(2), 274–283.
- Kementerian Perdagangan. (2014). Menuju Ekspor 300 Persen di Tahun 2019. Term of Reference.
- Kementerian Perdagangan. (2014). Mapping Reposisi Perwakilan Perdagangan Luar Negeri.
- Kostecki, M., Naray, O. (2007). Commercial Diplomacy and International Business. Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'.
- Maharani, P. (2015). Commercial Diplomacy on Export Performance Case Study of Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC). Fulfillment of the requirements for obtaining the degree of Master of

- Arts In Development Studies, Institute of Social Studies, The Netherlands.
- Mardhikawarih, D. A., W.A. Jauhari, C.N. Rosyidi. (2012). Pemilihan Pemasok Drum Pelumas Industri Menggunakan Fuzzy Analytical Hierarchy Process. *Performa*, 11 (1), 67 – 74.
- Marimin. (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Grasindo, Jakarta.
- Martincus, C. V., Carballo, J. (2008). Is Export Promotion Effective in Developing Countries? Firm-Level Evidence on The Intensive and The Extensive Margins of Exports. *Journal of International Economics*, 76(1), 89–106.
- Ngatawi, I. Setyaningsih. (2011). Analisis Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 10 (1), 7-13.
- Nguyen, D. X. (2012). Demand uncertainty: Exporting delays and exporting failures. *Journal of International Economics* 86(1), 336-344.
- Olaru, O. L., Olaru, L. I. (2012). Promotion Techniques in Services Exports. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(1), 143-148.
- Ozkan, B., Basligil, H., Sahin, N. (2011). Supplier Selection Using Analytic Hierarchy Process: An Application From Turkey. *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*, 2191. Diunduh dari http://www.iaeng.org/publication/WCE2011/WCE2011_pp1160-1165.pdf
- Pareja, S. G., R.L. Vivero, J.A.M. Serrano. (2008). Measuring The Impact Of Regional Export Promotion: The Spanish Case. *Papers in Regional Science*, 87(1), 139-146.
- Prabowo, D. W. (2014). Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process. *Buletin Ilmiah Perdagangan Vol 8*, No. 02 Desember 2014, 163-182.
- Rose, A. K. (2007). The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export Promotion. *The World Economy*, 30(1), 22–38.
- Ruel, H., Visser, R. (2012). Commercial diplomats as corporate entrepreneurs: explaining role behaviour from an institutional perspective. *International Journal of Diplomacy and Economy*, 1(1): 42-79.
- Ruël, H. J. M., Zuidema, L. (2012). The Effectiveness of Commercial Diplomacy; A Survey Among Dutch Embassies and Consulates. *Clingendael Discussion Papers Series*, (123), 1–54.
- Saaty, R. W. (1987). The Analytic Hierarchy Process—What It is and How It is Used. *Mathematical Modelling*, 9(3), 161–176.
- Setyawan, R.K. (2014). Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process dalam Pendukung Keputusan Investasi Perumahan berdasarkan Lokasi. Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika S-1 Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Susila, W. R., Munadi, E. (2007). Penggunaan Analytical Hierarchy Process untuk Penyusunan Prioritas Proposal Penelitian. *Informatika Pertanian*, 16(2), 983–998.

Titus, O. A., Samuel, D., Ajao, O. S. (2013). A Comparative Analysis of Export Promotion Strategies in Selected African Countries (South Africa, Nigeria and Egypt). *International Journal of Management Sciences*, 1(6), 204-211.

Yang, Z., Su, C., Fam, K. S. (2012). Dealing with Institutional Distances in International Marketing Channels: Governance Strategies That Engender Legitimacy and Efficiency. *Journal of Marketing*, 76(3), 41-55.

PROYEKSI EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA: SUATU PENDEKATAN *VECTOR AUTOREGRESSIVE*

The Projection of the Indonesia's Export and Import: A Vector Autoregressive Approach

Aditya Paramita Alhayat, Azis Muslim

¹⁾²⁾Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat,
e-mail: Aditya.alhayat@kemendag.go.id

Naskah diterima: 10/07/2015 Naskah direvisi: 11/11/2015 Disetujui diterbitkan: 25/03/2016

Abstrak

Proyeksi ekspor dan impor Indonesia memiliki urgensi penting sebagai salah satu acuan untuk merumuskan target pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun proyeksi ekspor dan impor nasional periode 2015-2019 yang dilihat berdasarkan sektor migas dan non migas. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi eksternal, *Vector Autoregression* (VAR) digunakan untuk memberikan perkiraan besaran pertumbuhan ekspor dan impor di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa datang pertumbuhan ekspor Indonesia masih dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto negara-negara mitra utama sedangkan impor lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi domestik. Hasil proyeksi VAR menunjukkan bahwa ekspor nasional pada 2015 turun sebesar 10,65% dan meningkat sebesar 1,06% di tahun 2019, sedangkan impor nasional tahun 2015 turun sebesar 10,02% dan meningkat sebesar 12,11% di tahun 2019. Apabila pemerintah ingin menetapkan target ekspor lebih tinggi dari angka tersebut, maka usaha peningkatan ekspor harus ditopang dengan perbaikan sisi penawaran, dan target impor yang lebih rendah dapat dicapai dengan pengetatan konsumsi migas.

Kata kunci: Proyeksi, Ekspor, Impor, VAR

Abstract

Export and import projection is one of the important activities to determine the target of economic growth in the National Medium-Term Development Plan (NMTDP). This study aims to set out the projections of national exports and imports during 2015-2019 according to oil and non-oil sectors. By considering some external factors, Vector Autoregression (VAR) is utilized to forecast the future growth of export and import. The results showed that the future growth of Indonesia's export was determined by Gross Domestic Product of trading partners, while the Indonesia's import was influenced by domestic economic factors. The national export in 2015 was projected to decline by 10.65% and to increase by 1.06% in 2019, while the national import was projected to decline by 10.02% in 2015 and increase by 12.11% in 2019. If the government intends to set the export target higher than the projection, the improvement on the supply side must be considered. Moreover, the lower import target could be achieved by tightening the oil and gas consumption.

Keywords: Projection, Export, Import, VAR

JEL Classification: C53, F14, F17, C5

PENDAHULUAN

Sasaran pembangunan perdagangan luar negeri yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia periode 2010-2014 adalah tumbuhnya ekspor non migas sebesar 7,0-8,0% pada 2010, dan kemudian secara bertahap meningkat menjadi sebesar 14,5-16,5% pada 2014 (Bappenas, 2010). Harapan meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas bisa dilakukan mengingat semakin besarnya jumlah permintaan dunia terhadap produk non migas ditambah dengan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, serta perbaikan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor non migas. Selain itu, perluasan komoditas non migas secara masif diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas serta keberagaman produk ekspor non migas Indonesia.

Target ekspor Indonesia semula diproyeksi tumbuh 13% pada 2012 menjadi senilai USD 230 miliar. Penetapan target ekspor tersebut didasari oleh kondisi kinerja ekspor Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012. Target ekspor yang telah disusun tersebut sulit untuk diwujudkan akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang dipicu oleh krisis Eropa dan belum pulihnya ekonomi Amerika Serikat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara lain termasuk negara berkembang seperti China, India, Brazil

dan *emerging market* lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya harga komoditas dunia yang berimplikasi pada melambatnya nilai ekspor Indonesia (Bappenas, 2010).

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2012 mencapai USD 190,0 miliar atau turun 6,6% (year-on-year, yoy), terdiri dari ekspor migas USD 37,0 miliar (turun 10,9%) dan non migas USD 153,1 miliar (turun 5,5%). Pada tahun selanjutnya di 2013, kondisi perekonomian dunia belum memperlihatkan dukungan perbaikan kinerja ekspor Indonesia. Realisasi ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2013 mencapai USD 182,5 miliar atau menurun sebesar 3,9% (yoy) dari tahun lalu. Penurunan ini terjadi karena tingginya penurunan ekspor migas yang mengalami penurunan signifikan sebesar 11,75% atau hanya menjadi USD 32,63 miliar, sementara ekspor non migas juga mulai mengalami penurunan sebesar 2,03%, menjadi USD 149,9 miliar (BI, 2013). Pencapaian kinerja ekspor tersebut, tentu saja, sulit untuk mendukung tercapainya target RPJMN 2010-2014. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan dan pelajaran dalam rangka menyusun RPJMN selanjutnya yaitu RPJM periode 2015-2019, sehingga target yang ditentukan tidak hanya dapat dicapai namun juga mampu merefleksikan kondisi yang sebenarnya.

Di sisi lain, realisasi impor tahun 2013 yang turun 2,64% menjadi sebesar USD 186,63 miliar juga merupakan

salah satu akibat dari melemahnya permintaan dunia yang disebabkan krisis di Uni Eropa dan belum stabilnya perekonomian di Amerika Serikat (BI, 2014). Kebutuhan impor khususnya barang modal menurun yang berakibat pada melemahnya kinerja ekspor. Di sisi lain, perkembangan investasi terus mengalami peningkatan, serta jumlah penduduk yang berkembang pesat akan mempengaruhi permintaan impor Indonesia, terutama pada sektor migas (BI, 2014).

Turunnya kemampuan ekspor yang disertai dengan pertumbuhan impor yang pesat akan menempatkan neraca perdagangan Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut tentu tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Menurunnya kinerja ekspor Indonesia akan berdampak pada produksi dan output industri dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini menegaskan pentingnya akselerasi industri manufaktur Indonesia mengingat sektor ini berkontribusi dominan terhadap total pembentukan nilai ekspor Indonesia.

Defisit neraca perdagangan yang terjadi pada 2012-2013 semakin menambah kekhawatiran akan hilangnya surplus perdagangan Indonesia. Sepanjang tahun 2013, neraca perdagangan Indonesia hampir selalu mengalami defisit, kecuali pada bulan Maret, Agustus, Oktober hingga Desember. Keadaan yang tidak jauh lebih baik pun sudah terlihat hingga akhir tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2015).

Relatif lemahnya daya saing produk agroindustri dan manufaktur Indonesia yang disertai dengan kondisi ekonomi eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global juga menyebabkan kerugian bagi ekonomi Indonesia melalui sektor perdagangan internasional. Kondisi di atas, tentu berlawanan dengan apa yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2010-2014.

Kajian yang bertujuan membuat target ekspor dan impor menjadi kegiatan yang penting dan strategis di tahun 2014. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan naskah akademis bagi penyusunan RPJMN 2015-2019 dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintahan baru. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas menyusun RPJMN dengan berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi Misi Presiden/Wakil Presiden terpilih.

Sebagai langkah awal dalam rangka persiapan melaksanakan amanat tersebut, Bappenas (2010) melakukan sebuah *background study* melalui proses teknokratik sebelum dikembangkan menjadi konsep awal RPJMN. *Background study* Bappenas disusun melalui proses teknokratik, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan didasari oleh data-data pencapaian riil yang telah ada sehingga prioritas-prioritas aktivitas pembangunannya realistis yang menjamin kesinambungan pembangunan.

Dengan adanya referensi ini, pemerintah dapat menggunakannya sebagai awal pijak dalam mengembangkan visi dan misinya. Lebih penting lagi, kajian proyeksi ekspor dan impor Indonesia diharapkan dapat bermanfaat untuk meneropong trend ekspor dan impor untuk lima tahun ke depan.

Ekspor suatu komoditi selain untuk memenuhi permintaan dalam negeri, penawaran suatu komoditas juga dimaksudkan untuk memenuhi permintaan masyarakat luar negeri. Penawaran ekspor suatu komoditi dari suatu negara merupakan selisih antara penawaran domestik dengan permintaan domestik. Di lain pihak, negara lain membutuhkan komoditi tersebut sebagai akibat dari kelebihan permintaan di negara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka teori penawaran ekspor bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ekspor suatu negara (Tokarick, 2014).

Permintaan ekspor suatu komoditi merupakan hubungan yang menyeluruh antara kuantitas komoditi yang akan dibeli konsumen selama periode tertentu pada suatu tingkat harga. Permintaan pasar suatu komoditi merupakan penjumlahan secara horizontal dari permintaan-permintaan individu suatu komoditi (Lipsey *et al*, 1995).

Dilihat dari segi permintaan, kegiatan ekspor diasumsikan sebagai fungsi permintaan pasar internasional terhadap suatu komoditi yang dihasilkan oleh suatu negara. Permintaan ekspor adalah permintaan pasar internasional/negara tertentu terhadap suatu komoditi.

Teori permintaan ekspor bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor suatu negara (Rahmaddi, 2012).

Kegiatan mendatangkan barang maupun jasa dari luar negeri dapat dipandang sebagai suatu fungsi permintaan. Oleh karena itu Indonesia yang juga melakukan impor baik terhadap barang-barang maupun jasa-jasa yang dihasilkan oleh negara lain, pada dasarnya juga telah melakukan suatu permintaan terhadap barang dan jasa tersebut.

Dalam suatu teori permintaan terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi impor sebagai fungsi permintaan (Siddique, 1997; Hameed, 2012) yang meliputi: harga, tingkat pendapatan, nilai tukar mata uang asing, selera (*taste*) dan harga barang-barang lain yang sejenis dan barang pelengkap (substitusi dan komplementer).

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang proyeksi perdagangan. Khan (2011) membandingkan dan mencari model proyeksi yang paling tepat dengan error paling minimum dalam memproyeksi impor di Bangladesh. Model proyeksi yang digunakan adalah metode seasonal Holts' Winter, seasonal ARIMA, dan VAR. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah total impor total, total ekspor, selisih aset luar negeri (*net foreign asset*), kredit dalam negeri, nilai tukar, tingkat inflasi. Dari hasil membandingkan diantara 3 model, maka model VAR memberikan nilai eror proyeksi yang kecil dari semua aspek penilaian *error* yang terdiri

dari *Mean Error* (ME), *Mean Squared Error* (MSE), *Mean Percentage Error* (MPE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sehingga model VAR merupakan model yang paling tepat untuk proyeksi impor Bangladesh. Hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa model VAR akan memberikan hasil terbaik untuk penerapan di Indonesia.

Chani, Pervais, & Chaudhary (2011) melihat pengaruh komponen pengeluaran terhadap impor di Pakistan. Teknik yang digunakan untuk mengestimasi jangka panjang adalah Johansen Cointegration sedangkan dalam jangka pendek digunakan *Vector Error Correction Model* (VECM). Sementara itu, Tokuo dan Hayato (2015) memperlihatkan faktor eksogen yaitu *shock* harga dalam bentuk apresiasi yen, *shock* permintaan ekspor, dan perubahan harga minyak sebagai faktor signifikan dalam menurunkan ekspor Jepang. Penelitian mereka menggunakan Structural VAR sebagai alat analisisnya.

Dalam penelitian Chani, Pervais, & Chaudhary (2011) variabel yang digunakan sebagai variabel penjelas dalam fungsi permintaan impor adalah komponen dari GDP seperti pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor. Mereka juga menggunakan variabel rasio harga impor terhadap harga domestik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek, semua komponen pengeluaran (pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor) secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap permintaan impor di Pakistan. Hal ini mengindikasikan

bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan permintaan impor di Pakistan sesuai teori Keynes; namun, pengaruh harga relatif impor negatif dan tidak signifikan, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan substitusi impor yang diadopsi oleh Pakistan sejak tahun 1950 tidak berhasil mencapai target dalam memproduksi substitusi impor.

Moniruzzaman, Toy, & Hassan (2011) dengan teknik kointegrasi, *Engle-Granger causality* dan model *Vector Error Correction* mencoba mengestimasi model penawaran ekspor. Pada penelitian mereka variabel-variabel yang terdapat pada model penawaran ekspor meliputi nilai riil ekspor, harga relatif ekspor, GDP riil, struktur modal, dan liberalisasi dalam bentuk *dummy*. Hasil penelitiannya secara empiris menunjukkan bahwa terjadi hubungan jangka panjang dan kausalitas antar variabel pada model. Analisis kointegrasi juga menunjukkan adanya kointegrasi diantara variable model.

Metode peramalan untuk data deret waktu produksi, konsumsi, ekspor, impor, dan harga minyak bumi dengan analisis VAR telah digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuli (2007). Penelitiannya memperlihatkan bahwa berdasarkan nilai MAPE untuk model VECM dan ARIMA untuk semua peubah, didapatkan hasil bahwa peramalan produksi, impor, dan harga untuk model VECM lebih akurat bila dibandingkan dengan model ARIMA (peramalan individual). Hal ini terjadi karena nilai MAPE VECM untuk ketiga

peubah tersebut lebih kecil dibandingkan nilai MAPE ARIMA.

Berdasarkan beberapa penelitian yang disebutkan di atas, kajian proyeksi ekspor dan impor Indonesia menggunakan VAR sebagai metode penelitian. Hal tersebut dilakukan karena tingkat akurasi proyeksi VAR relatif lebih baik dibanding metode lainnya pada penelitian-penelitian tersebut di atas.

METODE

Kajian ini menggunakan metode *Vector Autoregressive (VAR)* untuk menghasilkan proyeksi ekspor dan impor Indonesia dalam jangka waktu 2015-2019. VAR merupakan suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linier dari konstanta dan nilai *lag* dari peubah itu sendiri sebagai nilai *lag* dari peubah lain yang ada dalam sistem yang mengasumsikan bahwa semua variabel yang terdapat dalam model bersifat endogen (ditentukan di dalam model).

Metode VAR adalah model yang *ateoritis* (tidak berlandaskan teori), yang digunakan karena sering dijumpai keadaan dimana teori ekonomi tidak mampu secara tepat dan lengkap (spesifikasi) hubungan dinamis antar variabel. Dengan kata lain, model VAR tidak banyak bergantung pada teori, melainkan perlu menentukan variabel yang saling berinteraksi, serta banyaknya variabel jeda yang perlu diikutsertakan dalam model tersebut (Nachrowi & Usman, 2006).

Terdapat beberapa kelebihan metode VAR dibanding metode ekonometrik lainnya (Gujarati, 2004 dan Enders, 2008). Pertama, metode

VAR bebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering ada, seperti variabel endogen dan eksogen palsu. Metode VAR mengembangkan model secara bersamaan dalam sistem multivarian yang kompleks, sehingga dapat menangkap semua hubungan antar variabel dalam persamaan.

Metode VAR adalah metode sederhana, dimana tidak perlu menentukan mana variabel yang endogen dan mana yang eksogen. Semua variabel pada model VAR dapat dianggap sebagai variabel endogen. Selain itu, estimasi VAR lebih sederhana karena metode umum OLS dapat digunakan pada masing-masing persamaan secara terpisah sehingga prediksi estimasi yang diperoleh, lebih baik dalam berbagai kasus, dibanding dengan model *simultaneous-equation* yang lebih rumit.

Model VAR tetap memiliki kelemahan meskipun banyak kelebihan dalam model ini (Nachrowi & Usman, 2006) diantaranya Model VAR lebih bersifat *ateoritis* karena tidak memanfaatkan teori. Karena tujuan utama model VAR adalah untuk proyeksi, maka model VAR tidak sesuai untuk analisis kebijakan yang bersifat jangka panjang. Pemilihan banyaknya *lag* yang digunakan sering menimbulkan permasalahan. Semua variabel dalam VAR harus stasioner, jika tidak maka harus ditransformasi. Interpretasi koefisien yang didapat berdasarkan model VAR tidak mudah.

Dalam kajian ini, model VAR akan digunakan untuk menyusun sistem peramalan dari data deret waktu yang saling terkait dan untuk menganalisis efek (*impact*) dinamis dari keberadaan factor acak yang mengganggu sistem

tersebut. Sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai beda kala (*lag*) peubah tersebut serta *lag* peubah lain dalam sistem, atau dengan kata lain VAR meliputi nilai *lag* semua peubah respon dalam model. Penggunaan VAR seringkali digunakan untuk memodelkan pergerakan peubah-peubah ekonomi (Koop, 2013; Korobilis, 2013).

Bentuk umum model VAR adalah sebagai berikut:

$$Y_t = A_0 + AY_{t-1} + v_t$$

Persamaan tersebut disebut *Vector Autoregressive* berordo 1 yang lazim ditulis VAR(1). Jika peubah sebanyak M, dengan observasi sebanyak *t* dan ordo *p*, maka model VAR (*p*) dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = A_0 + A_1Y_{t-1} + A_2Y_{t-2} + \dots + ApY_{t-p} + v_t$$

A_0 adalah vektor berukuran M x 1 dan matriks A_i ($i = 1, 2, \dots, p$) masing-masing berukuran M x M. Banyaknya parameter model yang harus diestimasi dari suatu model VAR (*p*) adalah $M + M^2p = M(1 + Mp)$. Data dalam model VAR haruslah data yang stasioner.

Dalam pemodelan VAR terdapat dua hal utama yang perlu dispesifikasikan (Pindyck & Rubinfeld, 1998) yaitu: variabel endogen (dan eksogen) yang diyakini berinteraksi dalam suatu sistem dimasukkan dalam pemodelan; dan jumlah *lag* optimum yang diperlukan untuk menangkap pengaruh-pengaruh

yang dimiliki masing-masing variabel terhadap variabel lainnya.

Dalam penelitian ini digunakan empat model ekspor dan impor yang masing-masing persamaannya diilustrasikan dengan model VAR ordo 1 dalam bentuk matrik berikut:

Model VAR ekspor non migas

$$\begin{bmatrix} XNM_t \\ GDPW_t \\ ER_t \\ PNE_t \\ MRAW_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \beta_{13} & \beta_{14} & \beta_{15} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \beta_{23} & \beta_{24} & \beta_{25} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \beta_{33} & \beta_{34} & \beta_{35} \\ \beta_{41} & \beta_{42} & \beta_{43} & \beta_{44} & \beta_{45} \\ \beta_{51} & \beta_{52} & \beta_{53} & \beta_{54} & \beta_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} XNM_{t-1} \\ GDPW_{t-1} \\ ER_{t-1} \\ PNE_{t-1} \\ MRAW_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \end{bmatrix} \quad \dots (1)$$

Model VAR ekspor migas

$$\begin{bmatrix} XM_t \\ GDP10_t \\ ER_t \\ PE_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \beta_{13} & \beta_{14} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \beta_{23} & \beta_{24} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \beta_{33} & \beta_{34} \\ \beta_{41} & \beta_{42} & \beta_{43} & \beta_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} XNM_{t-1} \\ GDP10_{t-1} \\ ER_{t-1} \\ PE_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{bmatrix} \quad \dots (2)$$

Model VAR impor non migas

$$\begin{bmatrix} MNM_t \\ GDP_t \\ ER_t \\ PR_t \\ DEV_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \rho_{13} & \rho_{14} & \rho_{15} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \rho_{23} & \rho_{24} & \rho_{25} \\ \rho_{31} & \rho_{32} & \rho_{33} & \rho_{34} & \rho_{35} \\ \rho_{41} & \rho_{42} & \rho_{43} & \rho_{44} & \rho_{45} \\ \rho_{51} & \rho_{52} & \rho_{53} & \rho_{54} & \rho_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} MNM_{t-1} \\ GDP_{t-1} \\ ER_{t-1} \\ PR_{t-1} \\ DEV_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \end{bmatrix} \quad \dots (3)$$

Model VAR impor migas

$$\begin{bmatrix} MM_t \\ GDP_t \\ ER_t \\ POIL_t \\ DEV_t \\ MOB_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \beta_{13} & \beta_{14} & \beta_{15} & \beta_{16} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \beta_{23} & \beta_{24} & \beta_{25} & \beta_{26} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \beta_{33} & \beta_{34} & \beta_{35} & \beta_{36} \\ \beta_{41} & \beta_{42} & \beta_{43} & \beta_{44} & \beta_{45} & \beta_{46} \\ \beta_{51} & \beta_{52} & \beta_{53} & \beta_{54} & \beta_{55} & \beta_{56} \\ \beta_{61} & \beta_{62} & \beta_{63} & \beta_{64} & \beta_{65} & \beta_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} MNM_{t-1} \\ GDP_{t-1} \\ ER_{t-1} \\ POIL_{t-1} \\ DEV_{t-1} \\ MOB_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{bmatrix} \quad \dots (4)$$

Dimana:

XNM = Nilai ekspor non migas

XM = Nilai ekspor migas

MNM = Nilai impor non migas

MM = Nilai impor migas

MRAW = Nilai impor bahan baku/penolong

GDPW = Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dunia¹

GDP10 = Nilai PDB negara utama tujuan ekspor migas Indonesia²

GDPi = Nilai PDB Indonesia

1. PDB dunia diproksi dengan 20 negara tujuan ekspor non migas Indonesia, meliputi: Amerika Serikat, RRT, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Filipina, Belanda, Australia, Jerman, Vietnam, Arab Saudi, Hongkong, UAE, Italia, Pakistan, dan Inggris. Pasar 20 negara tersebut merepresentasikan 82,4% dari tujuan ekspor non migas Indonesia tahun 2014.

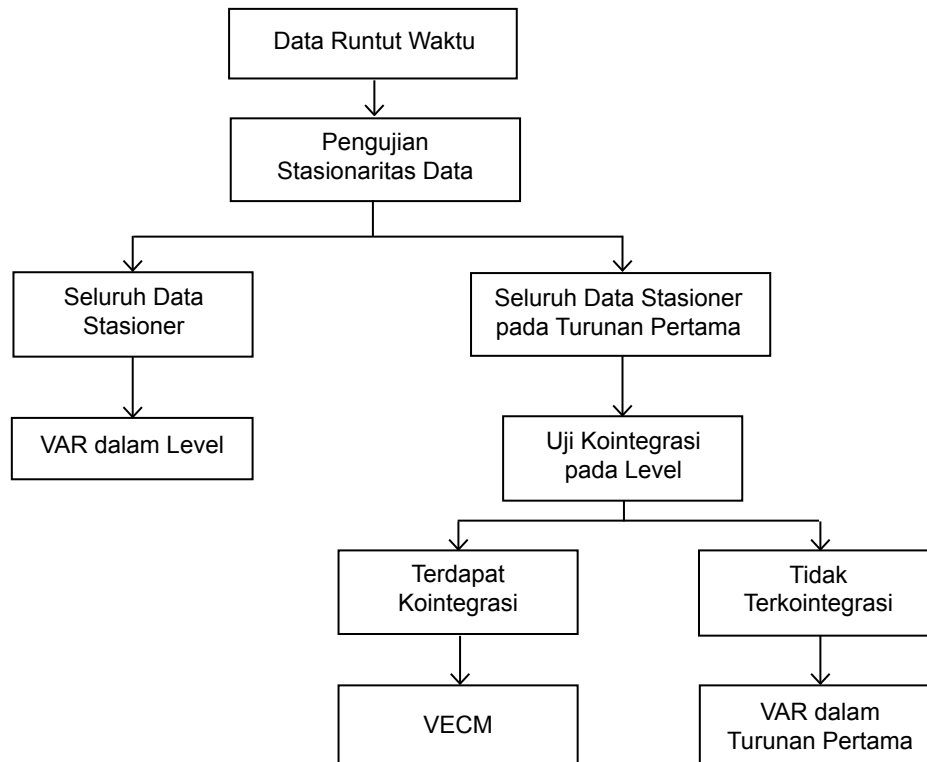
2. Pasar utama ekspor migas Indonesia meliputi Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Australia, RRT, Thailand, Amerika Serikat, dan Belanda. Pasar 10 negara tersebut merepresentasikan 99,6% dari tujuan ekspor migas Indonesia tahun 2014.

ER	= Indeks nilai tukar Rupiah
PNE	= Indeks harga non energi internasional
PE	= Indeks harga energi internasional
PR	= harga relatif impor (unit harga impor non migas dibagi indeks harga produsen)
POIL	= Harga minyak mentah dunia
DEV	= Nilai cadangan devisa Indonesia
MOB	= Jumlah penjualan mobil
t	= periode ke-t
ε_t	= galat

Persamaan (1) dan (2) merupakan fungsi permintaan ekspor sedangkan persamaan (2) dan (3) merupakan fungsi permintaan impor. Secara umum, kinerja ekspor Indonesia dipengaruhi oleh pendapatan (PDB) dunia, nilai tukar Rupiah, dan harga internasional. Sementara itu, kinerja impor dipengaruhi oleh pendapatan domestik, nilai tukar Rupiah, harga produk impor, dan cadangan devisa. Berbagai variabel penjelas ini yang nantinya digunakan sebagai variabel endogen dalam metode VAR untuk memproyeksikan pertumbuhan nilai ekspor dan impor berdasarkan sektor migas dan non migas. Variabel eksogen yang digunakan adalah *dummy* krisis yang merupakan peristiwa krisis perekonomian global tahun 2009. Sementara itu, data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal

dari BPS, IMF *World Economic Outlook Database* dan *International Financial Statistics (IFS) Browser*, Bank for International Settlements (BIS), CEIC, serta *World Bank* dengan sampel mulai kuartal I-2004 hingga kuartal II-2015.

Terdapat beberapa langkah dalam pemodelan VAR. Pertama, masing-masing variabel dilakukan pengujian uji akar unit menggunakan *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* dengan memasukkan *trend* dan *intercept*. Apabila seluruh variabel yang digunakan pada suatu persamaan ekspor/impor stasioner pada level maka dilanjutkan dengan estimasi model VAR biasa (*unrestricted VAR*). Apabila variabel-variabel tersebut stasioner pada turunan pertama (*first difference*) maka tahap selanjutnya dilakukan uji kointegrasi pada data level dengan menggunakan metode Johansen. Selanjutnya, apabila variabel-variabel yang digunakan dalam suatu persamaan terkointegrasi maka estimasi dilakukan dengan menggunakan *Vector Error Correction Model (VECM)*, sedangkan apabila tidak terdapat kointegrasi maka estimasi dilakukan menggunakan VAR dengan data yang telah dideferensiasi pada tingkat pertama. Sementara itu, pemilihan *lag* optimal menggunakan *Schwarz Criteria (SC)*. Spesifikasi *lag* optimal sangat penting untuk memberikan daya prediksi yang terbaik. Adapun sistematika pembentukan model VAR dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur Pembentukan model VAR

Sumber: disarikan dari Hill, Griffiths, & Lim (2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Ekspor Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang telah menjadikan instrumen ekspor sebagai komponen pendorong pendapatan nasional. Tidak hanya itu, komponen ekspor bagi Indonesia juga telah memperluas kesempatan kerja, peningkatan penerimaan devisa dan pengembangan teknologi. Sejak dua dekade terakhir, ekspor Indonesia cenderung tumbuh positif dengan rata-rata 9,65% (1991-2013). Namun, gejala ekonomi domestik dan eksternal pada tahun 1998-1999 dan 2012-2013 turut menggoncang kinerja ekspor Indonesia sehingga mengalami pertumbuhan yang negatif.

Jika melihat perkembangan ekspor selama dua dekade (Tabel 2), terlihat bahwa telah terjadi perubahan struktur secara sektoral, dimana peranan ekspor migas semakin mengecil sementara peranan ekspor non migas semakin besar. Pada tahun 1990, peranan ekspor migas masih di atas 40%, namun pada tahun 2013, peranan ekspor sektor migas hanya sebesar 18%. Semakin besarnya kontribusi ekspor sektor non migas sejalan dengan pembangunan sektor industri yang berkembang selama dua dekade terakhir. Lebih dari 70% ekspor non migas didominasi oleh ekspor hasil industri. Namun ekspor hasil industri yang masih berkembang belum merupakan hasil industri yang berbasis teknologi tinggi, sehingga nilai tambah yang diperoleh pun belum optimal.

Tabel 2. Perkembangan Pangsa dan Pertumbuhan Ekspor Indonesia

Tahun	Pangsa		Pertumbuhan		
	Migas	Non Migas	Migas	Non Migas	Total
1991	0,37	0,63	-1,59	24,95	13,50
1995	0,23	0,77	7,95	15,13	13,39
2000	0,23	0,77	46,71	22,85	27,66
2006	0,21	0,79	10,28	19,81	17,67
2007	0,19	0,81	4,14	15,61	13,20
2008	0,21	0,79	31,86	17,26	20,09
2009	0,16	0,84	-34,70	-9,64	-14,97
2010	0,18	0,82	47,43	33,08	35,42
2011	0,20	0,80	47,92	24,88	28,98
2012	0,19	0,81	-10,85	-5,54	-6,62
2013	0,18	0,82	-11,75	-2,04	-3,93
2014	0,17	0,83	-7,05	-2,64	-3,43

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015), diolah

Kinerja Impor Indonesia

Sebagai salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia (no 4 terbanyak), Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Perkembangan impor Indonesia cukup berfluktuatif pada setiap tahunnya. Hal ini tergantung dari kebutuhan nasional untuk menggerakkan perekonomiannya, seperti untuk konsumsi ataupun produksi.

Berdasarkan klasifikasi sektoral, impor dapat dibedakan menjadi impor migas dan non migas. Pada Tabel 3 terlihat bahwa sepanjang awal 1990 hingga saat ini, telah terjadi fluktuasi dalam perkembangan impor baik di sektor migas maupun non migas. Indonesia pernah mengalami penurunan impor (migas dan non migas) yang sangat

signifikan yaitu pada 1998, dimana impor migas pada saat itu turun 32,37% dan non migas turun 34,62%. Penurunan yang signifikan tersebut terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara luas; selain itu, penurunan yang cukup besar juga terjadi pada 2009. Pada saat itu penurunan impor lebih dikarenakan faktor gejolak ekonomi eksternal yang berujung pada penurunan permintaan produk-produk asal Indonesia. Produk-produk Indonesia tersebut pada umumnya berbahan baku impor, apabila permintaan produk tersebut menurun, maka akan menurunkan tingkat produksi di domestik yang berimbas pada menurunnya permintaan bahan baku impor.

Tabel 3. Pertumbuhan Impor Indonesia Berdasarkan Sektor

Tahun	Migas	Non Migas	Tahun	Migas	Non Migas
1991	19,99	18,32	2003	16,63	0,71
1992	-9,02	6,84	2004	54,15	39,51
1993	2,25	3,97	2005	48,80	15,67
1994	12,89	12,91	2006	8,62	4,62
1995	22,95	27,36	2007	15,66	24,79
1996	23,52	4,28	2008	39,30	87,75
1997	9,14	-4,01	2009	-37,88	-21,08
1998	-32,37	-34,62	2010	44,42	39,05
1999	38,72	-17,67	2011	48,48	26,31
2000	63,52	35,30	2012	4,58	9,06
2001	-9,10	-7,29	2013	6,35	-5,21
2002	19,26	-2,85	2014	-3,99	-4,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015), diolah

Model VAR

Untuk menyederhanakan analisis, semua data yang digunakan diubah dalam bentuk logaritma natural (ln).

Hasil uji statistik *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) yang mencakup *intercept* dan *trend* menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan stasioner pada derajat pertama (Tabel 4).

Tabel 4. Hasil Uji ADF terhadap Variabel yang Digunakan

Variabel	t-Statistik ADF	
	Pada Level	Turunan Pertama
LnXNM	-1.982	-6.515***
LnXM	-2.177	-5.058***
LnMNM	-1.293	-6.312***
LnMM	-3.685	-6.730***
LnMRAW	-2.777	-5.303***
LnGDPW	-1.929	-5.494***
LnGDP10	-1.711	-3.496*
LnGDPI	-1.468	-3.450*
LnER	-2.596	-5.365***
LnPNE	-2.057	-5.175***
LnPE	-3.470	-6.043***
LnPR	-1.352	-7.449**
LnPOIL	-3.468	-6.387***
LnDEV	-1.737	-4.484***
LnMOB	-2.690	-5.146***

Sumber: Hasil pengolahan *Eviews 6*

Keterangan: Stasioner apabila nilai t-statistik ADF lebih kecil daripada nilai kritis McKinnon-nya; *** = Stasioner pada derajat kepercayaan 1%; ** = Stasioner pada derajat kepercayaan 5%; * = Stasioner pada derajat kepercayaan 10%.

Dengan menggunakan SC diperoleh *lag* optimal pada lag 1 (satu) untuk persamaan ekspor non migas, impor non migas, dan impor migas. Sementara itu, pada persamaan ekspor migas diperoleh *lag* optimal pada lag 2 (dua). Variabel-variabel penyusun ekspor non migas dan penyusun impor migas terkointegrasi pada I(1) sehingga metode VAR yang dipilih berupa VECM. Dikarenakan variabel-variabel

penyusun ekspor migas dan variabel-variabel penyusun impor non migas tidak terkointegrasi, maka persamaan tersebut diestimasi dengan metode VAR menggunakan data turunan pertama. Masing-masing persamaan diestimasi dengan variabel-variabel endogen sebagaimana tercantum pada Tabel 5 dan *dummy* krisis sebagai variabel eksogen.

Tabel 5. Spesifikasi Metode VAR Persamaan Ekspor dan Impor

No.	Persamaan	Variabel	Lag Optimal	Kointegrasi	Bentuk VAR
1	Ekspor non migas	LnXNM, lnGDPW, LnER, LnPNE, LnMRAW	1	Ya	VECM
2	Ekspor migas	LnXM, lnGDP10, LnER, LnPE	2	Tidak	VAR turunan pertama
3	Impor non migas	LnMNM, lnGDPI, LnER, LnPR, LnDEV	1	Tidak	VAR turunan pertama
4	Impor migas	LnMM, lnGDPI, LnER, LnPOIL, LnDEV, LnMOB	1	Ya	VECM

Studi ini menekankan pada estimasi ekspor dan impor, oleh karena itu, hasil yang ditampilkan hanya persamaan ekspor dan impor saja dan tidak ditampilkan secara utuh dalam sebagaimana model VAR dibentuk. Adapun estimasi persamaan ekspor dan impor adalah sebagai berikut:

$$\Delta \ln XNM = -0.414 \text{ ECT} - 0.148 \Delta \ln XNM(-1) \dots\dots (1)$$

$$+ 0.024 \Delta \ln ER(-1) + 0.707 \Delta \ln PNE(-1) - 0.137 \Delta \ln MRAW(-1) - 3.839 + 0.418 \Delta \ln GDPWC$$

$$\Delta \ln XM = -0.543 \Delta \ln XMG(-1) - 0.098 \dots\dots (2)$$

$$\Delta \ln XMG(-2) - 0.898 \Delta \ln ER(-1) + 0.829 \Delta \ln ER(-2) + 1.138 \Delta \ln PE(-1) - 0.167 \Delta \ln PE(-2) - 0.103 + 0.221 \text{ KRISIS} + 6.607 \Delta \ln GDPW10$$

$$\Delta \ln MNM = -0.088 \Delta \ln MNM(-1) + 0.522 \dots\dots (3)$$

$$\Delta \ln GDPI(-1) + 0.483 \Delta \ln ER(-1) - 0.085 \Delta \ln PR(-1) + 0.623 \Delta \ln DEV(-1) + 0.005 - 0.036 \text{ KRISIS}$$

$$\Delta \ln MM = -0.659 \text{ ECT} - 0.476 \Delta \ln MM(-1) \dots\dots (4)$$

$$- 0.460 \Delta \ln GDPI(-1) - 2.323 \Delta \ln ER(-1) + 1.429 \Delta \ln POIL(-1) - 0.116 \Delta \ln MOB(-1) + 0.220 \Delta \ln DEV(-1) + 0.012 - 0.049 \text{ KRISIS}$$

Proyeksi Ekspor Indonesia

Hasil estimasi proyeksi ekspor Indonesia dengan menggunakan metode VAR ditunjukkan pada Tabel 6. Seperti yang telah diketahui, VAR merupakan model yang terdiri dari banyak variabel atau juga bisa disebut multivariate. Suatu

variabel dalam perkembangan di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel lainnya.

Berdasarkan hasil estimasi pada model VAR, PDB negara tujuan utama ekspor Indonesia merupakan variabel yang paling mempengaruhi tingkat ekspor. Oleh sebab itu, dalam analisis proyeksi ekspor hingga 2019, variabel PDB negara-negara mitra dijadikan basis variabel eksogen di dalam model VAR. Selain PDB negara-negara mitra juga terdapat beberapa variabel yang turut dimasukkan ke dalam model dan ditempatkan sebagai variabel endogen. Variabel PDB tersebut diproyeksi untuk mendapatkan besaran perubahan ekspor pada masa yang akan datang. Proyeksi pertumbuhan PDB negara-negara mitra dagang mengikuti proyeksi yang telah dilakukan oleh IMF yang diperoleh dalam *World Economic Outlook Database*, Oktober 2015.

Hingga akhir 2015, ekspor non migas diperkirakan akan turun (yoy) sebesar 7,3%, demikian pula pada ekspor migas yang juga akan turun sebesar 27,1%. Sehingga ekspor total pada tahun

2015 diperkirakan akan turun 10,6%. Penurunan ekspor diperkirakan masih berlanjut di 2016, sedangkan periode 2017 hingga 2019 ekspor migas dan non migas diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhannya relatif kecil (Tabel 6).

Apabila dibuat rata-rata, pertumbuhan ekspor non migas selama 2015 hingga 2019 diperkirakan turun 0,96% per tahun dikarenakan tajamnya penurunan ekspor non migas di tahun 2015. Kondisi serupa terjadi pada ekspor migas yang secara rata-rata diperkirakan turun 4,37% dikarenakan perkiraan penurunan ekspor migas yang tajam di tahun 2015. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan total ekspor selama 2015 hingga 2019 diperkirakan akan mengalami penurunan 1,56%. Puncak pertumbuhan tertinggi pada ekspor non migas diperkirakan akan terjadi pada 2017, yaitu sebesar 1,63%. Sementara itu, puncak pertumbuhan ekspor migas tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana pertumbuhan ekspor yang terjadi diperkirakan sebesar 3,91%.

Tabel 6. Proyeksi Ekspor Migas dan Non Migas 2015-2019

Tahun	Migas		Non Migas		Total	
	Nilai (juta USD)	Pert (%)	Nilai (juta USD)	Pert (%)	Nilai (juta USD)	Pert (%)
2015	21.883	-27,10	135.345	-7,27	157.228	-10,65
2016	21.580	-1,38	134.324	-0,75	155.904	-0,84
2017	21.839	1,20	136.515	1,63	158.353	1,57
2018	22.175	1,54	137.867	0,99	160.043	1,07
2019	23.043	3,91	138.693	0,60	161.736	1,06
Rata-rata (2015-2019)		-4,37		-0,96		-1,56

Proyeksi Impor Indonesia

Metode analisis VAR juga digunakan untuk menganalisis proyeksi pertumbuhan impor. Berdasarkan hasil estimasi model, diperkirakan bahwa hingga akhir 2015 ini, impor non migas mengalami penurunan sebesar 9,62%, sementara impor migas turun sebesar 11,28%. Hingga akhir 2015, impor total Indonesia diperkirakan akan turun sebesar 10,02%.

Lebih lanjut, rata-rata pertumbuhan impor sektor non migas selama 2015-2019 diperkirakan akan mencapai

7,35%, sementara impor migas diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, dimana rata-rata mencapai 9,74%. Rata-rata total impor Indonesia untuk periode 2015-2019 diperkirakan akan mencapai 7,85%. Puncak pertumbuhan tertinggi pada impor non migas diperkirakan akan terjadi pada 2018, dimana pertumbuhan yang terjadi diperkirakan sebesar 12,7%. Sementara itu, puncak pertumbuhan impor tertinggi pada sektor migas juga terjadi pada tahun 2016, dimana pertumbuhan impor migas yang terjadi diperkirakan sebesar 33,03%.

Tabel 7. Proyeksi Impor Migas dan Non Migas Indonesia 2015-2019

Tahun	Migas		Non Migas		Total	
	Nilai (juta USD)	Pert (%)	Nilai (juta USD)	Pert (%)	Nilai (juta USD)	Pert (%)
2015	38.559	-11,28	121.767	-9,62	160.326	-10,02
2016	51.296	33,03	131.833	8,27	183.129	14,22
2017	54.817	6,86	148.506	12,65	203.323	11,03
2018	60.145	9,72	167.411	12,73	227.555	11,92
2019	66.389	10,38	188.726	12,73	255.115	12,11
Rata-rata (2015-2019)		9,74			7,35	7,85

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Proyeksi ekspor Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan VAR, menunjukkan bahwa ke depan pertumbuhan ekspor Indonesia juga masih dipengaruhi oleh PDB negara-negara mitra utama. Meskipun perekonomian dunia pada 2015-2019 diproyeksikan tumbuh rata-rata 3% per tahun, namun pertumbuhan ekspor Indonesia di tahun 2019 diperkirakan hanya mencapai 1,56%. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan impor Indonesia untuk periode 2015-2019 diperkirakan

mencapai 7,8%. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2015-2019 diproyeksikan mengalami defisit.

Faktor eksternal turut mempengaruhi perkembangan ekspor Indonesia, dengan kata lain ekspor Indonesia masih bergantung pada kondisi permintaan dunia. Kekuatan dari sisi permintaan lebih dominan berpengaruh daripada kekuatan dari sisi penawaran. Peningkatan ekspor Indonesia di masa mendatang juga harus didorong oleh kekuatan sisi penawaran. Beberapa hal seperti memperkuat daya saing produk,

memperluas pasar dan diversifikasi produk dapat meningkatkan ekspor Indonesia dari sisi penawaran.

Tingkat impor lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi domestik. Terlihat bahwa perbaikan ekonomi dan nilai tukar rupiah memberikan kontribusi dalam kemampuan domestik memenuhi kebutuhan akan barang impor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih untuk beberapa pihak yang membantu terealisasinya tulisan ini. Pertama, peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) yang memberikan masukan pada penyusunan naskah awal dan kedua, Pusat Data dan Informasi Perdagangan (Pusdatin), Kementerian Perdagangan yang telah memberikan bantuan penyediaan data perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data Ekspor Impor*. Diunduh tanggal 9 November 2015 dari http://www.bps.go.id/all_newtemplate.php#accordion-daftar-subjek2
- Bappenas. (2010). *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014*. Jakarta: Bappenas.
- BI. (2013). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Jakarta.
- BI. (2014). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*. Jakarta.
- Chani, M. F., Z. Pervaiz, Z. dan A.R. Chaudhary. (2011). Determination of Import Demand in Pakistan: The Role of Expenditure Components. *Theoretical and Applied Economics* Volume XVIII, No. 8 (561), pp 93-110.
- Enders, W. (2008). *Applied Econometric Time Series*. John Wiley & Sons.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics*. Tata McGraw-Hill Education.
- Hameed, A. A. A., & F.M. Arshad. (2012). An Empirical Analysis of the Import Demand for Palm Oil in the Five Leading Importing Countries. *International Review of Business Research Papers*, 8(7), 94-103.
- Hill, R. C., Griffiths, W. E., dan Lim, G. C. (2012). *Principles of Econometrics. Fourth Edition, International Student Version*. New York: John Wiley and Sons.
- Khan, T. (2011). Identifying an Appropriate Forecasting Model for Forecasting Total Import of Bangladesh. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol.2, No.3
- Koop, G. M. (2013). Forecasting with medium and large Bayesian VARs. *Journal of Applied Econometrics*, 28(2), 177–203.
- Korobilis, D. (2013). VAR forecasting using Bayesian variable selection. *Journal of Applied Econometrics*, 28(2), 204–230
- Lipsey et all. (1995). *Pengantar Mikro-ekonomi*. Jilid 2. Jaka Wasana dan Kirbrandoko [Penerjemah] Binarupa Aksara, Jakarta.
- Moniruzzaman, M., M.M. Toy, dan A.B.M. R. Hassan. (2011). The Export Supply Model of Bangladesh: An Application

- of Cointegration and Vector Error Correction Approaches. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 1(4), 163–171.
- Nachrowi, D. dan H. Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pindyck, R. S., dan D.L. Rubinfeld. (1998). *Econometric models and economic forecasts* (Vol. 4). Boston: Irwin/McGraw-Hill.
- Rahmaddi, R., dan M. Ichihashi. (2012). How Do Foreign and Domestic Demand Affect Exports Performance? An Econometric Investigation of Indonesia's Exports. *Modern Economy*, 2012, 3, 32-42.
- Siddique, M.A.B. (1997). Estimation of an Import Demand Function for Indonesia: 1971-93. *International Congress on Modelling and Simulation 97*, Perth, 3, pp. 1361-1366
- Tokarick, S. (2014). A method for calculating export supply and import demand elasticities. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 23(7), 1059-1087
- Tokuo, I. dan N. Hayato. (2015). *Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports: Quantitative assessment using a structural VAR model*. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) Discussion Paper Series No. 15-E-029. Diunduh tanggal 10 November 2015 dari <http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15e029.pdf>
- Wahyuli, A. (2007). *Analisis VAR (Vector Autoregressive) untuk Mekanisme Pemodelan Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor, dan Harga Minyak Bumi*. Skripsi. Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Diunduh tanggal 10 November 2015 dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/33078>

TRANSMISI HARGA ASIMETRI DALAM RANTAI PASOK BAWANG MERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMPOR DI INDONESIA: STUDI KASUS DI BREBES DAN JAKARTA

ASYMMETRIC PRICE TRANSMISSION IN SUPPLY CHAIN OF SHALLOT AND ITS RELATIONSHIP WITH IMPORT IN INDONESIA: A CASE STUDY IN BREBES AND JAKARTA

Januar Arifin Ruslan¹, Muhammad Firdaus², Suharno³

¹Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

²Departemen Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

³Departemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor

e-mail: ari.ruslan07@gmail.com

Naskah diterima: 30/11/2015 Naskah direvisi: 19/02/2016 Disetujui diterbitkan: 11/04/2016

Abstrak

Disparitas harga bawang merah di tingkat petani dan konsumen sangat besar. Penelitian ini menganalisis transmisi harga dalam rantai pasok bawang merah dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi harga serta menganalisis hubungan antara harga bawang merah impor terhadap harga produsen dan harga konsumen bawang merah. Penelitian ini menggunakan model *Houck* dan *Error Correction Mechanism* (ECM) serta uji kointegrasi dan kausalitas jangka panjang. Data yang digunakan merupakan data bulanan pada petani, pedagang grosir, pengecer di Kabupaten Brebes dan Kota Jakarta serta harga bawang merah impor selama Januari 2008 sampai Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan petani-grosir terjadi asimetris harga dalam jangka pendek karena terkait dengan biaya penyesuaian, sedangkan grosir-pengecer terjadi asimetris dalam jangka panjang karena terkait dengan penyalahgunaan kekuatan pasar. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran dari harga impor bawang merah dalam penentuan harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen. Kebijakan harga plafon (*ceiling price*) dan harga dasar (*floor price*) diharapkan dapat menghindari perilaku eksploitasi yang dilakukan pedagang perantara.

Kata kunci: Bawang Merah, Transmisi Asimetris, Impor, Perilaku Pasar

Abstract

Shallot, as a potential commodity in Indonesia, has a large price disparity between the farmer and the consumer prices. The price disparity is also linked to the price of shallots import. This research analyzes the price transmission of shallots during its supply chain, discusses the factors influencing the price transmission, and also investigates the relationship between the price of import and the price of producer-and-consumer. This research uses the Houck Model, Error Correction Mechanism (ECM), cointegration test and longrun causality test. The data were monthly price data of farmers, wholesalers, and retailers in Brebes regency and Jakarta; and prices of shallot import during January 2008 to December 2014. The results showed that the relationship between farmer and wholesale was asymmetric in the short term of price transmission, even in the long term of transmission wholesalers and retailers was also having asymmetric relationship. The asymmetric price transmission in the short term was related to adjustment cost while the asymmetric price transmission in the long term indicated the abuse of market power. This study reveals the important role of price import in the farm and retailer prices. It is suggested to set up ceiling price and floor price in order to avoid the exploitative behavior of middlemen.

Keywords: Shallots, Asymmetric Transmission, Import, Market Behaviour.

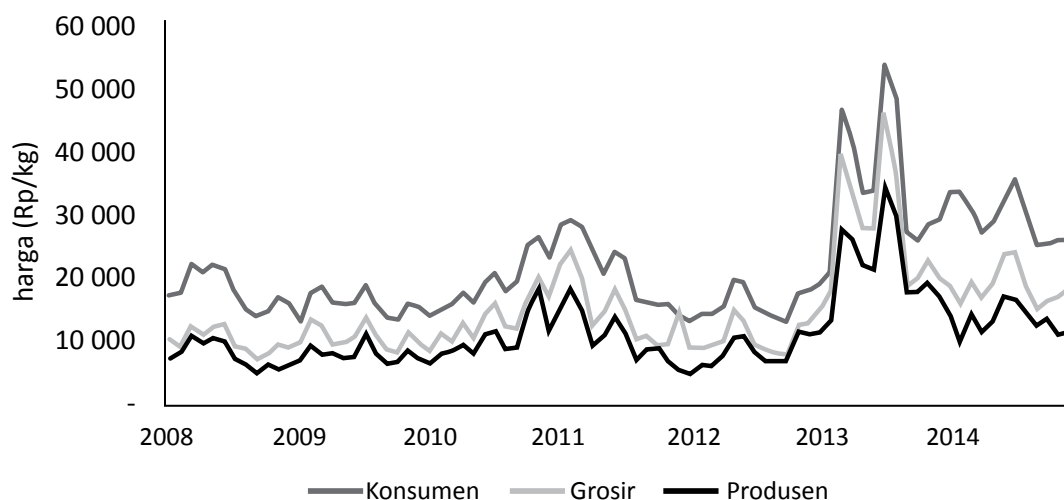
JEL Classification: Q13, D22, P22

PENDAHULUAN

Bawang merah merupakan salah satu sayuran yang penting di Indonesia terlihat dari luas lahannya yang selama tahun 2009-2013 merupakan yang terbesar dibandingkan luas lahan jenis sayuran lainnya. Komoditi ini juga masuk dalam prioritas pengembangan sayuran dataran rendah di Indonesia (BPS, 2014b). Sebagai komoditi penting, maka pengembangan bawang merah sangat potensial ke depannya baik dalam bentuk usahatani (*on-farm*) maupun dalam bentuk usaha di luar usahatani (*off-farm*). Irawan (2003) menjelaskan bahwa pengembangan hortikultura pada umumnya lebih banyak dijumpai pada bentuk *off-farm*, terutama pada penanganan pasca panen dan pemasaran. Oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian yang hanya difokuskan pada aspek produksi atau usahatani belum mampu mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan selama permasalahan *off-farm* belum dapat diatasi.

Permasalahan *off-farm* yang sering terjadi pada sayuran khususnya pada bawang merah adalah harga. Pada tahun 2013, bawang merah menempati urutan pertama dalam kontribusinya terhadap inflasi dari kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0.38% (TPPI, 2013). Selain itu, pertumbuhan harga bawang merah di tingkat produsen sebesar 8.50% sedangkan di tingkat konsumen sebesar 17.27% per tahun (BPS, 2014a). Ini menunjukkan terdapat fenomena disparitas pertumbuhan harga bawang merah yang besar antara produsen dengan konsumen.

Disparitas harga yang besar tersebut mengindikasikan dalam pemasaran bawang merah terjadi dengan sistem yang tidak efisien dan efektif. Saluran pemasaran yang kurang efisien ini akan mempengaruhi kesejahteraan yang diperoleh produsen dan konsumen. Lebih jelasnya mengenai perkembangan harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Perkembangan Harga Bulanan Bawang Merah di Sentra Produsen, Grosir dan Konsumen Indonesia Tahun 2008-2014.

Sumber: BPS (2014a) dan PIKJ (2014), diolah.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa ada disparitas harga yang tinggi antara produsen dengan konsumen bawang merah. Selama tahun 2008-2014, rata-rata margin distribusi antara grosir-produsen sebesar Rp 3.100 sedangkan pengecer-grosir sebesar Rp 5.700 (BPS, 2014a). Informasi tersebut menunjukkan bahwa baik petani maupun konsumen tidak diuntungkan dalam perdagangan bawang merah.

Mengenai disparitas harga yang besar ini, Conforti (2004) menjelaskan bahwa hal ini dapat disebabkan oleh dua hal yaitu jalur pemasaran yang panjang dan adanya *market power* yang dimiliki oleh pedagang perantara. Keduanya akan menyebabkan margin yang terbentuk dalam pemasaran dari hulu ke hilir (vertikal) menjadi sangat besar dan tidak efisien. Lebih lanjut, Brooker *et al* (1997) menjelaskan bahwa respon pengecer terhadap kenaikan harga di tingkat grosir ternyata lebih cepat dibandingkan respon mereka terhadap penurunan harga.

Penelitian yang mencoba melihat adanya asimetris transmisi harga di Indonesia dilakukan oleh Yustningsih (2012) pada komoditi beras. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya fenomena transmisi harga yang tidak simetris pada jangka panjang. Asimetris harga ini disebabkan oleh dua hal, yaitu penyalahgunaan *market power* oleh pedagang perantara, dan kebijakan Pemerintah. Yustningsih (2012) mengemukakan bahwa semakin tinggi margin distribusi mengindikasikan bahwa para pelaku di jalur distribusi

memiliki *market power* yang cukup untuk menetapkan harga di atas biaya marginalnya dan menunjukkan bahwa pelaku berada pada pasar yang terkonsentrasi.

Pada komoditi bawang merah, permasalahan disparitas harga juga terkait dengan kebijakan pemerintah yaitu impor bawang merah yang masuk ke Indonesia. Data statistik menunjukkan, proporsi impor terhadap kebutuhan nasional sebesar 10% yang berasal dari Vietnam, India, dan Thailand (BPS, 2014c). Jika dilihat, sasaran dari kebijakan impor ini adalah untuk mengatasi kenaikan harga bawang merah di tingkat konsumen sehingga diharapkan mampu menekan harga bawang merah yang terlampaui tinggi. Namun, hasil penelitian Koutroumanidis, Zafeiriou & Arabatzis (2009) menemukan bahwa impor bukan hanya mempengaruhi harga yang terbentuk di tingkat konsumen namun juga produsen. Dengan demikian, impor bawang merah akan mempengaruhi pergerakan harga yang terbentuk baik di tingkat produsen dan konsumen.

Masuknya bawang merah impor yang lebih murah akan memberikan tekanan kepada harga konsumen dan ditransmisikan ke petani dengan sempurna. Temuan Rahim (2010) memperlihatkan bahwa impor berpengaruh negatif terhadap harga di tingkat konsumen maupun harga di tingkat petani sehingga nilai tukar petani menjadi menurun. Artinya penurunan harga di tingkat konsumen akan diteruskan ke tingkat petani

sehingga harga yang diterima menjadi lebih rendah. Sejalan dengan itu, Rachman (2003) menemukan adanya transmisi yang tidak proporsional di mana perubahan harga di pasar dunia diikuti perubahan yang relatif besar di pasar domestik, sedangkan di tingkat domestik, perubahan harga ditransmisikan langsung dari konsumen ke petani. Dengan demikian, meskipun impor bawang merah efektif menurunkan harga bawang merah di tingkat konsumen, namun pihak yang paling dirugikan adalah petani. Hal ini terkait perilaku pedagang perantara yang berusaha untuk menjaga tingkat keuntungannya.

Disparitas harga yang besar antara produsen dan konsumen mengindikasikan adanya transmisi harga yang tidak simetris. Permasalahan tersebut menyebabkan harga yang di terima produsen dan konsumen bukan merupakan harga sesungguhnya. Harga yang diterima oleh produsen dan konsumen ini dipengaruhi juga oleh masuknya bawang merah impor ke Indonesia di mana pedagang perantara berusaha menjaga tingkat keuntungannya dengan meneruskan transmisi harga ke tingkat petani. Untuk itu, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis transmisi harga antar lembaga pemasaran bawang merah (2) menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transmisi harga bawang merah dan (3) menganalisis hubungan antara harga impor bawang merah dengan harga produsen dan harga konsumen bawang merah.

METODE

Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan model ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat pergerakan harga bawang merah antar lembaga pemasaran yaitu petani (Kab. Brebes), grosir (Pasar Induk Kramat Jati), konsumen (Kota Jakarta) dan harga impor bawang merah. Sedangkan model ekonometrika digunakan untuk menganalisis apakah telah terjadi asimetris transmisi harga antar lembaga pemasaran dan hubungan jangka panjang antara harga impor dengan harga produsen dan konsumen. Asimetris transmisi harga merupakan kondisi ketika perubahan harga pada sektor hulu tidak secara serta merta direfleksikan pada perubahan harga di sektor hilir dan sebaliknya baik dari segi besaran dan waktu. Analisis ini dilakukan antar lembaga pemasaran bawang merah di Indonesia yaitu dari produsen ke PIKJ dan dari PIKJ ke pengecer. Model ekonometrika juga digunakan untuk melihat pengaruh dari harga impor bawang merah ke harga produsen dan konsumen bawang merah lokal di Indonesia.

Langkah pertama dalam analisis ini yaitu uji stasioneritas dan kointegrasi antara harga produsen, grosir (PIKJ) dan konsumen bawang merah. Uji stasioneritas terkait konsistensi pergerakan data *time series*. Data dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan varians konstan sepanjang waktu. Uji stasioneritas menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF)

sebagai berikut:

$$\Delta P_t = c + \rho P_{t-1} + \beta_t + \sum_{j=1}^t d_j \Delta P_{t-1} + e_t \quad (1)$$

Uji kointegrasi dilakukan pada data yang tidak stationer pada level, dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta P_t = c + \Pi P_{t-1} + \sum_{j=1}^{k-1} B_j \Delta P_{t-j} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (2)$$

Di mana Π merupakan matriks jangka panjang dan merupakan parameters penyesuaian; B_j matriks untuk parameter jangka pendek; P_t merupakan vektor dari harga produsen, grosir, dan konsumen.

Selanjutnya akan dianalisis test kausalitas untuk untuk membuktikan apakah benar pergerakan harga dari sektor hulu merupakan penentu utama pergerakan harga di hilir, atautkah pergerakan harga disektor hulu lebih ditentukan oleh transaksi yang terjadi antar pelaku usaha di tingkat hilir, dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta PG_t = \mu_1 + \sum_{i=1}^{n1} \beta_{pg} \Delta PG_{t-i} \dots\dots\dots (3a) + \sum_{i=0}^{n2} \beta_{pp} \Delta PP_{t-i} + \pi_1 Z_{t1-i} + e_{t1}$$

$$\Delta PK_t = \mu_2 + \sum_{i=1}^{n1} \beta_{pk} \Delta PK_{t-i} \dots\dots\dots (3b) + \sum_{i=0}^{n2} \beta_{pg} \Delta PG_{t-i} + \pi_2 Z_{t2-i} + e_{t2}$$

dengan

- ΔPP_t = Perubahan harga bawang merah di sentra produsen pada periode ke t (Rp/Kg).
- ΔPG_t = Perubahan harga bawang merah di tingkat grosir pada periode ke t (Rp/Kg).

- ΔPK_t = Perubahan harga bawang merah di tingkat konsumen pada periode ke t (Rp/Kg).
- μ_i = Intersep.
- Z_t = *Error correction term (ECT)*
- n = Panjang lag.
- e = *Error term*.

Model ekonometrika untuk pengujian tujuan pertama dan kedua yaitu transmisi antara harga produsen, grosir, dan harga konsumen serta faktor yang mempengaruhi asimetris transmisi harga bawang merah di Indonesia menggunakan model dua model yaitu *error correction mechanism Engle-Granger (ECM-EG)* dan *Houck model*. Model ECM-EG yang dikembangkan Von Cramon-Taubadel & Loy (1996) adalah sebagai berikut:

$$\Delta PG_t = a_0 + \sum_{i=1}^n \beta^- \Delta PG_{t-i}^- + \sum_{i=0}^n \beta^- \Delta PP_{t-i}^- \quad (4a) + \pi_1 Z_{t-1}^- + \sum_{i=1}^n \beta^+ \Delta PG_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^n \beta^+ PP_{t-i}^+ + \pi_2 Z_{t-1}^+ + \varepsilon_t$$

$$\Delta PK_t = a_0 + \sum_{i=1}^n \beta^- \Delta PK_{t-i}^- + \sum_{i=0}^n \beta^- \Delta PG_{t-i}^- \quad (4b) + \pi_1 Z_{t-1}^- + \sum_{i=1}^n \beta^+ \Delta PK_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^n \beta^+ PG_{t-i}^+ + \pi_2 Z_{t-1}^+ + \varepsilon_t$$

Tanda plus (+) dan minus (-) pada model ECM-EG menunjukkan kenaikan dan penurunan harga. Pengujian apakah terdapat transmisi yang tidak simetris dalam pendek dan jangka panjang menggunakan *Wald test*. Pengujian transmisi harga yang tidak

simetri dalam jangka pendek digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i^- = \beta_i^+$$

Hipotesis tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan respon harga di tingkat hilir ketika terjadi kenaikan dan penurunan di tingkat hulunya pada periode t dan t-1. Sedangkan untuk menguji keberadaan transmisi harga yang tidak simetris dalam jangka panjang digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \pi_1 = \pi_2$$

Hipotesis ini untuk menguji perbedaan koefisien ECT⁻ dan ECT⁺. Artinya tidak adanya perbedaan respon harga di tingkat hilir ketika terjadi perubahan kenaikan dan penurunan harga di tingkat hulunya dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, transmisi harga asimetris dalam saluran pemasaran bawang merah terjadi jika efek kenaikan harga dan penurunan harga tidak sama atau terdapat perbedaan ($\beta_1 \neq \beta_2$; $\pi_1 \neq \pi_2$) untuk setiap persamaan.

Model Houck (1977) dapat dilihat sebagai berikut:

$$\Delta PG = a_0 + \sum_{i=0}^{M1} a_{1i} \Delta PP_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{M2} a_{2i} \Delta PP_{t-i}^- + e_t \quad (5a)$$

$$\Delta PK = a_0 + \sum_{i=0}^{M1} a_{1i} \Delta PG_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{M2} a_{2i} \Delta PG_{t-i}^- + e_t \quad (5b)$$

Pengujian asimetris transmisi harga dalam jangka pendek akan dilihat keindentikan koefisien pada t dan t-1, sebagai berikut:

$$H_0 : a_{1i} = a_{2i}$$

Sedangkan untuk menguji apakah terdapat transmisi yang tidak simetris dalam jangka panjang dapat dilihat dari penjumlahan tanda parameter a_1 dan a_2 atau dapat ditulis sebagai berikut:

$$H_0 : \sum_{i=0}^{M1} a_{1i} = \sum_{i=0}^{M2} a_{2i}$$

Pengujian Wald ini adalah juga untuk melihat faktor yang mempengaruhi asimetris transmisi harga. Apabila dalam jangka pendek hasil uji Wald menunjukkan nilai yang signifikan berarti asimetris transmisi harga dipengaruhi oleh faktor biaya penyesuaian, sedangkan dalam jangka panjang bila uji Wald menunjukkan nilai yang signifikan artinya asimetris transmisi harga dipengaruhi oleh faktor kekuatan pasar. Untuk melihat hubungan jangka panjang antara bawang merah impor dengan harga produsen dan harga konsumen bawang merah akan dilakukan uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Johansen dan pengujian Granger causality.

Persamaan uji kointegrasi Johansen adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-1} + \Pi Y_{t-k} + BX_t + e_t \quad (6a)$$

di mana :

$$\Pi = \sum_{i=1}^p A_i - I \quad \text{dan} \quad \Gamma = \sum_{j=1+1}^p A_j$$

Sedangkan pengujian *Granger causality* dalam jangka panjang dapat dilihat pada persamaan sebagai berikut:

$$\Delta PK_t = \mu_2 + \sum_{i=1}^{n1} \beta_{pk} \Delta PK_{t-i} + \sum_{i=0}^{n2} \beta_{pg} \Delta PI_{t-i} + \pi_1 Z_{t1-i} + e_{t1} \quad (6b)$$

Untuk menguji apakah terdapat hubungan jangka panjang antara kedua variabel di digunakan hipotesis yaitu $H_0: \pi_1 = 0$. Pengolahan data menggunakan software Eviews 7.0.

Data yang digunakan adalah data berkala sekunder (*data time series*) yaitu data bulanan dari tahun 2008 – 2014 yang terdiri dari harga bawang merah di sentra produsen (Kab. Brebes) (Rp/Kg), di tingkat pedagang grosir (PIKJ) (Rp/Kg), di tingkat pengecer (Kota Jakarta) (Rp/Kg) dan harga bawang merah impor (Rp/Kg). Sentra produsen mengambil Kabupaten Brebes dikarenakan daerah ini merupakan produsen bawang merah terbesar di Indonesia, yang menyumbang sebesar 25% dari produksi nasional. Sementara itu, daerah konsumen mengambil Propinsi Jakarta sebagai pusat konsumen terbesar di Indonesia. Pemilihan kedua daerah tersebut juga disebabkan adanya aliran perdagangan di mana 70% bawang merah yang masuk ke Jakarta berasal dari Kabupaten Brebes. Data yang

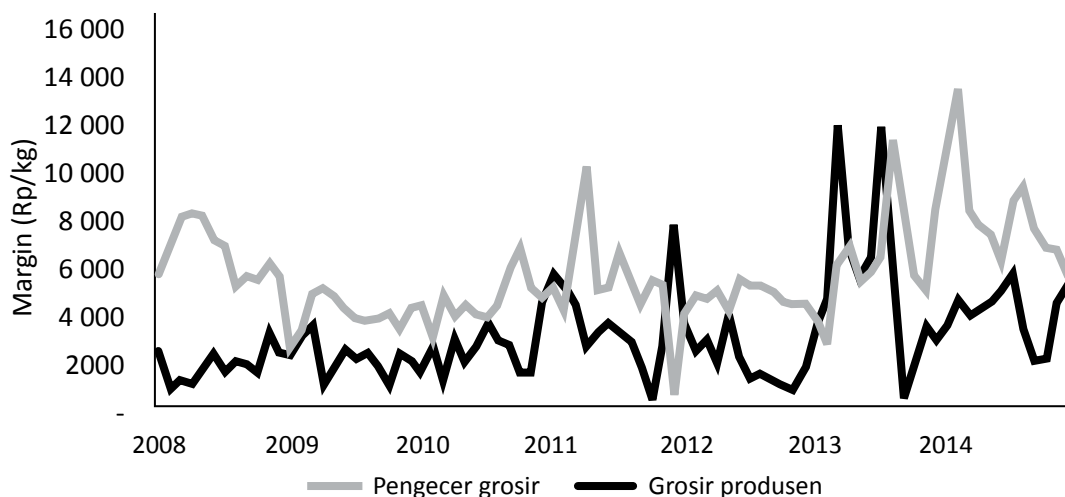
digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Transmisi Harga Antar Lembaga Pemasaran Bawang Merah

Selama periode Januari 2008 sampai Desember 2014 margin pemasaran antara produsen dan grosir cenderung stabil selama periode 2008 - 2010 dan mulai berfluktuasi pada awal periode 2011. Fluktuasi margin pemasaran antara produsen dan grosir terbesar terjadi pada tahun 2013. Pada hubungan antara grosir dan pengecer, margin pemasaran berfluktuasi pada awal periode 2008 dan mulai stabil pada periode 2009-2010. Fluktuasi margin pemasaran cenderung membesar pada awal periode 2011, di mana disparitas terbesar terjadi pada awal periode 2014.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Margin Pemasaran Antar Lembaga Pemasaran Bawang Merah Pada Tahun 2008-2014 di Indonesia.

Sumber: BPS (2014a) dan PIKJ(2014), diolah.

Margin pemasaran antar lembaga pemasaran bawang merah secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Rata-rata Margin Pemasaran Pada Harga Produsen, Grosir, dan Konsumen Bawang Merah di Indonesia.

Tahun	Margin pemasaran	
	Pengecer – grosir	Grosir – produsen
2008	8.080	944
2009	5.224	1.795
2010	5.749	5.196
2011	6.236	6.459
2012	5.366	2.867
2013	6.774	19.537
2014	11.028	3.980
Rata-rata	6.922	5.825

Sumber: BPS (2014a) dan PIKJ (2014), diolah.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa rata-rata *markup* harga terbesar berada pada pedagang pengecer dalam pemasaran bawang merah di Indonesia. Variasi harga antar lembaga pemasaran bawang merah ditampilkan pada Tabel 2:

Tabel 2. Rata-rata Harga Produsen, Grosir, dan Konsumen Bawang Merah dari Bulan Januari 2008 Sampai Desember 2014 di Indonesia.

Variabel	Obs	Harga Real		
		Rata-rata	Std Dev	CV ^a
Produsen	84	11417	5754	50.50
Grosir	84	15131	7429	49.09
Pengecer	84	22054	8455	38.33

Sumber: BPS (2014a) dan PIKJ (2014), diolah.
Keterangan: ^a Coefficient of Variation (persen)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa selama periode Januari 2008 sampai Desember 2014 harga bawang merah di tingkat produsen adalah yang paling bervariasi. Tingginya variasi harga bawang merah di tingkat produsen dilihat dari nilai koefisien variasi-nya (CV) yang paling besar. Ini menunjukkan juga pengecer menghadapi harga yang stabil dibandingkan dengan lembaga pemasaran lainnya. Penelitian Khotimah (2013) menunjukkan hasil yang serupa yaitu petani menghadapi volatilitas harga yang paling tinggi. Perubahan harga produsen yang lebih besar dibandingkan grosir dan pengecer terkait dengan

fasilitas penyimpanan bawang merah di tingkat petani yang masih sedikit sehingga dengan karakteristik yang cepat rusak (*perishable*) menyebabkan harganya cenderung berfluktuasi paling tinggi.

Langkah pertama untuk menganalisis transmisi harga adalah dengan menguji stasioneritas series harga bawang merah di tingkat produsen, grosir dan pengecer. Pengujian ini dilakukan untuk melihat konsistensi pergerakan data *time series* serta mencegah terjadinya *spurious regression*. Konsistensi data

diperlukan karena adanya dugaan bahwa data bersifat non stasioner. Hal ini sering terjadi pada saat kedua atau lebih data *time series* menunjukkan karakteristik tren yang kuat dalam kurun waktu. Dalam penelitian ini akan diuji stasioneritas dengan *Augmented Dicky Fuller Test* (ADF). Apabila nilai t-ADF lebih kecil dari nilai kritis Mackinnon maka data yang digunakan adalah stasioner. Pengujian ini dilakukan sampai pada level *first difference* dengan hasil pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Stationeritas Data

Variabel	Nilai ADF	
	Level	<i>First Difference</i>
Harga Grosir	2.517	10.066*
Harga Konsumen	1.851	10.155*
Harga Produsen	-0.746	7.830*

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0
Keterangan: *Stationer pada taraf signifikansi 5%.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel harga produsen, harga grosir dan harga konsumen bawang merah tidak stasioner pada level. Setelah dilakukan pengujian pada *first difference* pada semua variabel menunjukkan variabel telah stasioner. Adanya

variabel yang tidak stasioner pada level mengindikasikan, terjadinya hubungan jangka panjang antar variabel.

Untuk menguji terjadinya hubungan jangka panjang antar harga lembaga pemasaran, dilakukan uji kointegrasi dengan hasil pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Test Kointegrasi

r ≤	Produsen – Grosir	Grosir – Konsumen
0	37.434*	26.396*
1	7.128*	7.616*

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0
Keterangan: *signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 4 di atas memperlihatkan baik hubungan produsen–grosir maupun grosir–konsumen memiliki nilai t-statistik yang signifikan pada taraf signifikansi 5 %. Ini menunjukkan bahwa pada kedua model tersebut terjadi kointegrasi artinya terdapat hubungan jangka panjang di antara variabel.

Uji Kausalitas

Uji kausalitas digunakan untuk menguji arah hubungan antar dua

variabel. Kaitannya dengan transmisi harga, pengujian ini dilakukan untuk melihat arah transmisi harga yaitu apakah dalam pemasaran bawang merah di Indonesia harga lebih ditentukan dari sisi hulu (*upstream*) ataukah lebih ditentukan dari perubahan dari sisi hilir (*downstream*). Dalam penelitian ini, pengujian kausalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Granger causality test*. Hasil *Granger causality test* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil *Granger Causality Test*.

Hubungan	Jumlah Lag	t-Statistic
Grosir → Produsen	1	-1.456
Produsen → Grosir	1	-2.238*
Grosir → Pengecer	1	-5.804*
Pengecer → Grosir	1	-1.301

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0

Keterangan: *signifikan pada taraf signifikansi 5%, → mempengaruhi.

Berdasarkan Tabel 5, pada hubungan antara produsen dengan grosir menunjukkan bahwa harga produsen mempengaruhi harga grosir di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) sebaliknya harga grosir tidak mempengaruhi harga produsen bawang merah di Jawa Tengah.

Pada hubungan grosir dengan pengecer harga grosir mempengaruhi harga yang terbentuk di tingkat pengecer akan tetapi harga bawang merah di tingkat pengecer tidak mempengaruhi harga di tingkat grosir. Ini menunjukkan kecenderungan harga antar lembaga pemasaran bawang

merah di Indonesia bersifat satu arah atau memiliki hubungan vertikal ke atas. Dengan demikian, pembentukan harga bawang merah di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh perubahan dari sisi penawaran (*supply side*).

Mengenai pembentukan harga bawang merah yang lebih ditentukan dari sisi penawaran. Prastowo, Yanuarti & Depari (2008) menjelaskan bahwa sisi permintaan komoditas pertanian, khususnya komoditas pangan pokok seperti bawang merah cenderung stabil. Meskipun tekanan dari sisi permintaan dapat terjadi, namun derajatnya relatif rendah. Tekanan dari sisi permintaan

hanya bersumber dari peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan. Kedua faktor tersebut sifatnya lebih mudah ditekan, dibandingkan faktor cuaca dan musim yang mempengaruhi sisi penawaran.

Selanjutnya, pengujian asimetris dilakukan apakah transmisi harga terjadi secara sempurna antara produsen dengan grosir dan grosir dengan pengecer. Dalam penelitian ini, terdapat dua model asimetris yang digunakan. Pertama model asimetris menggunakan

model Houck. Dalam model ini, kondisi asimetri jangka pendek akan dilihat dari koefisien segmentasi harga naik dan turun pada waktu t dan $t-1$ nya sedangkan dalam jangka panjang dilihat dari penjumlahan koefisien pada waktu t dan $t-1$. Apabila kedua koefisien tersebut identik maka transmisi harga terjadi secara simetris. Untuk lebih jelasnya hasil analisis transmisi harga menggunakan model *Houck* dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Estimasi Model Asimetris Dengan Model *Houck*.

Variabel	Produsen → Grosir	Variabel	Grosir → Pengecer
Konstanta	137.064 (0.628)	Konstanta	-0.012 (0.624)
ΔPP_t^-	1.172*** (0.000)	ΔGP_t^-	0.492*** (0.000)
ΔPP_t^+	1.366*** (0.000)	ΔGP_t^+	0.657*** (0.000)
ΔPP_{t-1}^-	0.025 (0.817)	ΔGP_{t-1}^-	0.150* (0.104)
ΔPP_{t-1}^+	-0.249*** (0.004)	ΔGP_{t-1}^+	0.097 (0.246)
Kumulatif turun	1.197	Kumulatif turun	0.642
Kumulatif naik	1.117	Kumulatif naik	0.754
R ²	0.877	R ²	0.700
R ² -Adj.	0.871	R ² -Adj.	0.684
F-Statisitik	138.494 (0.000)	F-Statisitik	44.962 (0.000)
DW Stat.	2.345	DW Stat.	2.295

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0

Keterangan: ***signifikan pada taraf signifikansi 1%, *signifikan pada taraf signifikansi 10%.

Tabel 6. memperlihatkan bahwa pada hubungan produsen-grosir terdapat perbedaan koefisien antara PP^- dan PP^+ pada periode ke t . Ini menunjukkan pada saat terjadi kenaikan bawang merah di tingkat petani akan ditransmisikan secara berbeda dengan perubahan penurunan harga. Untuk variabel harga produsen pada periode sebelumnya menunjukkan tingkat signifikansi yang berbeda di mana hanya signifikan pada saat kenaikan harga produsen. Artinya penurunan harga bawang merah di tingkat produsen pada waktu sebelumnya tidak akan berpengaruh pada harga bawang merah di level grosir.

Secara kumulatif pada hubungan produsen-grosir, respon kenaikan harga lebih kecil dibandingkan pada saat terjadi penurunan harga di tingkat produsen. Hal ini terkait kedudukan pedagang grosir di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) sebagai pusat distribusi terbesar di Indonesia dengan volume penjualan yang besar sehingga perubahan harga sangat mempengaruhi signifikan keuntungan pedagang. Pedagang grosir lebih merespon cepat pada saat harga turun dibandingkan pada saat harga naik dilakukan untuk menjaga langganan dan *market share*-nya. Temuan Ahn & Lee (2015) menjelaskan bahwa lebih respon grosir pada saat penurunan harga di tingkat petani terkait dengan sifat hortikultura yang cepat rusak. Oleh karena itu, pedagang grosir memilih untuk mengurangi risiko busuk atau tidak laku dengan bereaksi terhadap penurunan dibandingkan kenaikan harga di tingkat petani.

Pada hubungan grosir - pengecer, respon harga pengecer juga

menunjukkan respon yang berbeda pada saat kenaikan dan penurunan di tingkat grosir. Respon pengecer (harga konsumen) pada saat harga naik lebih besar dibandingkan pada saat harga di tingkat grosir mengalami penurunan. Selanjutnya pada pengaruh harga grosir pada periode sebelumnya ($t-1$) hanya signifikan pada saat mengalami penurunan. Artinya kenaikan harga bawang merah di tingkat grosir pada periode sebelumnya tidak akan berpengaruh pada harga bawang merah di tingkat pengecer (konsumen).

Berbeda pada hubungan produsen-grosir, secara kumulatif respon kenaikan harga oleh pengecer lebih besar dibandingkan pada saat terjadi penurunan harga di tingkat grosir. Adanya perilaku respon yang lebih pada saat harga naik mengindikasikan bahwa pengecer berusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hasil ini berbeda dengan temuan Rajendran (2015) di mana pedagang pengecer lebih cepat merespon pada saat terjadi penurunan dibandingkan kenaikan harga di tingkat grosir. Jika dilihat tingkat permintaan yang tinggi di Kota Jakarta menyebabkan permainan harga di tingkat pengecer menjadi lebih besar, sehingga perubahan harga tidak mempengaruhi keuntungannya.

Selanjutnya, pada model dinamis kedua menggunakan metode yang dikembangkan Von Cramon-Taubadel & Loy (1996), dimana transmisi harga tidak simetris dipisahkan antara transmisi jangka pendek dengan transmisi jangka panjang. Pada model ini pengujian kondisi asimetris tidak hanya dilakukan terhadap koefisien ECT^+ dan ECT^-

tetapi pada terhadap shock positif dan shock negatif (Yustiningsih, 2012). Shock positif merupakan kondisi di mana variabel *independent* mengalami perubahan kenaikan sedangkan shock negatif menunjukkan penurunan harga pada variabel independent.

Koefisien ECT ini pada dasarnya menggambarkan kondisi harga di salah satu level tidak sesuai dengan kondisi keseimbangannya (Yustiningsih, 2012). Pergerakan harga dikatakan berada pada garis keseimbangan apabila kenaikan harga di tingkat petani diikuti dengan kenaikan harga di tingkat grosir dan penurunan harga di tingkat petani diikuti dengan penurunan harga di tingkat grosir juga.

ECT⁺ menggambarkan kondisi penyimpangan harga saat berada di atas garis keseimbangan jangka panjang yaitu pada saat penurunan harga

bawang merah di tingkat petani tidak diikuti dengan penurunan harga bawang di level grosir atau pada saat penurunan harga bawang merah di tingkat grosir tidak diikuti dengan penurunan harga bawang di level konsumen. Sebaliknya ECT⁻ menggambarkan kondisi penyimpangan harga saat berada di bawah garis keseimbangan jangka panjang yaitu pada saat kenaikan harga bawang merah di tingkat petani tidak diikuti dengan penurunan harga bawang di level grosir atau pada saat penurunan harga bawang merah di tingkat grosir tidak diikuti dengan penurunan harga bawang di level konsumen. Apabila kedua koefisien tersebut identik maka transmisi harga terjadi secara simetris. Untuk lebih jelas hasil analisis transmisi harga menggunakan model ECM-EG dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7. Hasil Estimasi Model Asimetris Dengan Model ECM-EG.

Variabel	Produsen → Grosir	Variabel	Grosir → Pengecer
Konstanta	110.596 (0.661) 0.437***	Konstanta	-0.004 (0.854) 0.018
ΔGP^-_{t-1}	(0.000) -0.170	ΔCP^-_{t-1}	(0.910) 0.278
ΔGP^+_{t-1}	(0.393) 1.155***	ΔCP^+_{t-1}	(0.163) 0.591***
ΔPP^-_t	(0.000) 0.383***	ΔGP^-_t	(0.000) 0.563***
ΔPP^+_t	(0.000) -0.510***	ΔGP^+_t	(0.000) 0.131
ΔPP^-_{t-1}	(0.004) 0.115	ΔGP^-_{t-1}	(0.283) -0.261
ΔPP^+_{t-1}	(0.650) -0.533***	ΔGP^+_{t-1}	(0.142) -0.875***
ECT ⁻	(0.007) -0.759***	ECT ⁻	(0.000) -0.203
ECT ⁺	(0.001)	ECT ⁺	(0.181)
R ²	0.927	R ²	0.781
R ² -Adj.	0.919	R ² -Adj.	0.758
F-Statisitik	116.436 (0.000)	F-Statisitik	32.724 (0.000)
DW-Stat.	1.879	DW-Stat.	2.075

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0

Keterangan: ***signifikan pada taraf signifikansi 1%.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa transmisi harga dalam jangka pendek antara produsen-grosir secara deskriptif terjadi perbedaan respon harga grosir terhadap kenaikan dan penurunan harga di tingkat produsen. Perubahan harga naik dan turun di tingkat produsen menunjukkan nilai yang signifikan artinya baik pada saat terjadi kenaikan dan penurunan harga bawang merah pada periode t ditingkat produsen akan direspon oleh pedagang grosir. Untuk harga produsen pada periode sebelumnya ($t-1$), hanya signifikan

pada penurunan harga produsen pada periode sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa, hanya penurunan harga di tingkat produsen ($t-1$) yang direspon oleh pedagang grosir. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Brooker *et al* (1997) dan Girapunthong, Reunwick, dan Vansickle (2003) di mana grosir lebih merespon cepat pada saat harga turun dibandingkan pada saat harga naik.

Pada transmisi jangka panjang antara produsen – grosir, terdapat kesamaan tanda koefisien antara ECT⁺

dan ECT⁻. Koefisien ECT⁺ bernilai negatif sebesar 0.757 sedangkan ECT⁻ sebesar 0.533. Koefisien ECT⁻ dengan nilai koefisien 0.533 menunjukkan lama penyesuaian menuju keseimbangan sekitar 6 bulan. Artinya, ketika terjadi kenaikan harga di tingkat grosir, maka harga tersebut akan kembali ke keseimbangan 6 bulan setelahnya.

Selanjutnya, pada hubungan grosir-konsumen terlihat transmisi harga dalam jangka pendek antara grosir-konsumen secara deskriptif terjadi perbedaan respon harga konsumen terhadap kenaikan dan penurunan harga di tingkat grosir. Kedua variabel GP⁻ dan GP⁺ menunjukkan nilai yang signifikan. Artinya baik pada saat terjadi kenaikan dan penurunan harga bawang merah ditingkat grosir pada periode t akan direspon oleh pedagang pengecer. Harga grosir pada periode sebelumnya (t-1) menunjukkan nilai yang tidak signifikan artinya baik perubahan kenaikan dan penurunan harga di tingkat grosir pada waktu sebelumnya tidak

akan mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

Pada hubungan jangka panjang yang dilihat dari nilai ECT-nya yaitu ECT⁺ dan ECT⁻ menunjukkan nilai signifikansi yang berbeda yaitu hanya signifikan pada koefisien ECT⁻. Kedua tanda koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pada saat penyimpangan harga berada di atas garis keseimbangan maka penyimpangan tersebut akan kembali ke kondisi keseimbangan. Koefisien ECT⁻ dengan tanda 0.875 dapat diartikan bahwa penyimpangan yang disebabkan kenaikan harga bawang merah di level grosir akan kembali ke keseimbangan setelah 10 bulan berikutnya. Secara deskriptif, dengan melihat nilai koefisien dan signifikansi variabel ECT⁻ dan ECT⁺ sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa transmisi harga grosir terhadap harga pedagang pengecer bawang merah terjadi secara asimetris. Untuk melihat pengaruh pembentukan harga dari hulu ke hilir, dapat dilihat nilai elastisitas dari kedua model pada Tabel 8.

Tabel 8. Elastisitas Transmisi Harga Dengan Model *Houck* dan ECM-EG.

Kausalitas	Variabel	Jangka pendek		Jangka panjang	
		Houck	ECM-EG	Houck	ECM-EG
Produsen–Grosir	ΔPP^-	0.884	0.841	0.903	0.456
	ΔPP^+	1.030	0.288	0.842	0.375
Grosir–Konsumen	ΔGP^-	0.338	0.405	0.397	0.467
	ΔGP^+	0.451	0.386	0.499	0.306

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai elastisitas transmisi harga terbesar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terjadi pada hubungan

produsen-grosir. Ini menunjukkan, pedagang grosir lebih respon terhadap perubahan harga dibandingkan pedagang pengecer. Dalam jangka

panjang, pedagang grosir lebih respon terhadap penurunan harga dibandingkan kenaikan harga di tingkat produsen.

Selain itu, elastisitas transmisi harga antara produsen dengan grosir pada saat harga turun lebih besar dibandingkan pada saat harga produsen mengalami kenaikan. Nilai elastisitas pada harga petani turun yang lebih besar dari 1 menunjukkan transmisi antar keduanya bersifat elastis. Artinya apabila ada perubahan harga di level petani maka harga di level grosir akan langsung berubah sedangkan transmisi harga pada di level petani saat mengalami kenaikan bersifat inelastis. Sebaliknya, pada transmisi harga antara grosir dengan konsumen nilai elastisitas transmisi pada saat harga naik di tingkat grosir lebih besar dibandingkan pada saat harga turun dalam jangka pendek dengan nilai yang lebih kecil dari 1. Ini menunjukkan pedagang pengecer bawang tidak akan cepat berubah terhadap perubahan harga bawang merah di tingkat grosir.

Dalam jangka panjang, pada model houc transmisi harga bersifat inelastis baik pada hubungan produsen-grosir dan grosir-konsumen. Hal yang berbeda, pada model ECM-EG, transmisi harga bersifat elastis dijumpai pada saat harga turun pada hubungan antara produsen-grosir. Dengan demikian, dalam jangka panjang elastisitas transmisi harga antar lembaga pemasaran bawang merah bersifat inelastis atau tidak respon perubahan harga dari sisi penawaran.

Lebih lanjut, keterkaitan dengan asimetris harga yang dijumpai pada hubungan grosir-konsumen yang

disebabkan oleh perilaku pedagang pengecer dapat dilihat nilai elastisitasnya. Pada kedua model, elastisitas transmisi harga antara grosir dengan pengecer bersifat inelastis. Ini menunjukkan bahwa, adanya perilaku tidak respon pengecer terhadap perubahan harga di tingkat grosir. Dengan kata lain baik saat harga naik atau turun, pedagang pengecer akan menahan perubahan harganya baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan adanya perilaku tersebut, pedagang pengecer berusaha untuk mendapat keuntungan yang lebih sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan konsumen dari harga yang dibayarkannya.

Faktor Penyebab Transmisi Harga Tidak Simetris

Dari hasil pengujian baik dengan metode Houck dan ECM-EG dapat dilihat secara deskriptif bahwa terdapat perbedaan respon harga di tingkat hilir akibat perubahan kenaikan dan penurunan harga di tingkat hulu. Untuk memastikan perbedaan dilakukan *Wald test* terhadap koefisien-koefisien tersebut apakah identik atau tidak sama. Hasil pengujian ini kemudian akan menjadi ukuran keidentikan antara koefisien *shock* positif dan *shock* negatif jangka pendek serta jangka panjang dari model asimetris dinamis. Apabila berbeda maka terdapat transmisi harga yang bersifat asimetris.

Yustiningsih (2012) menjelaskan bahwa transmisi harga tidak simetris yang disebabkan oleh faktor *adjustment cost* dilihat dengan cara

memisahkan variabel independen antara variabel positif dengan variabel negatif, dan kemudian membandingkan apakah koefisien

keduanya identik atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat pada hasil pengujian koefisien dengan menggunakan *Wald test* pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Estimasi *Wald Test* Pada Kesimetrisan Harga Bawang Merah Antar Lembaga Pemasaran

Model	Hipotesis	F Statistik
Houck	$H_0: \Delta PP_t^- = \Delta PP_t^+$	1.575 (0.213)
	$H_0: \Delta PP_{t-1}^- = \Delta PP_{t-1}^+$	3.025 (0.082)*
	$H_0: \sum_{i=0}^m PP_t^- = \sum_{i=0}^m PP_t^+$	0.162 (0.688)
	$H_0: \Delta GP_t^- = \Delta GP_t^+$	1.265 (0.264)
	$H_0: \Delta GP_{t-1}^- = \Delta GP_{t-1}^+$	1.187 (0.279)
	$H_0: \sum_{i=0}^m GP_t^- = \sum_{i=0}^m GP_t^+$	0.284 (0.595)
ECM-EG	$H_0: \Delta PP_t^- = \Delta PP_t^+$	3.324 (0.072)*
	$H_0: \Delta PP_{t-1}^- = \Delta PP_{t-1}^+$	4.126 (0.045)**
	$H_0: \Delta GP_t^- = \Delta GP_t^+$	0.042 (0.836)
	$H_0: \Delta GP_{t-1}^- = \Delta GP_{t-1}^+$	2.496 (0.118)
	$H_0: ECT^- = ECT^+$ (produsen-grosir)	0.420 (0.518)
	$H_0: ECT^- = ECT^+$ (grosir-konsumen)	5.101 (0.026)**

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0

Keterangan: (°)p-value, **signifikan pada taraf signifikansi 5%, *signifikan pada taraf signifikansi 10%.

Hasil uji *Wald* pada Tabel 9 menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat asimetris transmisi harga pada hubungan petani-grosir sedangkan grosir-konsumen menunjukkan hubungan yang simetris. Mengenai hal ini, Yustiningsih (2012) menjelaskan bahwa asimetris harga dalam jangka pendek disebabkan oleh adanya sejumlah tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk menyesuaikan harganya. Dalam ilmu ekonomi biaya tersebut dikenal

dengan *adjustment cost* atau *menu cost* seperti biaya yang digunakan untuk melakukan perubahan label, katalog harga dan biaya periklanan. Sejalan dengan hasil tersebut, Karantininis, Katrakilidis, & Persson (2011) menunjukkan bahwa transmisi harga tidak simetris dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, transmisi harga disebabkan oleh faktor *adjustment cost* di mana tanpa adanya *market power* maka harga akan melakukan penyesuaian

kembali menuju ke garis keseimbangan jangka panjangnya.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pedagang grosir akan memasang label harga jika perubahan tersebut dirasakan permanen, akan tetapi apabila perubahan tidak permanen maka tidak akan memasang label harga pada bawang merah yang dijualnya. Menurut McCorriston, Morgan & Rainer (2000), ketidakpastian apakah perubahan harga terjadi secara permanen atau hanya bersifat sementara menghalangi pedagang untuk merespon sinyal perubahan harga. Sehingga perubahan harga yang tidak terlalu signifikan tidak akan ditransmisikan secara sempurna oleh pedagang.

Sementara itu, dalam jangka panjang yang dilihat dari koefisien ECT positif dan negatif menunjukkan hasil yang berbeda. Pada model petani-grosir menunjukkan hasil yang tidak signifikan sedangkan grosir-konsumen menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan kata lain adanya *market power* di tingkat pedagang pengecer. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kharin (2015) yang menunjukkan bahwa perubahan harga tidak ditransmisikan dari lembaga pemasaran ke lainnya serta pedagang pengecer umumnya mempunyai *market power* lebih dibandingkan petani. Secara keseluruhan dari hasil tersebut menunjukkan adanya transmisi harga yang tidak sempurna dalam saluran pemasaran bawang merah di Indonesia.

Perbedaan mendasar antara transmisi harga yang disebabkan oleh *market power* dengan *adjustment cost* adalah dalam hal waktu. *Adjustment*

cost sifatnya hanya menunda proses transmisi atau penyesuaian harga. Sementara asimetri yang disebabkan oleh *market power* dapat bertahan dalam waktu yang lama, karena tidak hanya berpengaruh dari sisi *time of adjustment* tetapi juga mempengaruhi *magnitude of adjustment* (Meyer & von-Cramon Taubadel, 2004). Hal ini terlihat dari koefisien ECT pada hubungan grosir-pengecer di mana ketika terjadi kenaikan harga bawang merah di tingkat pengecer akan kembali ke keseimbangan 9 bulan setelahnya.

Acquah & Onumah (2010) menemukan bahwa adanya asimetris harga disebabkan inelastisitas permintaan di tingkat konsumen, sehingga dapat mengontrol harga jualnya di mana pengecer lebih cepat bereaksi terhadap kenaikan dibandingkan penurunan harga di tingkat grosir. Jika dilihat, Kota Jakarta sebagai pusat konsumen terbesar di Indonesia dengan tingkat permintaan yang tinggi menyebabkan perubahan harga di tingkat pengecer tidak akan mempengaruhi permintaan konsumen sehingga kecenderungan permainan harga di tingkat pengecer semakin besar.

Lebih lanjut, Bakucs, Falkowski & Ferto (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa asimetris harga lebih ditemukan pada struktur pertanian yang terfragmentasi. Ini menunjukkan bahwa, struktur pertanian khususnya pada komoditi bawang merah tidak terintegrasi dengan baik antara sentra produsen (Kabupaten Brebes) dengan sentra konsumen (Kota Jakarta).

Penyalahgunaan *market power* oleh pedagang perantara dalam rantai pasar

bawang merah di Indonesia umumnya terkait struktur pasarnya. Prastowo, Yanuarti & Depari (2008) menyatakan menjelaskan bahwa struktur pasar sangat mempengaruhi besar kecilnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh agen ekonomi dalam rantai pemasaran. Struktur pasar pada pedagang pengecer yang cenderung persaingan sempurna maka fakta adanya *market power* di tingkat pedagang ini mengindikasikan bahwa adanya pengaturan harga oleh satu atau beberapa pedagang.

Adanya *market power* di tingkat pengecer menyebabkan kegagalan pasar (*market failure*) dalam pemasaran bawang merah di Indonesia yaitu ketidakmampuan pasar berfungsi secara efisien. Ini didukung oleh Nurasa & Darwis (2007) menunjukkan dalam pemasaran bawang merah dari pusat produksi (Kab.Brebes) sampai pusat konsumsi (Jakarta) yang mendapatkan keuntungan terbesar berada pada pedagang pengecer. Hal ini dilihat dari share yang diperoleh pedagang pengecer sebesar 53.55–56.03 %.

Selain itu, adanya *market power* juga mengindikasikan terjadinya kolusi antar pedagang pengecer dalam menaikkan harga guna mendapatkan profit yang lebih tinggi. Mengenai hal ini, Alfarisi (2010) menjelaskan bahwa dalam *prisoner dilemma* (dilema tahanan) yaitu pada kondisi suatu pasar, perusahaan-perusahaan yang berada di dalamnya akan dapat lebih memaksimalkan keuntungannya jika perusahaan tersebut saling berkerjasama di dalam menentukan harga dan kuantitas

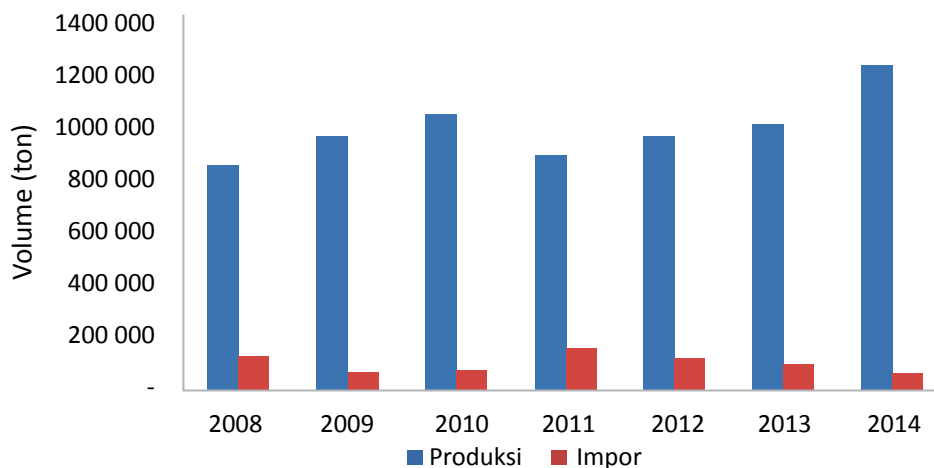
produknya. Lebih lanjut, ketika pedagang pengecer memutuskan untuk saling berkolusi (menaikkan harga di atas normal), maka keuntungan yang didapat akan lebih besar. Sehingga, agar keuntungan yang di dapat menjadi maksimal, maka pedagang pengecer membentuk semacam perjanjian kerjasama dalam menentukan harga. Strategi tersebut merupakan *Nash equilibrium* yang efisien karena memberikan *payoff* (keuntungan) yang lebih besar dibandingkan berkompetisi antar pengecer.

Perilaku pedagang perantara juga terkait dengan persepsinya. Komoditi bawang merah yang tidak mempunyai harga standar menyebabkan pedagang mempunyai kekuatan dalam menaikkan dan menurunkan harga sesukanya. Adanya kenaikan harga yang lebih direspon pedagang pengecer menunjukkan bahwa penurunan harga bawang merah di level grosir hanya bersifat sementara sehingga dalam jangka panjang, responnya terhadap penurunan harga bawang merah di tingkat grosir menjadi tidak sensitif. Sebaliknya, pedagang pengecer menganggap bahwa kenaikan harga bawang merah di level grosir sifatnya permanen. Beberapa hasil penelitian yang terkait seperti Bor, Ismihan, & Bayaner (2014); Rajcaniova dan Pokrivcak (2013) menemukan bahwa pedagang pengecer lebih cepat bereaksi terhadap kenaikan harga di tingkat grosir dibandingkan penurunan harga ditingkat grosir.

Hubungan harga impor bawang merah dengan harga produsen dan konsumen

Dalam beberapa tahun kecenderungan impor bawang merah Indonesia, cenderung meningkat. Rata-

rata pertumbuhan impor bawang merah Indonesia sebesar 5,36% sedangkan produksi bawang merah domestik sebesar 2,62%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:



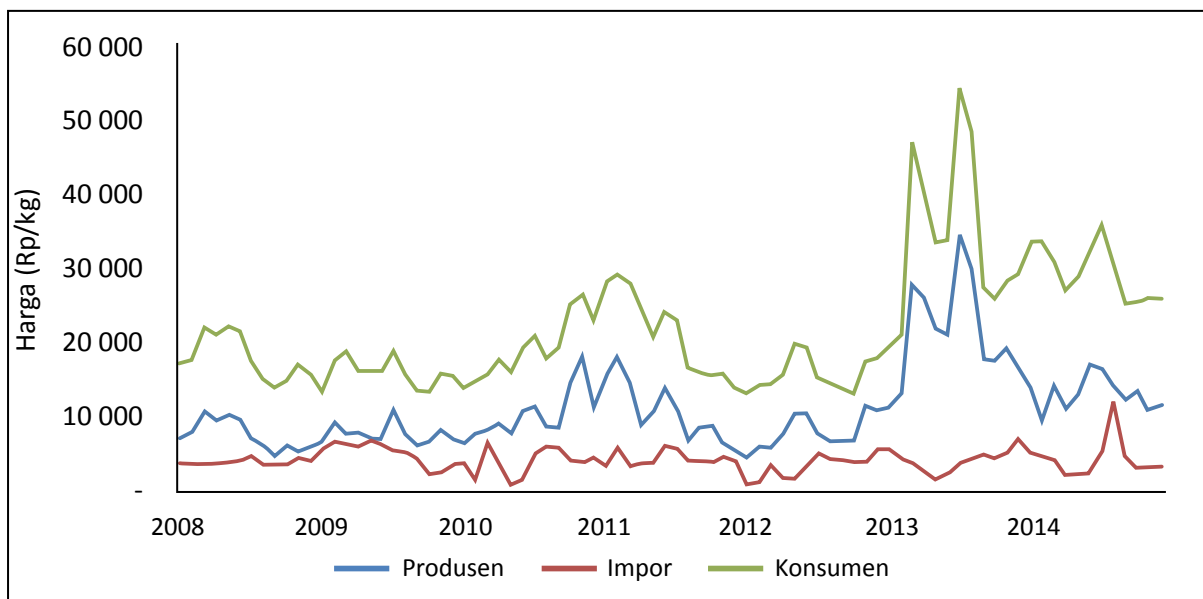
Gambar 3. Perkembangan Tahunan Impor dan Produksi Bawang Merah di Indonesia Tahun 2008-2014.

Sumber: BPS (2014c), diolah.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa produksi dan impor bawang merah di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2008 sampai 2014. Namun, kontribusi impor bawang merah terhadap produksi nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan peran impor bawang merah di Indonesia semakin besar. Adanya impor bawang merah tentunya akan mempengaruhi harga bawang merah lokal yang terbentuk di tingkat produsen dan konsumen.

Lebih lanjut, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa pembukaan impor untuk barang

kebutuhan pokok, termasuk bawang merah, adalah opsi terakhir. Kemendag mengungkapkan, opsi impor dibuka karena lonjakan harga bawang merah pada beberapa pekan terakhir (Gatra News, 08 Juni 2015). Untuk itu, tujuan dari adanya impor ini untuk menutupi kekurangan kebutuhan dari pasokan dalam negeri. Sehingga sasaran, dari adanya impor ini adalah harga bawang merah di tingkat konsumen. Berikut adalah perbandingan harga bawang merah domestik di tingkat produsen, dan konsumen serta harga bawang merah impor dari tahun 2008 sampai 2014.



Gambar 4. Perkembangan Bulanan Harga Bawang Merah Impor, Produsen dan Konsumen di Indonesia Tahun 2008-2014.

Sumber: BPS (2014a, 2014c), diolah.

Gambar 4 menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2014 rata-rata harga impor bawang merah lebih rendah dibandingkan dengan harga bawang merah lokal di tingkat produsen dan konsumen. Untuk melihat hubungan dan pengaruh impor dari bawang merah terhadap harga bawang merah domestik di tingkat konsumen dan produsen dilakukan diuji kointegrasi dan *Granger*

causality dalam jangka panjang. Uji kausalitas *Granger* dilakukan untuk melihat pengaruh harga impor bawang merah terhadap pembentukan harga bawang merah di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sedangkan uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang dan ada pola yang berkelanjutan. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Hasil Uji Kointegrasi Menggunakan *Trace* Statistik

r≤	Produsen-Impor		Konsumen-Impor	
	Trace	Prob	Trace	Prob
0	24.441*	0.001	26.614*	0.000
1	7.875*	0.005	9.1903*	0.002

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0

Keterangan: *signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 11. Hasil Uji *Granger Causality* Jangka Panjang

Causality	Jumlah lag	Hipotesis $H_0: \pi_1 = 0$
Impor—>Produsen	1	-0.184* (0.007)
Impor—>Konsumen	1	-0.202* (0.004)

Sumber: Pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0

Keterangan: *signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil uji kointegrasi menggunakan *Johannsen cointegration* terlihat bahwa adanya integrasi yang kuat antara harga bawang merah di tingkat pengecer dengan bawang merah impor. Hasil yang sama juga terlihat pada pengujian menggunakan *Granger causality*. Ini menunjukkan kebijakan impor bawang merah mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap harga bawang merah di tingkat konsumen. Hal yang sama juga terjadi pada hubungan antara harga impor dengan harga produsen bawang merah. Hasil uji kointegrasi ini memberikan gambaran adanya pola harga yang berkelanjutan antara harga bawang merah impor dengan harga bawang merah domestik. Temuan ini ternyata sama dengan penelitian Tanko & Amikuzuno (2015) yang menemukan adanya hubungan yang kuat antara harga impor dengan harga di tingkat domestik. Sedangkan hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa harga impor akan ditransmisikan ke tingkat konsumen dan produsen bawang merah sebagaimana temuan Akpan, Patrick & Udoka (2014).

Implikasi dari hasil kausalitas *Granger* dan uji kointegrasi menunjukkan kebijakan impor efektif

dalam mengendalikan harga di tingkat konsumen bawang merah. Namun, di sisi yang lain impor bawang merah juga berpengaruh dalam pembentukan harga bawang merah di tingkat produsen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Koutroumanidis, Zafeiriou & Arabatzis (2009) menemukan impor sangat mempengaruhi harga yang terbentuk di tingkat produsen.

Dengan masuknya bawang merah impor ke Indonesia yang lebih murah, pedagang akan menetapkan harga eceran bawang merah dengan memperhatikan tekanan harga bawang merah impor. Sehingga pedagang pengecer akan menurunkan harga bawang merah (lokal) di tingkat konsumen. Harga yang rendah ini akan ditransmisikan kepada harga bawang merah kepada pedagang di bawahnya sampai ke tingkat petani sehingga mempengaruhi harga yang diterimanya. Seperti temuan Kofi & Vijaya (2016) menjelaskan bahwa pedagang perantara akan melakukan transmisi harga yang lebih cepat pada saat terjadi kenaikan harga di hulu (produsen) atau penurunan harga di hilir (konsumen) dibandingkan pada saat terjadi penurunan di hulu atau kenaikan di hilir.

Transmisi harga yang sempurna dilakukan oleh pedagang terkait kemampuan *market power* yang dimilikinya sehingga meskipun harga di tingkat konsumen menurun, pedagang akan cepat bereaksi sehingga mampu menjaga margin keuntungannya tetap tinggi. Di lain pihak, produsen bawang merah dengan *bargaining position* yang rendah menerima harga yang lebih rendah akibat masuknya bawang merah impor.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari hasil pengujian transmisi harga diketahui bahwa baik model *Houck* dan ECM-EG menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya asimetris transmisi harga antar lembaga pemasaran bawang merah di Indonesia. Pada hubungan petani (produsen)-grosir terjadi asimetris harga dalam jangka pendek sedangkan grosir-pengecer terjadi asimetris dalam jangka panjang.

Asimetris transmisi harga dalam jangka pendek disebabkan oleh biaya penyesuaian (*adjustment cost*) sedangkan asimetris transmisi harga dalam jangka panjang disebabkan oleh kekuatan pasar (*market power*) pedagang pengecer. Penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pedagang yang berujung pada transmisi harga tidak simetris, didukung oleh struktur pasar pedagang yang mengarah pada oligoposoni/oligopoli, dimana jumlah pedagang perantara relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah petani dan konsumen serta inelastisnya

permintaan bawang merah di perkotaan menyebabkan *market power* yang dimiliki pedagang relatif besar. Akibatnya, pedagang perantara dapat dengan mudah menetapkan harga sesuai dengan tingkat margin yang diharapkan (*price maker*).

Impor bawang merah memiliki integrasi dan pengaruh yang kuat dengan harga bawang merah di tingkat konsumen dan produsen di Indonesia. Dengan demikian impor bawang merah bukan hanya mempengaruhi pembentukan harga di tingkat konsumen (sasaran utama) namun juga mempengaruhi harga yang terbentuk di tingkat produsen. Fakta adanya *market power* di tingkat pedagang pengecer, menyebabkan petani bawang merah menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan penyalahgunaan kekuatan pasarnya.

Kebijakan yang perlu dilakukan yaitu pengaturan harga bawang merah di tingkat konsumen dan produsen melalui harga plafon (*ceiling price*) dan harga dasar (*floor price*). *Ceiling price* diharapkan dapat menghindari perilaku eksploitasi yang dilakukan pedagang perantara, dalam bentuk penetapan harga bawang yang terlampaui tinggi di level konsumen. Selain itu, pemerintah perlu untuk menentukan rentang harga yang wajar yaitu tingkat harga yang tidak eksploitatif bagi konsumen namun tetap memberikan margin yang ideal bagi pedagang perantara. Untuk petani, kebijakan *floor price* pada komoditi bawang merah disertai pengaturan impor agar petani tidak mendapatkan harga yang terlalu rendah sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pengembangan sistem informasi di pedesaan juga diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar petani serta pengembangan kelompok tani sangat penting untuk mengatasi pasar bawang merah yang bersifat oligopsoni di tingkat petani. Kebijakan impor yang diambil pemerintah perlu memperhatikan waktu produksi bawang merah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang membantu terwujudnya penulisan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acquah, H. G. dan E.E. Onumah. (2010). A Comparison of The Different Approaches to Detecting Asymmetry in Retail-Wholesale Price Transmission. *American-Eurasian Journal of Scientific Research*. Vol. 5(1), pp. 60-66.
- Ahn, B. & H. Lee. (2015). Vertical Price Transmission of Perishable Products: The Case of Fresh Fruits in the Western United States. *Journal of Agricultural and Resource Economics*. Vol. 40(3) pp. 405–424.
- Akpan, S. B., I.V. Patrick., S. J. Udoka. (2014). Analysis of Monthly Price Transmission of Local and Foreign Rice in Rural and Urban Markets in Akwa Ibom State, Nigeria. *International Journal of Agriculture and Forestry*. Vol. 4(1), pp. 6-18
- Alfarisi, D. A. (2010). Metode Untuk Mendeteksi Kolusi. *Jurnal Persaingan Usaha*. Vol. 3(1) pp. 35-60.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014a). *Harga Produsen dan Konsumen Sub Sektor Hortikultura Kelompok Sayur-Sayuran*. Jakarta: BPS Nasional.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014b). *Luas Panen Sayuran di Indonesia, 2009 - 2014*. Jakarta: BPS Nasional.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014c). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor, 2009 - 2014*. Jakarta: BPS Nasional.
- Bor, Ö., M. Ismihan, A. Bayaner. (2014). Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in The Turkish Fluid Milk Market *New Medit*. Vol 2(1), pp. 1-8.
- Bakucs, Z J. Falkowski dan I. Ferto. (2013). Does Market Structure Influence Price Transmission In The Agro-Food Sector? A Meta-Analysis Perspective. *Journal of Agricultural Economics*. Vol. 65(1), pp. 1-25.
- Brooker, J.R., D.B. Eastwood, B.T. Carver and M.D. Gray. (1997). Fresh Vegetable Price Linkage Between Grower/Shippers, Wholesalers, and Retailers. *Journal of Food Distribution Research*. Vol. 28 (1), pp. 54-60
- Conforti, P. (2004). Price Transmission in Selected Agricultural Markets. *Working Paper*. FAO Commodity and Trade Policy Research, No 7, March, 2004.
- Gatra News. (2015, Juni 08). Mentan Amran Tolak Impor Bawang Merah,

- Ini Alasannya. Diunduh tanggal 30 November 2012 dari <http://www.gatra.com>.
- Girapunthong, N., J. J. VanSickle, and A. Renwick. (2003). Price Asymmetry in the United States Fresh Tomato Market. *Journal of Food Distribution Research*. Vol. 34 (3), pp. 51-59.
- Houck, J.P. (1977). An Approach to Specifying and Estimating Nonreversible Functions. *Journal Agricultural Economics*. Vol. 59(3), pp. 570-572.
- Irawan, B. (2003). Membangun Agribisnis Hortikultura Terintegrasi Dengan Basis Kawasan Pasar. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 21 (1), pp. 67-82.
- Karantininis, K., K. Katrakilidis, dan M. Persson. (2011). Price Transmission in the Swedish Pork Chain: Asymmetric non linear ARDL. *Paper prepared for presentation at the EAAE 2011. Congress Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources*.
- Kharin, S. (2015). Vertical Price Transmission Along The Dairy Supply Chain in Russia. *Agricultural Economics*. Vol. 117 (2), pp. 80-85.
- Khotimah, H. (2013). The Price Transmission in Rice Market Chain in Indonesia [tesis]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.
- Kofi, J. B dan R. K. Vijaya,. (2016). Market integration and price transmission between selected imported rice and local rice markets in Ghana: application of non-linear co-integration approach. *Journal Agriculture and Forestry Science*. Vol. 4 (2), pp. 1-7.
- Koutroumanidis, T., E. Zafeirioua, , G. Arabatzis. (2009). Asymmetry in Price Transmission Between the Producer and the Consumer Prices in the Wood Sector and the Role of Imports: The Case of Greece. *Forest Policy and Economics*. Vol. 11 (1), pp. 56-64
- McCorriston, S., C.W. Morgan, dan A.J. Rayner. (2000). Price Transmission: The Interaction Between Firm Behaviour And Returns To Scale. *Discussion Paper*. University Of Nottingham. ISSN 1360-2438.
- Meyer, J. and S. von Cramon-Taubadel. (2004). Asymmetric Price Transmission: A Survey. *Journal of Agricultural Economics*. Vol. 55(3), pp. 581-611.
- Nurasa, T. dan V. Darwis. (2007). Analisis Usahatani dan Keragaan Marjin Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Akta Agrosia*. Vol. 10 (1), pp. 40-48.
- Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ). (2014). Harga Grosir dan Pasokan Hortikultura Ke PIKJ. Jakarta: PIKJ.
- Prastowo, N. J. , T. Yanuarti dan Y. Depari. (2008). Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi. Working Paper. Bank Indonesia
- Rachman, B. (2003). Dinamika harga dan perdagangan komoditas jagung. Kementan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Rahim, M. (2010). Dampak Kebijakan Harga dan Impor Beras Terhadap Nilai Tukar Petani di Pantai Utara Jawa Barat. *Trikonomika*. Vol. 9 (1), pp. 29-36.

- Rajcaniova, M. dan Pokrivcak, J. (2013). Asymmetry in Price Transmission Mechanism: the Case of Slovak Potato Market. *Review of Agricultural and Applied Economics*. Vol. 16 (2), pp.16–23.
- Rajendran, S. (2015). Price Transmission Process in Vertical Markets: an Empirical Analysis of Onion Markets in Tamil Nadu State (India). *European Journal of Sustainable Development*. Vol. 4 (1),pp. 9-22.
- Tanko, M dan Amikuzuno, J. (2015). Effects of Rice Importation on the Pricing of Domestic Rice in Northern Region of Ghana. *ABC Research house*. Vol. 3 (2), pp. 23-26.
- Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi (TPPI). (2013). Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2013. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Von Cramon-Taubadel, S. and J.P. Loy. (1996). Price Asymmetry in the International Wheat Market. *Canadian Journal of Agricultural Economics*. Vol. 44(3) , pp. 311-317.
- Yustiningsih, F. (2012). Analisa integrasi pasar dan transmisi harga beras petani-konsumen di Indonesia [tesis]. Depok (ID): Universitas Indonesia.

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP USAHA TANI BERAS ORGANIK DI PROVINSI JAWA BARAT

The Impacts of Government Policy towards Organic Rice Farming in West Java

Ulpah Jakiyah¹, Lukman M Baga², Netti Tinaprilla²

¹ Program Studi Magister Sains Agribisnis, Sekolah Pascasarjana IPB

² Departemen Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

Jl. Kamper, Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia 16680

e-mail: ulpahjaki89@gmail.com

Naskah diterima: 12/08/2015 Naskah direvisi: 01/12/2015 Disetujui diterbitkan: 24/02/2016

Abstrak

Salah satu kebijakan Menteri Pertanian berkenaan dengan ekspor dan impor beras adalah peningkatan ekspor jenis beras khusus, seperti beras organik. Permintaan pasar global beras organik semakin meningkat, tetapi Indonesia menghadapi pesaing seperti Thailand dan Vietnam. Meskipun demikian, petani beras organik di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemampuan daya saingnya dengan keberhasilannya melakukan ekspor ke Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Singapura, Belanda, Italia, dan Uni Emirate Arab (Dubai). Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing beras organik, dan mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Metode analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas beras organik memiliki daya saing yang cukup untuk ekspor, terlihat pada keunggulan kompetitif (*Private Cost Ratio*) dan komparatif (*Domestic Resource Cost Ratio*). Penerimaan secara finansial maupun sosial dapat memenuhi biaya input domestik. Keunggulan kompetitif dan komparatif melemah akibat dari adanya pengaruh biaya sertifikasi lahan pada biaya domestik dan biaya kemasan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output menguntungkan petani. Kebijakan bersifat efektif namun belum efisien akibat belum adanya lembaga penyediaan input seperti pupuk dan benih organik.

Kata kunci : Keunggulan Kompetitif, Keunggulan Komparatif, Beras Organik, Kebijakan Pemerintah, *Policy Analysis Matrix*

Abstract

One of the agriculture minister policies related to rice exports and imports is the increased number of certain type of rice export such as organic rice. The global demand of organic rice market has been increasing but Indonesia is facing competitors, such as Thailand and Vietnam. Nevertheless, organic rice farmers in west java province are showing their competitive capability by exporting to a United States, Germany, Malaysia, Singapore, The netherlands, Italy, and Uni Emirate Arab (Dubai). This study aims to analyze the competitiveness of organic rice, and identify the impacts in government policy for the organic rice farming. The result shows that some varieties of organic rice have adequate export competitiveness, seen from the competitive advantage (private cost ratio) and the comparative advantage (domestic cost ratio) which are positive. The analysis method used was Policy Analysis Matrix (PAM). The financial and social revenue could cover the input of domestic cost. The competitive and comparative advantages were weakened as a result of the influence of land certification in the domestic and packaging cost, whereas the impact of government policy to input and output is profitable for farmers. The policy is effective but has not been efficient due to lack of input providers such as fertilizer and organic seeds.

Keywords: *Competitive Advantage, Comparative Advantage, Organic Rice, Government Policy, Policy Analysis Matrix*

JEL Classification: Q17, Q18, Q28

PENDAHULUAN

Keputusan pemerintah Indonesia untuk masuk ke pasar bebas menuntut pemerintah meningkatkan berbagai potensi ekspor Indonesia, termasuk diantaranya potensi dari sektor pertanian. Pertumbuhan ekspor Indonesia terhadap pertanian dinilai paling konsisten ditinjau dari luas areal lahan dan tingkat produksi (Kaunang, 2013). Lahan pertanian yang sangat luas dan jumlah petani yang besar merupakan potensi bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain, termasuk juga pertanian organik. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah hendaknya dapat mendukung dan melindungi petani beras organik dalam negeri.

Perkembangan luas areal pertanian organik Indonesia dari tahun 2010-2013 mengalami tren meningkat (BPS, 2014). Walaupun pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dari 88.247 Ha menjadi 65.688 Ha namun dapat dikendalikan dengan semakin banyaknya petani yang berminat melakukan usaha tani organik (IFOAM, 2014). Berdasarkan data dari IFOAM (2014), tahun 2013 luas areal pertanian organik Indonesia telah menyumbang 0.1% share lahan pertanian organik dunia. Penurunan luas lahan pertanian organik tersebut dikarenakan adanya kebijakan sertifikasi dan penyesuaian lahan organik. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap produksi dan daya saing usaha tani pertanian organik baik di pasar domestik maupun pasar internasional (Willer, 2010).

Permintaan pasar mengenai pertanian organik mencapai 72 miliar USD (IFOAM, 2014). Salah satunya permintaan luar negeri terhadap beras organik mencapai 100 ribu ton pertahun. Sedangkan Indonesia hanya mampu mengekspor 9 ribu ton per musim tanam, atau kurang dari 10% dari kebutuhan pasar global. Sebagai pengeskor beras organik, Indonesia masih tertinggal jauh dengan Thailand dan Vietnam, yakni dua negara tetangga Indonesia yang ditetapkan oleh IFOAM sebagai pengeksport utama dunia beras organik dunia Thailand dan Vietnam lebih dahulu melihat potensi pasar produk pertanian organik, sehingga strategi pengembangan produksi ataupun aturan-aturan terkait dengan produk beras organik telah lebih maju.

Peluang pasar organik dimanfaatkan oleh petani di Provinsi Jawa Barat, khususnya petani Kabupaten Tasikmalaya. Mereka berhasil melakukan budidaya serta ekspor beras organik ke Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Singapura, Malaysia, Italia, dan Uni Emirate Arab (Dubai). Tidak ada data statistik resmi jumlah produksi beras organik secara national namun perkiraan semakin meningkatnya potensi pasar dapat dilihat dari meningkatnya ekonomi, semakin peduli konsumen akan kesehatan, dan peduli terhadap lingkungan (Mayrowani, 2014). Data tentang jumlah produksi beras organik belum disusun dan dibukukan secara national oleh lembaga pertanian ataupun oleh BPS.

Kebijakan pemerintah daerah setempat mendukung kegiatan penanaman dan peningkatan produksi

beras organik Tasikmalaya. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya (2015), selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2014, ekspor beras organik daerah ini mengalami tren meningkat. Tahun 2014 volume ekspor mencapai 93.875 Kg. Kegiatan pascapanen terpusat di Gapoktan Simpatik dan dijadikan sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi dan meningkatkan *bargaining position* petani. Ekspor beras organik dilakukan melalui distributor PT Bloom Agro.

Potensi yang dimiliki usaha tani beras organik Kabupaten Tasikmalaya adalah jumlah petani dan luas lahan pertanian. Jumlah petani yang bersertifikasi organik semakin meningkat menjadi 465 orang. Begitu juga luas lahan petani beras organik meningkat pula, mencapai sekitar 360 Ha dengan sertifikasi international *Institute for Marketecology Organic* (IMO). Kegiatan pemasaran ekspor beras organik sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014. Kesesuaian input pertanian beras organik seperti penggunaan pupuk organik telah diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR/11/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi. Sebagai daerah penghasil produk ekspor Kabupaten Tasikmalaya belum memenuhi kebutuhan pasar global dan domestik. Kebutuhan pasar global dan domestik beras organik mencapai 320 ton per musim tanam sedangkan daerah ini hanya mampu menghasilkan 31.4 ton per musim tanam.

Memanfaatkan peluang ekspor beras organik yang terus meningkat

merupakan komitmen Pemerintah Indonesia, dan ekspor beras organik Tasikmalaya merupakan kasus empiris menarik sebagai pembelajaran bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan daya saing beras organik. Hubungan kausalitas yang terjadi antara ekspor produk beras organik Tasikmalaya dan kebijakan pemerintah setempat dengan demikian merupakan masukan penting untuk penyusunan kebijakan peningkatan ekspor beras organik Indonesia yang lebih menyeluruh. Penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut jelas sangat relevan, dan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengetahui dampak dari suatu kebijakan terhadap usaha tani beras organik.

METODE

Perdagangan Internasional memberikan peluang bagi negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Krugman (2004) menjelaskan bahwa keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang mempunyai biaya pengorbanan (*opportunity cost*) terendah dibanding memproduksi barang lain. Sedangkan keunggulan kompetitif dapat diukur dari kelayakan finansial dari kegiatan usaha. Keunggulan kompetitif dihitung berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar.

Kegiatan perdagangan ekspor beras organik tidak pernah lepas dari kebijakan pemerintah. Sehingga diperlukan metode analisis yang dapat mencakup konsep daya saing dan dampak kebijakan (Soetriono, 2010). Metode yang digunakan secara

menyeluruh bagaimana dampak kebijakan dan daya saing beras organik adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). PAM digunakan untuk menghitung keuntungan, baik keuntungan privat maupun keuntungan sosial. Analisis keuntungan privat pada PAM adalah selisih dari pendapatan privat dan biaya privat. Keuntungan privat merupakan keuntungan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sedangkan analisis keuntungan sosial merupakan keuntungan dengan adanya campur tangan pemerintah.

Menurut Yadjid (2011), tujuan penggunaan PAM adalah untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan besarnya intervensi pemerintah serta dampaknya terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Analisis daya saing komparatif didapatkan dengan perhitungan Rasio Sumberdaya Domestik (DRC), sedangkan keunggulan kompetitif dapat dihitung menggunakan perhitungan Rasio Biaya Privat (PCR).

Hasil analisis PAM dapat menunjukkan pengaruh individual maupun kolektif dari kebijakan harga dan kebijakan faktor domestik. PAM juga memberikan informasi dasar yang penting bagi *benefit-cost analysis* untuk kegiatan investasi di bidang pertanian. Selain itu, PAM digunakan untuk menganalisis kebijakan mengenai penerimaan secara konsisten dan menyeluruh biaya usaha tani, tingkat perbedaan pasar, sistem pertanian, investasi pertanian, dan efisiensi ekonomi.

Penelitian tentang beras organik di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan pada Bulan Februari 2015 sampai bulan

April 2015. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Gapoktan, petani atau anggota kelompok tani, dan penyuluh pertanian setempat. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, IFOAM, dan FAO melalui jaringan internet. Petani responden di masing-masing lokasi dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilik dan penggarap yang telah memperoleh sertifikasi organik dari IMO dan Sucofindo. Petani yang menjadi responden berjumlah 25 orang, masing-masing 5 orang dari 5 kelompok tani yang menghasilkan jenis beras organik yang berbeda.

Penelitian analisis daya saing pada usaha tani beras organik di Gapoktan Simpatik menggunakan metode PAM yang dikembangkan oleh Monke & Pearson (1989). Sebagaimana yang dilakukan oleh Yadjid (2011) dalam penelitian mengenai daya saing usaha tani Tebu. Tahapan dalam menganalisis metode PAM sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi seluruh input yang digunakan dalam proses produksi.
2. Mengalokasikan input tradable dan input non tradable.
3. Menghitung harga bayangan input, output, dan nilai tukar uang.
4. Menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif dengan metode PAM.

Input usaha tani beras organik adalah benih beras organik, pupuk, lahan, dan tenaga kerja. Lahan dalam penelitian ini membutuhkan sertifikasi

lahan organik sehingga adanya biaya tambahan yaitu biaya sertifikasi. Sedangkan output dalam usaha tani ini adalah beras organik. Tahapan dalam mengidentifikasi input dan output usaha tani beras organik antara lain:

Penentuan harga bayangan dan harga pasar

Setiap input dan output pada penelitian ini ditetapkan dua tingkat harga, yaitu harga bayangan dan harga pasar. Harga pasar adalah tingkat harga pasar yang diterima pengusaha dalam penjualan hasil produksinya atau tingkat harga yang dibayar dalam pembelian faktor pembelian. Menurut Gittinger (1986), harga bayangan merupakan harga yang terjadi dalam perekonomian pada keadaan persaingan sempurna dan kondisi keseimbangan. Biaya imbangun sama dengan harga pasar sulit ditemukan, maka untuk memperoleh nilai yang mendekati biaya imbangun ini dilakukan dengan penyesuaian terhadap pasar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan komoditi yang diperdagangkan, dan akan didekati dengan harga batas (*border price*). Komoditas beras organik selama ini diekspor, dan karena itu digunakan harga *Free On Board* (FOB).

Harga Bayangan Nilai Mata Uang

Harga bayangan nilai mata uang adalah harga uang domestik dalam kaitannya dengan mata uang asing

yang terjadi pada pasar nilai tukar uang pada kondisi bersaing sempurna. Salah satu pendekatan untuk menghitung harga bayangan nilai tukar uang adalah harga bayangan harus berada pada tingkat keseimbangan nilai tukar uang. Keseimbangan terjadi apabila dalam pasar uang, semua pembatas dan subsidi terhadap ekspor dan impor dihilangkan. Keseimbangan nilai tukar uang dapat didekati dengan menggunakan *Standar Conversion Factor* (SCF) sebagai faktor koreksi terhadap nilai tukar resmi yang berlaku:

$$SER_t = \frac{OER_t}{SCF_t} \text{ dimana } SCF_t = \frac{X_t + M_t}{(X_t - TX_t) + (M_t + TM_t)}$$

Dimana:

SER_t = Nilai tukar bayangan tahun t (Rp/USD)

SCF_t = *standard conversion faktor* (faktor konversi standar) tahun t

X_t = nilai ekspor Indonesia tahun t (Rp)

M_t = nilai impor Indonesia tahun t (Rp)

TM_t = pajak impor dan bea masuk tahun t (Rp)

Metode Analisis PAM

Model PAM digunakan untuk menganalisis daya saing dan dampak kebijakan dengan formulasi Tabel 1.

Tabel 1. Policy Analisis Matrix

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Input Non Tradable	
Harga privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Efek Divergensi	I	J	K	L

Sumber : Monke & Pearson (1989)

Keterangan:

A : Penerimaan Privat

B : Biaya input *Tradable* Privat

C : Biaya input *non tradable* Privat

D : Keuntungan Privat

E : Penerimaan Sosial

F : Biaya input *tradable* Sosial

G : Biaya Input *non tradable* Sosial

H : Keuntungan Sosial

I : Transfer Output

J : Transfer input *Tradable*

K : Transfer Faktor

L : Transfer bersih

Analisis terpenting dalam matriks PAM dilihat dari ukuran keuntungan dan transfer bersih (*net transfer*) (Asmara, 2008). Sebelum menganalisis PAM menguraikan terlebih dahulu komponen pendapatan maupun biaya sehingga memungkinkan untuk mengukur *output transfer*, *input transfer*, dan *factor domestic transfer* (Tabel 1). Analisis PAM bisa digunakan untuk sistem komoditas individual yang berbeda, jenis usaha tani, dan teknologi (Salim, 2014). Tabel 1 memperlihatkan bentuk Tabel (matrix) PAM. Baris pertama didasarkan pada harga privat. Nilai-nilai pada baris ini menggunakan data harga yang benar-benar diterima atau dibayar oleh petani (harga actual) atau oleh pelaku agribisnis lainnya. Keuntungan privat mengukur daya saing, yakni insentif bagi petani untuk memproduksi suatu komoditas. Baris kedua, berisi nilai-nilai yang didasarkan pada estimasi pendapatan dan biaya sosial. Nilai-nilai ini didasarkan pada harga paritas untuk barang-barang tradable dan *opportunity*

cost untuk sumberdaya domestik. Kolom keuntungan memberikan nilai untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dan menunjukkan apakah sebuah komoditas memiliki keunggulan komparatif. Pada baris ketiga, setiap kolom berisikan selisih antara nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga privat (baris pertama) dengan nilai-nilai yang dihitung menggunakan harga sosial (baris kedua). Bila kegagalan pasar pengaruhnya tidak besar, maka selisih tersebut disebabkan oleh intervensi kebijakan pemerintah. Intervensi kebijakan ini merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Beberapa Indikator Hasil Analisis dari Matriks PAM adalah :

1. Analisis Keuntungan

- a. *Private Provitability* / Keuntungan Privat (KP) : $D = A - (B+C)$

Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditi memperoleh profit atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditi itu mampu ekspansi, kecuali apabila

sumberdaya terbatas atau adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan.

- b. *Sosial Profitability/Keuntungan Sosial (KS)* : $H = E - (F+G)$
Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sistem komoditi pada kondisi tidak ada divergensi baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar.

2. Keunggulan Kompetitif dan Komparatif

- a. *Private Cost Ratio (PCR)* = $C / (A-B)$: rasio ini menunjukkan berapa banyak sistem produksi usaha tani beras organik dapat menghasilkan untuk membayar semua faktor domestik yang digunakannya, dan tetap dalam kondisi kompetitif. Jika $PCR < 1$, berarti sistem komoditi yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif dan sebaliknya jika $PCR > 1$, berarti sistem komoditi tidak memiliki keunggulan kompetitif.

- b. *Domestik Resource Cost Ratio (DRCR)* = $G/(E-F)$: merupakan salah satu kriteria kemampuan usaha tani dalam membiayai faktor domestik pada harga sosialnya atau kriteria dari efisiensi ekonomi relatif dari suatu sistem produksi. Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika $DRC < 1$ artinya sistem produksi usaha tani beras organik makin efisien dan memiliki daya saing di pasar dunia sehingga memiliki peluang ekspor yang cukup besar, dan sebaliknya jika $DRC > 1$

berarti sistem produksi tersebut tidak mempunyai keunggulan komparatif dengan tidak mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, sehingga lebih baik melakukan impor daripada memproduksi sendiri.

3. Dampak Kebijakan Pemerintah

a. *Kebijakan Output*

- 1) *Output Transfer* : $OT = A-E$:
Jika nilai $OT > 0$ menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) terhadap produsen artinya produsen akan menerima harga jual yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya sehingga konsumen dirugikan. Sedangkan jika $OT < 0$ maka konsumen menerima intensif dari produsen dan dalam hal ini petani atau produsen dirugikan.

- 2) *Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)* = A/E : NPCO menunjukkan besarnya dampak kebijakan pemerintah yang mengakibatkan divergensi antara harga privat dan harga sosial. Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai NPCO > 1 yang artinya petani beras organik menerima subsidi atas output di pasar domestik di atas harga efisiensinya, dan sebaliknya kebijakan bersifat disinsentif jika NPCO < 1 yang artinya terjadi pengurangan penerimaan petani akibat kebijakan output seperti pajak.

b. *Kebijakan Input*

- 1) *Transfer Input* : $IT = B - F$: Jika nilai $IT > 0$, menunjukkan adanya

transfer dari petani produsen kepada produsen *input tradable*, demikian juga sebaliknya.

2) *Nominal protection Coefficient on Input* (NPCI) = B/F : Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1 , berarti ada kebijakan subsidi terhadap *input tradable*, demikian juga sebaliknya.

3) *Transfer Faktor* : $FT = C - G$: Nilai $FT > 0$, mengandung arti bahwa ada transfer dari petani produsen kepada produsen input non tradable, demikian juga sebaliknya.

c. *Kebijakan Input-Output*

1) *Effective Protection Coefficient* (EPC) = $(A-B)/(E-F)$: Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai $EPC > 1$. Semakin besar nilai EPC berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditi pertanian domestik.

2) *Net Transfer*: $NT = D - H$: Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output, demikian juga sebaliknya.

3) *Profitability Coefficient* : $PC = D/H$: Jika $PC > 0$, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen, demikian juga sebaliknya.

4) *Subsidy Ratio to Producer* (SRP) = $L/E = (D-H)/E$: yaitu indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial

yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah terhadap Output dan Input

Kebijakan pemerintah diberlakukan terhadap input dan output sehingga terjadi perbedaan antara harga input dan output yang diminta produsen (harga privat) dengan harga yang sebenarnya terjadi jika dalam keadaan perdagangan bebas (harga sosial). Beras organik merupakan komoditas ekspor maka kebijakan pemerintah terhadap output dan input sangat berpengaruh. Kebijakan harga output dan input dibedakan menjadi tiga tipe kriteria yaitu tipe instrumen (subsidi atau perdagangan), penerimaan atau keuntungan yang akan diperoleh (produsen dan konsumen), dan tipe komoditi (ekspor atau impor). Implementasi dan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan peluang ekspor suatu komoditi dan kemajuan negara tersebut melindungi produsen atau konsumen dalam negeri.

Menurut Monke & Pearson (1989) kebijakan harga output dan input adalah kebijakan subsidi dan kebijakan perdagangan dalam negeri. Kebijakan subsidi dapat berupa subsidi positif yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan subsidi negatif adalah subsidi yang dibayarkan kepada pemerintah berupa pajak. Subsidi positif dan negatif bertujuan untuk membedakan

antara harga domestik dan harga dunia dalam rangka melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. Kebijakan perdagangan yang dapat diterapkan pemerintah berupa harga komoditi yang diperdagangkan (tarif) atau dengan membatasi jumlah komoditi yang di impor (kuota). Kegiatan usaha tani beras organik menggunakan input yang bersifat *tradable* dan *non tradable*. Kebijakan pemerintah terhadap input *non tradable* berupa hambatan perdagangan yang tidak tampak karena input tersebut hanya diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri.

Kebijakan yang ada terhadap input dan output beras organik selama ini antara lain 1) Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang ketentuan umum pertanian organik dari hulu sampai hilir; 2) Permentan Nomor 51/Permentan/HK.130/4/2014 tentang rekomendasi ekspor impor beras tertentu lebih kepada persyaratan bagaimana melakukan perdagangan produk organik; 3) Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan ekspor impor beras untuk mengesahkan Permentan no 51; 4) Permentan Nomor 130/Permentan/SR/11/2015 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi salah satunya pupuk organik. HET untuk pupuk organik ditetapkan pemerintah sebesar Rp 500 per kg untuk pembelian oleh petani atau kelompok tani di lini IV secara tunai dalam kemasan 40 kg; 5) Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/SR.140/2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah. Peraturan ini dimaksudkan

sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan, pendaftaran, peredaran, penggunaan dan pengawasan pupuk organik

Implikasi Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha tani Beras Organik

Kebijakan pemerintah mengenai pertanian organik telah ditetapkan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir. Permendag nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 mengenai ketentuan ekspor beras mengharuskan sebuah perusahaan telah memiliki persyaratan badan usaha dan bongkar muat di pelabuhan. Sedangkan pemasaran petani di Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu melakukan pemasaran ditempat dikarenakan tingginya biaya angkut ke pelabuhan. Sehingga alternatif dari adanya kebijakan tersebut adalah bekerjasama dengan PT Bloom Agro melalui kontrak kerjasama. PT Bloom Agro melakukan bongkar muat beras organik di gapoktan dan mengekspornya. Pemasaran ini menjadikan harga beras organik dan dengan adanya ekspor tersebut petani beras organik Tasikmalaya dapat meningkatkan pendapatan mereka, bahkan mencapai tiga kali lipat dari budidaya beras konvensional (Nafis, 2011).

Peraturan Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/SR.140/2011 tentang penyediaan pupuk organik menetapkan penyaluran pupuk organik dilakukan oleh lembaga khusus yang bersertifikasi SNI dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Akan tetapi lembaga khusus untuk itu

belum ada, sehingga gapoktan harus membuat pupuk organik sendiri, secara manual yang jumlahnya masih terbatas. Petani di Kabupaten merasa belum terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Penyediaan benih begitu juga masih sangat terbatas. Peraturan Menteri Pertanian nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 mengenai penggunaan benih organik belum secara khusus mencantumkan aturan pengadaan, pendaftaran, peredaran, pengawasan, dan perlindungan benih organik. Peraturan tersebut hanya sebatas memberikan persyaratan bagi petani untuk bertanam organik tanpa adanya penanganan dan sistem kelembagaan yang dapat menampung aspirasi bagi petani beras organik.

Kebijakan pemerintah sebaiknya dilakukan juga dalam pengaturan Bergeraknya produk organik serta menyediakan informasi penting bagi petani seperti peluang pasar, menetapkan harga jual, dan proteksi terhadap peredaran organik palsu. Diperlukan juga kebijakan yang mengatur bagaimana subsidi terhadap pupuk benar-benar terdistribusi langsung kepada petani tanpa adanya perantara dari lembaga-lembaga lain yang akan memotong rantai pupuk organik. Implikasi kebijakan yang menyeluruh dari hulu sampai hilir akan membuat petani beras organik di Kabupaten

Tasikmalaya mampu mempertahankan kegiatan ekspor beras organik yang mereka hasilkan. Kesejahteraan rumah tangga tani dengan demikian dapat berlanjut.

Daya Saing dan Dampak Kebijakan Usaha tani Beras Organik

Hasil analisis daya saing komoditi beras organik, baik daya saing komparatif maupun kompetitif, dengan alat analisis *Policy Analysis Matriks* (PAM) menunjukkan bahwa nilai KP untuk beras merah organik adalah Rp 2.193.448.53,- per hektar per tanam, beras hitam organik memiliki nilai KP Rp 3.487.636.14,- per hektar per tanam, dan beras putih organik memiliki nilai Rp 2 035 150.90,- per hektar per tanam. Nilai keuntungan ketiga varietas beras organik bersifat positif, dan ini berarti bahwa perusahaan ketiga varietas tersebut menguntungkan. Penerimaan yang diterima petani lebih tinggi dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Budidaya beras organik tidak menggunakan pupuk urea dan pestisida. Pertanian beras organik menggunakan pupuk kompos, pupuk yang dapat dihasilkan sendiri oleh petani sehingga tidak membutuhkan biaya tinggi. Selain itu harga jual beras organik lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya dapat terus mengembangkan pertanian beras organik.

Tabel 2. Nilai Keuntungan Privat (KP) dan *Privat Cost Ratio* (PCR) Pengusahaan Beras Organik Tahun 2015

No	Varietas Beras	KP (Rp/Ha)	PCR
1	Beras Merah Organik	2.193.448,53	0.86
2	Beras Hitam Organik	3.487.636,14	0.79
3	Beras Putih Organik	2.035.150,90	0.88

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Keunggulan kompetitif ketiga varietas beras organik juga terlihat dari nilai PCR nilai yang positif, yaitu beras merah 0.86, beras hitam 0.79, dan beras putih 0.88. Nilai PCR dari ketiga komoditas tersebut yang kurang dari satu berarti bahwa perusahaan ketiga varietas beras organik tersebut efisien dan memiliki keunggulan kompetitif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah pada usaha tani beras merah organik membutuhkan biaya input domestik sebesar 0.86 pada harga privat. Pada beras hitam organik membutuhkan biaya input domestik sebesar 0.79 satuan pada harga privat untuk 1 unit nilai tambah.

Begitu juga pada beras putih memiliki nilai 0.88 artinya untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah membutuhkan biaya input domestik sebesar 0.88 satuan pada harga privat.

Meskipun demikian, ketiga jenis beras organik memiliki nilai hampir mendekati 1. Artinya, ketiga jenis beras organik yang dimaksud memiliki nilai keunggulan kompetitif yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya biaya sertifikasi lahan, pengeluaran yang mempengaruhi biaya domestik dan biaya kemasan pada input asing. Semakin rendah nilai PCR menunjukkan semakin besar keunggulan kompetitif yang dimilikinya.

Tabel 3. Nilai Keuntungan Sosial (KS) dan DRC Pengusahaan Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

No	Varietas Beras	KS (Rp/Ha)	DRC
1	Beras Merah Organik	5.235.773,89	0,66
2	Beras Hitam Organik	3.205.429,15	0,75
3	Beras Putih Organik	392.997,31	0,96

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Nilai Keuntungan Sosial (KS) beras merah organik Rp. 5.235.773.89,- per hektar per tanam, beras hitam organik memiliki nilai KS Rp. 3.205.429.15,- per

hektar per tanam, sedangkan beras putih Rp. 392.997.31,- per hektar per tanam. Ketiga jenis beras organik ini memiliki nilai positif yang berarti bahwa

tanpa adanya kebijakan apapun dari pemerintah, ketiga komoditas tersebut memberikan keuntungan. Bersifat positif dikarenakan penerimaan beras organik secara sosial dapat menutupi semua biaya baik domestik maupun asing. Nilai DRC pada beras merah organik menjelaskan bahwa untuk memproduksi beras merah organik di tempat penelitian membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 0,66 satuan terhadap biaya ekspor yang dibutuhkan. Nilai DRC pada beras hitam organik menunjukkan bahwa untuk memproduksi beras hitam organik di tempat penelitian membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 0,75 terhadap biaya ekspor yang dibutuhkan. Sedangkan untuk nilai DRC pada beras putih organik menunjukkan bahwa memproduksi beras putih organik membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 0,96 satuan. Nilai DRC ketiga varietas tersebut memiliki nilai kurang dari satu yang artinya ketiga varietas tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sehingga ketiga komoditas tersebut memiliki peluang ekspor. Nilai dari ketiga beras organik hampir mendekati 1 artinya memiliki keunggulan kompetitif yang sangat rendah namun masih bisa diusahakan. Hal ini dikarenakan tingginya harga kemasan dan biaya sertifikasi lahan secara sosial pada usaha tani beras organik.

Memperbandingkan antara keuntungan privat dan sosial dari ketiga jenis beras organik menggambarkan bahwa keuntungan sosial lebih tinggi dari

keuntungan privat pada beras hitam dan merah. Hal ini dikarenakan penggunaan input baik secara domestik maupun asing pada harga sosial lebih rendah dari pada input pada harga privat. Artinya petani masih memperoleh biaya input lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan. Namun pada usaha tani beras putih berbeda dengan kedua jenis beras organik. Keuntungan sosial lebih kecil dari keuntungan privat pada beras putih. Hal ini dikarenakan harga jual beras putih organik lebih tinggi dari harga sosialnya.

Selain keuntungan, perlu juga dilihat dari sisi keunggulan yang dimiliki. Jika dibandingkan nilai DRC dan PCR pada usaha tani beras organik ini diketahui bahwa nilai PCR beras hitam dan beras merah lebih rendah dibandingkan dengan nilai DRC nya. Artinya bahwa keunggulan kompetitif lebih rendah dibandingkan dengan keunggulan komparatif. Penerimaan secara privat pada beras hitam dan merah memiliki kemampuan lebih rendah dibandingkan secara sosial dalam memenuhi kebutuhan input domestiknya. Hal ini dikarenakan harga jual diterima petani lebih rendah dari harga sosialnya. Hasil analisis daya saing ini tidak berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya pada usaha penggemukan sapi potong, yang menunjukkan pula nilai DRC lebih tinggi dari PCR (Rouf *et al.* 2014) dan penelitian analisis pendapatan usaha tani beras dengan SRI yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2010) bahwa usaha tani beras dengan SRI memberikan

keuntungan secara finansial. Namun berbeda dengan hal tersebut adalah beras organik putih, yang menunjukkan nilai PCR lebih tinggi dari nilai DRC. Artinya, beras organik putih memiliki keunggulan komparatif lebih tinggi dari dari keunggulan kompetitif. Hal ini dikarenakan harga jual beras putih lebih tinggi dengan harga sosialnya.

Dampak kebijakan pemerintah dianalisis dengan pengamatan pada tiga aspek berikut.

1. Dampak kebijakan terhadap output
Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat dilihat dengan menggunakan nilai TO (*Transfer Output*) dan NPCO (*Nominal Protection Coefficient on Output*). Nilai transfer Output pada beras merah sebesar Rp. 1.772.890,39,- hektar, beras hitam Rp. 5.337.893,86,-per hektar dan beras putih Rp. 8.447.279,97,-per hektar. Begitu juga nilai NPCO lebih besar dari 1. (Lihat Tabel 4).

Tabel 4. Nilai *Transfer Output* (TO) dan *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) Pengusahaan Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

No	Varietas Beras	TO (Rp/Ha)	NPCO
1	Beras Merah Organik	1.772.890,39	1,09
2	Beras Hitam Organik	5.337.893,86	1,36
3	Beras Putih Organik	8.447.279,97	1,64

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Nilai transfer output bersifat positif. Artinya, harga privat lebih tinggi dari harga sosialnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan atau intervensi pemerintah pada output usaha tani beras organik menguntungkan produsen. Dengan kata lain, pengalihan surplus terjadi, dari konsumen ke produsen. Nilai transfer output lebih besar dari 0 dan NPCO lebih besar dari 1 mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan harga output ditingkat petani lebih tinggi dari harga sosial. Kebijakan pemerintah pada output beras organik yaitu Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 yang menegaskan penjualan yang harus melalui badan usaha menyebabkan petani memiliki kesulitan dalam kegiatan

ekspor. Namun hal ini dapat diantisipasi melalui kerjasama dengan pihak distributor PT Bloom Agro. Pasar yang dihadapi petani bersifat monopsoni dimana hanya PT Bloom Agro yang melakukan pembelian ke petani di Kabupaten Tasikmalaya. Sebaliknya, kebijakan pemerintah pada sertifikasi organik dalam Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 berakibat harga jual beras organik lebih tinggi dari harga jual beras non organik.

2. Dampak Kebijakan Terhadap Input
Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat intervensi pemerintah terhadap input produksi adalah nilai *transfer input* (TI), Transfer Faktor dan koefisien proteksi nominal pada input (NPCI) dari ketiga varietas beras organik (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Nilai Transfer Input (TI), Transfer Faktor (TF), dan *Nominal Protection Coefficient on Input* (NPCI) Pengusahaan Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

No	Varietas Beras	TI (Rp/Ha)	NPCI	TF (Rp/Ha)
1	Beras Merah Organik	1.772.890,39	1,09	1.459.625,98
2	Beras Hitam Organik	1.196.072,08	1,60	3.859.614,79
3	Beras Putih Organik	545.261,56	1,16	6.259.864,82

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Pada ketiga varietas beras organik nilai TI bersifat positif. Ini berarti bahwa harga sosial input asing lebih rendah dari harga input asing privat sehingga produsen beras merah, beras hitam, dan beras putih organik harus membayar input lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan. Ketiga varietas tidak memperoleh subsidi pada input tradable sehingga semua biaya input tradable ditanggung oleh petani. Tidak adanya subsidi pada benih beras organik sehingga harga beli petani lebih tinggi dari harga sosialnya. Kebijakan subsidi input nomor 130/Permentan/SR/11/2015 hanya terdapat pada pupuk organik dan tidak sampai ke petani, sehingga petani, termasuk juga petani di Kabupaten Tasikmalaya, menerima harga melebihi nilai HET nya.

Nilai NPCI ketiga varietas beras organik Gapoktan Simpatik memiliki nilai yang sama di atas satu. Hal ini menunjukkan terdapat proteksi bagi produsen beras merah, hitam, dan putih terhadap *input tradable*, dan ini menyebabkan harga input produksi tinggi. Nilai TF pada ketiga komoditas

beras organik yang bersifat positif menggambarkan bahwa harga input *non tradable* pada harga finansial lebih tinggi dibandingkan dengan input *non tradable* pada harga sosial. Produsen beras hitam, merah, dan putih organik harus membayar input *non tradable* lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan. Mereka mengalami kerugian sebesar Rp. 1.459.625,98,- per hektar pada pengusahaan merah organik, Rp. 3.859.614,79,- per hektar pada beras hitam dan Rp. 6.259.864,82,- per hektar pada beras putih organik. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah nomor 70/Permentan/SR.140/2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah menyebabkan biaya lahan lebih tinggi dari yang seharusnya akibat adanya sertifikasi lahan.

3. Dampak Kebijakan Terhadap Input Output

Dampak kebijakan terhadap input output dapat dilihat dari nilai TB, EPC, SRP. TB, dan PC sebagai indikator bagaimana kebijakan pemerintah terhadap output dan input.

Tabel 6. Nilai TB, EPC, SRP, dan PC untuk Komoditas Beras Organik

No	Varietas Beras	TB (Rp/Ha)	EPC	SRP	PC
1	Beras Merah Organik	(3.042.325,36)	1.02	(0.17)	0.42
2	Beras Hitam Organik	282.206,99	1.32	0.02	1.08
3	Beras Putih Organik	1.642.153,59	1.82	0.13	5.17

Sumber : Hasil Pengamatan (2015)

Kebijakan pemerintah berdampak berbeda atas ketiga beras organik. Nilai transfer bersih beras hitam dan putih bersifat positif sedangkan nilai transfer bersih beras merah bersifat negatif. Dampak positif untuk beras hitam dan putih dikarenakan oleh penerimaan secara privat melebihi penerimaan secara sosial. Nilai transfer bersih yang negatif usaha tani beras organik di Kabupaten Tasikmalaya berarti bahwa petani menanggung kerugian, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output. Kebijakan tersebut menyebabkan petani beras merah mendapatkan keuntungan privat yang lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar. Pada analisis indikator dampak kebijakan output sebelumnya, nilai transfer yang positif petani beras merah mendapatkan harga beras merah yang lebih mahal dari harga sosialnya. Namun kebijakan input dan output yang diterapkan oleh pemerintah membuat keuntungan petani pada harga privat menjadi lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan sosialnya. Dengan demikian, kebijakan input dan output belum memberikan insentif kepada petani beras merah. Diantaranya disebabkan oleh kenaikan harga jual ekspor beras merah kurang sesuai dengan biaya tinggi yang

dikeluarkan untuk kemasan. Selain itu, pupuk organik yang tinggi merupakan biaya terbesar kedua yang dikeluarkan setelah biaya kemasan. Hal ini selaras dengan penelitian Sarianti (2012) bahwa harga pupuk organik masih tinggi digunakan petani beras organik di Ciburuy Sukabumi. Kebijakan yang ada dirasa belum mampu memberikan keuntungan bagi petani beras merah organik. Dilihat dari nilai indikator EPC yang lebih dari satu mengindikasikan bahwa kebijakan input dan output yang diterapkan pada usaha tani beras organik pada input asing di Kabupaten Tasikmalaya bersifat efektif. Hal ini disebabkan oleh harga input asing yang dibayar petani sesuai dengan harga jual beras organik.

Ada dan tidaknya dukungan pemerintah terhadap usaha tani beras organik ditunjukkan oleh nilai *Provitability Coefisien* (PC) dan *Subsidy Ratio Produsen* (SRP). Nilai PC merupakan rasio antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial. Jika nilai PC beras merah organik sebesar 0,42, berarti bahwa kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan bagi usaha tani beras merah. Hal ini sama dengan kebijakan terhadap komoditi kelapa di Kupang (Krisna,

2014). Berikutnya, apabila nilai rasio subsidi produsen (SRP) negatif pada beras merah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini menyebabkan petani beras merah harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sosial yang seharusnya dikeluarkan. Hal ini sangat berbeda dengan nilai SRP pada beras hitam dan putih dimana kebijakan pemerintah dirasa memberikan dukungan pada usaha tani beras hitam dan putih. Begitu juga pada kebijakan pemerintah terhadap impor daging sapi Australia yang membatasi kuota impor (Efrida, 2014).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pengusahaan beras merah, beras hitam, dan beras putih organik di Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Bahkan kebijakan pemerintah yang telah diterapkan secara keseluruhan berdampak positif bagi keuntungan petani. Berdampak negatif hanya terdapat pada penyediaan input seperti pupuk dan benih organik. Pengusahaan ketiga komoditi tersebut memberikan keuntungan baik secara finansial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara keseluruhan berdampak yang menguntungkan kepada produsen. Dengan kata lain, kebijakan yang ada terhadap input output bersifat melindungi produsen dalam negeri.

Dengan demikian, kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan ekspor

beras organik adalah pembentukan lembaga khusus yang menangani penyediaan input organik, sehingga dengan demikian petani lebih mudah memperoleh input yang diperlukan. Pembinaan, pelatihan, dan penerangan kepada petani perlu terus dilakukan bahwa prospek mengusahakan beras organik sangat menjanjikan. Selain itu juga diperlukan pembinaan lanjutan bagaimana strategi pengembangan usaha tani beras organik dan rantai pasar produk yang dihasilkannya pada pasar domestik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan naskah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, R., N. Artdiyasa. (2010). Analisis Tingkat Daya Saing Ekspor Komoditi Perkebunan Indonesia. *Jurnal Agricultural Socio Economics (AGRISE)*, Vol. VIII (2).
- BPS. (2014). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi* Edisi 52. Di unduh pada tanggal 23 Maret 2015 dari www.bps.go.id.
- Efrida, R.P. (2014). Dampak Kebijakan Indonesia Membatasi Kuota Impor Daging Sapi dari Australia. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.1 (2).

- Gittinger, J.P. (1986). *Economic Analysis of Agricultural Projects*. Second Edition. Baltimore Johns Hopkin University Press.
- IFOAM. (2014). Organic Agriculture Worldwide "Global Data and Survey Background". Journal : Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) : Frick. Switzerland.
- Kaunang, W.R. (2013). Daya Saing Ekspor Komoditi Kelapa Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, Vol. 1 (4).
- Kementan. (2015). Perkembangan Beras Organik Tasikmalaya 2005-2012. Tasikmalaya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya.
- Krisna. (2014). Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa Di Kabupaten Kupang. *Jurnal : AGRITECH*, Vol. 34 (1).
- Krugman, P.R., & Obstfeld, M. (2004). *Ekonomi Internasional "Teori dan Kebijakan"* Edisi Kelima. Gramedia. Jakarta
- Mayrowani, H. (2014). Pengembangan Pertanian Organik. *Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 30 (2), pp. 91-108.
- Monke, E.A., & S. R. Pearson. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. London. Cornell University Press.
- Mulyaningsih, A. (2010). Analisis Pendapatan Usahatani Beras Organik Metode SRI (*Sistem of Rice Intensification*); Studi Kasus Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Nafis, F. (2011). Analisis Usahatani Padi Organik dan Sistem Tataniaga Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Rouf, A.A., Daryanto, A & Fariyanti A. (2014). Daya Saing Usaha Sapi Potong di Indonesia: Pendekatan Domestic Resources Cost. *Jurnal WARTAZOA*, Vol. 24 (2), pp. 97-107
- Salim, H.P. (2014). Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Unggulan Hortikultura. *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sarianti, T. (2012). *Analisis Faktor dan Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Beras Organik serta Analisis Pendapatan dan Risiko Produksi Padi Organik*. Prosiding Seminar Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis. 27-28 Desember 2012. Bogor.
- Soetrisno. (2010). *Analisis Daya Saing Agribisnis Kopi Robusta. Sebuah Prespektif Ekonomi*. Malang. Surya Pena Gemilang.
- Willer, H. (2010). Organic Agriculture Worldwide. Key Results from the Global Survey On Organic. Journal Research Institut of Organic Agriculture FiBL and IFOAM, Frick, Switzerland. March 2012. Sciencedirect.com

Yadjid, M. (2011). *Analisis Daya Saing Usahatani Tebu dan Penyesuaian Struktural Industri Gula di Jawa Barat.*

Tesis. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Gedung Utama, Lt. 3 dan 4
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5
Jakarta Pusat
Telp. (021) 235 28681, 235 28680
Fax. (021) 235 28691

ISSN 1979-9187



9 771979 918009